

JALAN PANJANG Keadilan dan Perdamaian di Papua

Analisis dan Kronik Hak Asasi Manusia 2021

Bernadus Boki Koten, Farini Alexandro Rangga OFM,
Latifah Anum Siregar, Mochammad Wahyu Ghani,
Petrus Pit Supardi

JALAN PANJANG *Keadilan dan Perdamaian di Papua*



Analisis dan Kronik Hak Asasi Manusia 2021

**Undang-undang Republik Indonesia
No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JALAN PANJANG *Keadilan dan Perdamaian di Papua*

Analisis dan Kronik Hak Asasi Manusia 2021

Bernadus Boki Koten, Farini Alexandro Ranga OFM,
Latifah Anum Siregar, Mochammad Wahyu Ghani,
Petrus Pit Supardi



Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan
Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

Jalan Panjang Keadilan dan Perdamaian Papua:
Analisis dan Kronik Hak Asasi Manusia 2021

Copyrights©2022, SKPKC Fransiskan Papua

Cetakan I, November 2022

Penerbit:

SKPKC Fransiskan Papua

Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik

Biara St. Antonius Sentani, Jayapura

Papua 99352

www.fransiskanpapua.org

Email: skpkc2010@gmail.com

Penulis:

Bernadus Boki Koten

Farini Alexandro Rangga OFM

Latifah Anum Siregar

Mochammad Wahyu Ghani

Petrus Pit Supardi

Editor : Farini Alexandro Rangga OFM

Bernadus Boki Koten

Layout: Anastasia Lintang

ISBN : 978-623-94338-6-4

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	vii
Bab 1 Pendidikan Papua: Persoalan Klasik yang Lambat Diselesaikan	1
Bab 2 Merawat Papua Sehat, Mencegah Kematian Dini Akibat HIV-AIDS	7
Bab 3 Revisi Otonomi Khusus (OTSUS) 2001, Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Melemahnya Peran Majelis Rakyat Papua (MRP)	17
Bab 4 Aksi Kekerasan dan Konflik Bersenjata: Ancaman Serius Bagi Hak Hidup Masyarakat Sipil	23
Bab 5 Perampasan Tanah Adat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Orang Asli Papua	29
Bab 6 Berpendapat di Papua, Tetap Dibungkam	39
Bab 7 Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia di Tanah Papua ‘Sebatas Opini’	45
Kronik Situasi Hak Asasi Manusia di Papua Tahun 2021	49

Kata Pensantar

Papua dan persoalannya di sepanjang tahun 2021, masih miris dan tidak menentu. Segala peristiwa yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) masih harus diperjuangkan. 'Utang', janji dan persoalan pada tahun-tahun sebelumnya masih tetap terjadi di tahun 2021. Walaupun demikian, bagi 'para pihak' atau mereka yang mengikuti persoalan di Papua, terus berusaha mencari solusinya.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, SKPKC Fransiskan Papua merekam berbagai peristiwa hak asasi manusia sepanjang tahun 2021. Pihak SKPKC Fransiskan Papua mendalami dan menarasikan kembali rekaman peristiwa tersebut dengan mode dan gaya yang sudah biasa dilakukan. Di tahun 2021, SKPKC Fransiskan Papua tidak sendirian menarasikan situasi HAM Papua. Pihak SKPKC Fransiskan Papua sangat berterima kasih kepada Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) Ibu Latifah Anum Siregar, Peneliti dan Penulis Buku di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Mochammad Wahyu Ghani dan Pegiat HAM Papua, Petrus Supardi, yang telah membantu menarasikan Papua dalam Buku Memoria Passionis 2021 ini.

Adapun beberapa bagian yang dinarasikan di dalam buku *Memoria Passionis 2021* ini adalah sebagai berikut. Bab Pertama, menarasikan situasi pendidikan formal di Papua. Mandeknya pendidikan di Papua merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini terus dialami dan dirasakan. Persoalan kekurangan tenaga pengajar, ketidakdisiplinan tenaga pengajar dan situasi sosial politik di Papua sangat mempengaruhi proses pendidikan formal di beberapa daerah di Papua.

Persoalan klasik yang sama adalah kesehatan. Namun pada kesempatan ini, penulis memfokuskan diri pada persoalan HIV AIDS. Banyak generasi muda dan usia produktif di Papua terpapar dengan HIV AIDS. Pola laku hidup yang tidak sehat menjadi salah satu faktor utama menjalarnya HIV AIDS di Papua. Perihal ini akan dinarasikan pada Bab Kedua.

Kisah tentang Otonomi Khusus Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dinarasikan pada Bab Ketiga. Derasnya gelombang penolakan dari masyarakat Papua terhadap keberlanjutan Otsus Papua dan pemekaran DOB tidak menyurutkan ambisi para pengambil kebijakan untuk tetap mendorong dan menetakannya.

Masih dalam masa Otsus Papua, eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata cenderung meningkat di Papua. Aksi baku tembak antara TPN PB dan TNI Polri cenderung meningkat di Papua. Korban yang berjatuh bukan saja dari kedua belah pihak tetapi juga dari warga sipil. Korban nyawa manusia, khususnya warga sipil sudah menjadi tidak berarti. Konflik ini juga berdampak pada warga di daerah konflik harus dan terpaksa keluar dari kampung halamannya demi mencari keamanan dan kedamaian. Narasi ini akan dibahas dalam Bab Keempat tentang Konflik Bersenjata dan Dampaknya.

Pada bab lima, akan menampilkan persoalan perampasan lahan, hutan atau tanah masyarakat adat Papua. Derasnya investasi ke Tanah Papua yang secara 'rakus' menghilangkan banyak sumber makanan dan kehidupan bagi masyarakat adat Papua. Walaupun demikian, masyarakat

adat Papua tidak menyerah. Mereka tetap melawan ketidakadilan terhadap apa yang selama ini melekat dan menghidupinya. Tak jarang masyarakat adat Papua harus berurusan dengan para tangan besi ketika masyarakat mempertahankan sumber kehidupannya, yakni hutan atau tanah tersebut.

Suara masyarakat adat Papua yang menuntut keadilan, kelestarian lingkungannya, selalu saja diperhadapkan dengan tangan besi. Negara menilai bahwa suara-suara ini adalah suara ‘makar’ yang harus dengan cepat dibungkam dan dihilangkan. Tak jarang, banyak masyarakat adat Papua dari berbagai lapisan yang menyuarakan keadilan, keadilan, penentuan nasib sendiri dan penyelesaian pelanggaran HAM, ditangkap dan mendapatkan kekerasan fisik. Persoalan pembungkaman ruang demokrasi ini dinarasikan pada bab enam.

Pada Bab VII, akan menarasikan bagaimana ‘utang’ atau janji dari Negara Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Sudah banyak pihak baik korban, solidaritas korban pelanggaran HAM, maupun lembaga Negara yang mendesaknya, tetapi Negara Indonesia sampai saat ini belum bisa menyelesaikannya. Negara membangun narasi lainnya dengan segala proses pembangunan yang sudah dan akan dilakukan di Tanah Papua.

Papua masih sangat bisa mengatasi persoalannya ketika semua pihak memiliki niat yang baik dan tulus. Berbagai persoalan yang dinarasikan oleh SKPKC Fransiskan Papua dalam Buku Memoria Passionis ini merupakan salah satu bentuk niat baik. Pihak SKPKC Fransiskan Papua mencoba membantu para pembaca atau siapa saja yang mencintai Papua, untuk lebih mendalami beberapa persoalan tersebut dan mencari solusi yang terbaik demi Papua yang lebih adil, damai dan lestari.

Salam & Doa

SKPKC Fransiskan Papua



Suasana sekolah di SD Negeri
Inpres Yosiba, Kampung
Simporo, Kabupaten Jayapura.
Foto: Dokumentasi SKPKC
Fransiskan Papua.

Pendidikan Papua: Persoalan Klasik yang Lambat Diselesaikan

— Oleh Bernard Koten

Kita mungkin selalu mendengarkan kalimat seperti ini, *‘pendidikan adalah barometer kemajuan di sebuah daerah atau Negara’*. Itu berarti pendidikan sangat penting di dalam perkembangan kehidupan manusia di sebuah Negara atau wilayah. Berbagai peraturan atau perundang-undangan, baik itu di tingkat internasional (PBB) sampai ke peraturan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), mengatur tentang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak yang melekat dan dimiliki setiap individu. Di dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, pasal 26 mengatur setiap orang berhak mendapatkan pengajaran¹. Di dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pasal 13 mengatur juga tentang hak

pendidikan tersebut.² Di Negara Indonesia, UUD 1945, pasal 31 ayat 1, UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengatur tentang hak pendidikan tersebut. Bagaimana dengan situasi pendidikan di Tanah Papua ketika diperhadapkan pada berbagai peraturan atau perundangan yang berlaku?

Potret Pendidikan di Tanah Papua

Pendidikan formal – proses belajar mengajar di sekolah – di Tanah (Provinsi Papua dan Papua) adalah persoalan klasik. Persoalan yang hampir selalu setiap tahun ada dan hadir. Persoalan yang hampir selalu setiap tahun dikeluhkan. Dari 34 Provinsi di Indonesia, Provinsi Papua merupakan provinsi pertama dengan angka buta huruf tertinggi, yaitu 22,03%.³ Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kedua dengan angka buta huruf tertinggi dibawah Papua, yaitu 7,52% pertahun 2020. Tingginya angka buta huruf ini disebabkan berbagai faktor penunjangnya. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, telah menyampaikan pada Komisi X DPR RI di tahun 2021 bahwa Papua memiliki banyak masalah pendidikan, seperti kendala kesejahteraan dan jaminan kehidupan bagi guru, minimnya sarana prasarana dan konflik sosial yang berdampak pada siswa.⁴ Persoalan lainnya adalah kasus korupsi di tubuh pemberi layanan pendidikan⁵.

Potret pendidikan Papua di tahun 2021, tidak dapat dilepaspisahkan dengan potret pendidikan Papua di tahun-tahun sebelumnya. Pada dua

2 Bdk. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pasal 13 ayat 1-4.

3 Lihat <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nbwXrGmk-6-provinsi-dengan-angka-buta-aksara-tertinggi-di-indonesia>, <https://www.ceposonline.com/2021/01/08/tahun-ini-dppad-hadapi-berbagai-persoalan-pendidikan/>

4 Bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210323120356-20-620918/setumpuk-kendala-pendidikan-di-papua-yang-dibawa-ke-pusat>

5 Bdk. <https://jubi.co.id/indikasi-korupsi-dana-otsus-di-dinas-pendidikan-papua/>

tahun terakhir (2020-2021), potret pendidikan ini menjadi lebih rumit ketika Covid-19 menyerang dunia dan pemberlakuan system pendidikan K13.

Beberapa persoalan yang sempat direkam oleh SKPKC Fransiskan Papua melalui temuan lapangan, media (jurnal) dan sharing informasi dari para guru dan sahabat SKPKC Fransiskan Papua.

1. Kekurangan guru

Persoalan klasik ini hampir selalu terjadi di daerah-daerah pedalaman Papua. Pada September-Oktober, Tim SKPKC Fransiskan Papua memproduksi film yang berjudul Potret Pendidikan di Tapal Batas, PNG Papua, di Kabupaten Keerom.⁶ Di tingkatan sekolah dasar, khususnya di SD YPPK Amgotro Yuruf dan SD YPPK Ubrub, guru masih sangat kurang. Tuntutan seperti SD lainnya harus memiliki guru bidang studi, harus punya guru/wali kelas di setiap ruangan kelas tidak berlaku di dua SD tersebut. Di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya di SD YPPK St. Fransiskus Assisi Kukding dan SD YPPK St. Agustinus Yapimakot, juga mengalami hal yang sama. Di Distrik Saminage, Kabupaten Yahukimo, SD Inpres Saminage juga mengalami hal yang sama. Di kabupaten tertua Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura, persoalan kekurangan guru masih tetap ada sampai saat ini. Bupati Jayapura, Matius Awoitauw, mengatakan bahwa Kabupaten Jayapura masih mengalami kekurangan sebanyak 514 guru sampai saat ini.⁷

2. Ketidakhadiran Tenaga Guru di Tempat Tugas

Mangkir dan jarang berada di tempat tugas masih tetap dilakukan oleh guru. Murid sekolah dasar di Distrik Saminage, Kabupaten Yahukimo tidak mendapat pendidikan yang layak. Salah satu guru relawan di SD

6 Film ini dapat diakses di <https://youtu.be/CxEtb-IC0sY>

7 Bdk. <https://www.medcom.id/pendidikan/cerita-guru/IKYqG5oK-pemkab-jayapura-sebut-masih-kekurangan-514-guru>

Inpres Saminage, Triari Susanti mengatakan bahwa di tempat tugasnya hanya dirinya yang mengajar. Guru yang lainnya sangat jarang bahkan tidak ada di tempat tugas. Di wilayah selatan Papua, Kabupaten Merauke, ada temuan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Di Distrik Ilwayab, hanya ada dua sekolah yang menjalankan kegiatan belajar mengajar. Duanya lagi: SD Padua dan SD Yuli-Ulim lumpuh aktifitas belajar. Kedua sekolah ini sejak dari Januari hingga saat ini tidak menjalankan aktifitas belajar mengajar karena para guru di sekolah itu tidak ada di tempat.⁸ Menurut Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Protasius Loby, ketidakhadiran guru untuk mengajar di sekolah di Papua mencapai 40% karena berbagai alasan, yaitu: urusan keluarga, gaji, kesejahteraan dan jaminan lainnya.⁹

3. Situasi Sosial Politik Papua

Di beberapa daerah di Provinsi Papua yang rawan konflik seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, proses pendidikan sepertinya mati total. Komnas HAM RI merilis bahwa sekitar 700 anak yang mengungsi dan hidup di tempat pengungsian karena konflik di daerah atau kampungnya.¹⁰ Situasi ini membuat anak-anak tidak mendapatkan hak pendidikan secara layak. Seperti di Kisor, Kabupaten Maybrat (Provinsi Papua Barat), Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Puncak (Provinsi Papua). Penembakan guru, anak sekolah di beberapa wilayah rawan konflik menyebabkan proses formal pendidikan di sekolah tidak

8 Bdk. *Harian Cenderawasih Pos*, 26 April 2021 dan *Koran Jubi*, Edisi 30-31 Mei 2021

9 Bdk. *Koran Jubi* Edisi 24-25 November 2021, <https://jubi.co.id/kadis-ppad-klarifikasi-penundaan-pembayaran-tpp-guru-kepada-dpr-papua/>

10 Bdk. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/20/kondisi-anak-papua-rawan-kekerasan-seksual-dan-konflik-bersenjata>, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/05/06150011/konflik-bersenjata-pendidikan-700-an-anak-pengungsi-nduga-di-papua?page=all>

berjalan¹¹. Selain situasi konflik, persoalan pemalangan gedung sekolah oleh pemilik hak ulayat juga mengganggu proses pendidikan di sekolah seperti yang dialami oleh SMK Negeri 1 Sentani¹².

4. Korupsi Dana oleh Penyelenggara Pendidikan

Korupsi anggaran ini hampir selalu terjadi di beberapa instansi pemerintahan, termasuk juga di Dinas Pendidikan Papua. Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana Otsus di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua. Pada Maret 2021, pihak Kejati Papua menjelaskan bahwa korupsi dana tersebut dilakukan melalui pertama, dalam pengelolaan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah terdapat beberapa kegiatan yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kedua, pencairan dana dilaksanakan dengan menggunakan item kegiatan sebagaimana tersebut dalam DIPA, namun peruntukannya bukan untuk kegiatan dimaksud sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pengalihan penggunaan anggaran yang tidak sesuai prosedur sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadi indikasi dugaan kerugian keuangan negara. Dari temuan Kejati sekitar kurang lebih Rp 4 miliar, dana diindikasikan tidak melalui prosedur ketentuan penggunaan anggaran¹³.

11 Bdk. <https://jubi.co.id/keluar-dari-lokasi-pengungsian-guru-di-beoga-puncak-tewas-ditembak/>, <https://jubi.co.id/guru-di-beoga-puncak-ditembak-karena-kerap-dijumpai-membawa-pistol/>, <https://jubi.co.id/penembakan-terhadap-guru-bisa-hambat-proses-pendidikan-di-pedalaman-papua/>, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/10/penyerangan-guru-berdampak-bagi-layanan-pendidikan-di-papua>, <https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/lokal/pr-1301418274/sekolah-di-nduga-papua-tutup-3-tahun-akibat-konflik-senjata-berkepanjangan>

12 Bdk. Harian Cenderawasih Pos, 02 November 2021

13 Bdk. <https://jubi.co.id/indikasi-korupsi-dana-otsus-di-dinas-pendidikan-papua/>, <https://daerah.sindonews.com/read/358844/174/kejati-selidiki-dugaan-korupsi-pada-dinas-pendidikan-provinsi-papua-senilai-rp4-miliar-1615262589>

5. Honor Guru

Persoalan honor bagi guru yang dikontrak sering terjadi setiap tahunnya. Di tahun 2021 juga mengalami hal yang sama. Di Merauke, guru honorer mempertanyakan upah mereka ke Dinas Pendidikan Merauke. Di Pegunungan Bintang, sudah selama 6 bulan (Agustus-Desember 2021), upah guru yang dikontrak oleh kabupaten belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Di saat sekarang dengan berbagai tuntutan hidup, upah mengajar sangat mempengaruhi semangat para guru yang dikontrak menjalankan tanggung jawabnya.

Lima persoalan yang diuraikan di atas merupakan dari sekian banyak persoalan yang menghambat pendidikan di Tanah Papua. Perlengkapan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah yang tidak layak cukup mempengaruhi proses pendidikan formal. Ketika pemerintah pusat menerapkan system pendidikan K13 yang bekerja melalui jaringan internet, masih banyak menjadi beban bagi sekolah-sekolah di pedalaman Papua.

Pendidikan secara formal di Tanah Papua menjadi tuntutan untuk setiap generasi penerus Papua. Pelayanan secara benar, tepat serta pengawasan dari pemberi layanan (pemerintah) akan sangat membantu berjalannya proses pendidikan di sekolah-sekolah. Penciptaan suasana yang aman, nyaman membantu para guru bertahan di tempat tugasnya. Kesiediaan dan partisipasi warga (penerima layanan) menyumbangkan andil yang sangat besar untuk kemajuan pendidikan di wilayahnya.

Merawat Papua Sehat, Mencegah Kematian Dini Akibat HIV-AIDS

— Oleh Petrus Pit Supardi

*“Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat
delapan puluh tahun,” (Mazmur 90:10a).*

Pengantar

Orang asli Papua (OAP) sedang berada dalam pusaran badai kematian. Kita melihat sekaligus mengalami bahwa kematian terlalu dekat pada hidup OAP. Nubuat Mazmur 90:10a hampir tidak berlaku bagi OAP karena kematian pada usia dini terlampau tinggi. Sejenak kita pun bertanya, “Mengapa kematian pada usia dini terlalu dekat pada OAP?”

Ada bermacam-macam penyebab kematian yang dialami oleh orang asli Papua. Salah satu penyebab kematian itu adalah *Human Immune Deficiency Virus (HIV)* yang merusak sistem kekebalan tubuh dan berakibat pada terjadinya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*. Tubuh tidak mampu melawan berbagai penyakit yang menyerang lantaran sel-sel telah melemah akibat virus HIV. Kemudian, gejala-

gejala akibat penyakit itu muncul kepermukaan, yang dikenal sebagai AIDS. Kini, HIV-AIDS semakin mewabah, menginfeksi dan membunuh puluhan ribu OAP di seluruh tanah Papua.

Kita telah hidup bersama dengan HIV-AIDS di tanah Papua selama 29 tahun, sejak pertama kali ditemukan di Merauke pada tahun 1992. Pada periode waktu ini, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS telah dilakukan oleh pemerintah, agama-agama (Gereja), LSM lokal, nasional dan internasional, tetapi HIV-AIDS tidak pernah lenyap. Saat ini, OAP dan seluruh masyarakat yang hidup di atas tanah Papua sedang terperangkap di dalam labirin HIV-AIDS. Secara khusus, pada tahun 2021 ini, isu HIV-AIDS tenggelam lantaran virus corona (Covid-19) masih menyebar di seluruh tanah Papua.

Apa penyebab tingginya HIV-AIDS di tanah Papua? Mengapa HIV-AIDS tidak bisa hilang, lenyap dari bumi Cenderawasih ini? Bagaimana menerapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS (P2HA) untuk memutus mata rantai kematian OAP akibat HIV-AIDS di tanah Papua?

Jaga Pintu Rumah

Secara umum, virus HIV menular melalui hubungan seksual tidak aman, berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom, melalui jarum suntik dan transfusi darah. Secara khusus di tanah Papua, penularan HIV terjadi melalui hubungan seksual tidak aman. Artinya, HIV tidak masuk dengan sendirinya, melainkan melalui persetujuan dari orang bersangkutan, sadar, tahu dan mau. Karena itu, ketika berbicara tentang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS (P2HA), kita perlu terlebih dahulu melihat ke dalam diri sendiri, keluarga, adat dan budaya.

Apa pun yang terjadi pada hidup manusia bermula di dalam dan dari dalam. Bahwa ada pengaruh dari luar, lingkungan sekitar, tetapi kalau diri sendiri sudah mapan, siap sedia, maka akan dapat menghadapi segala tantangan yang berasal dari luar diri. Karena itu, dalam konteks

pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS (P2HA), upaya menjaga diri sendiri, keluarga, marga, suku adalah yang pertama dan utama.

Saat ini, filosofi *“Jaga Pintu Rumah: kalau keluar orang rumah tahu dia ke mana, kalau masuk, orang rumah tahu dia dari mana,”* sangat mendesak untuk digaungkan ke seluruh pelosok tanah Papua. Mengingat saat ini HIV-AIDS tidak sekedar berada di luar pagar rumah, melainkan sudah masuk ke dalam kamar-kamar rumah kita. Kemajuan teknologi informasi, dengan membanjirnya *handphone* android dan media sosial yang menyajikan konten-konten negatif (pornografi), semakin mendekatkan HIV-AIDS kepada keluarga-keluarga kita.

Siapa harus berdiri di muka pintu rumah? Orang tua, Bapa dan Mama adalah pemelihara hidup. Anak-anak bertumbuh di dalam keluarga-keluarga. Di dalam keluarga-keluarga itulah nilai-nilai hidup baik ditanamkan dan dirawat agar tumbuh sehat dan berbuah lebat. Kunci pintu rumah ada pada orang tua. Anak-anak ke luar dan masuk rumah melalui pintu dan orang tua mengetahui dengan pasti ke mana mereka pergi, untuk apa, dengan siapa, kapan pulang, dan seterusnya.

Apakah selama ini, orang tua sudah berdiri di muka pintu? Berdasarkan data Sistem Informasi HIV-AIDS (SIHA) Dinas Kesehatan Provinsi Papua 30 September 2021, kelompok usia 15-19 tahun ada 5.459 orang, kelompok usia 20-24 ada 11.101 orang. Kedua kelompok usia ini menjadi patokan melihat dan membaca bagaimana peran keluarga-keluarga dalam menjaga “pintu rumah!” Anak-anak bertumbuh di dalam keluarga-keluarga, ketika beranjak remaja dan dewasa, mereka terinfeksi HIV-AIDS. Berdasarkan data ini, kita bertanya, “Apakah orang tua sudah menjalankan perannya dalam menanamkan nilai-nilai hidup baik, nilai-nilai adat dan keagamaan bagi anak-anak?”

Di sisi lain, pada data itu, kita juga menyimak bahwa di kalangan usia orang dewasa dan orang tua berusia 25-49 sebanyak 27.047 orang dan usia di atas 50 tahun 1.633 orang. Orang tua yang semestinya berdiri menjaga “pintu rumah” justru terinfeksi HIV-AIDS. Orang tua sendiri

telah membawa virus mematikan ini ke dalam rumah. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan telah menyebabkan HIV-AIDS di tanah Papua tidak pernah surut.

Selain itu, kita juga membaca data dan informasi bahwa banyak perempuan terinfeksi HIV-AIDS. Pada data SIHA 30 September 2021 itu, tertera angka perempuan penderita HIV-AIDS sebanyak 24.046 orang. Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari Sekretaris KPA Kabupaten Merauke, Damario Sriyono yang mengatakan bahwa angka kasus penderita HIV/AIDS dominan dialami ibu rumah tangga dengan jumlah 21,1 persen.¹⁴

Perempuan selaku pemelihara kehidupan: mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak-anak Papua telah terinfeksi HIV-AIDS, lalu kepada siapa OAP akan meletakkan harapan akan generasi masa depan Papua yang sehat dan umur panjang?

Kita melihat bahwa pintu rumah OAP sedang terbuka lebar. HIV-AIDS keluar dan masuk sesuka hati. Para penjaga pintu rumah, orang tua telah terinfeksi HIV-AIDS. Anak-anak remaja dan orang dewasa terinfeksi HIV-AIDS. Kepada siapa OAP berharap agar bisa selamat dari penyakit mematikan ini?

Orang tua dan keluarga-keluarga OAP tidak sendirian. Setiap pribadi OAP berada dalam marga-marga dan suku-suku. Pada titik ini nilai-nilai adat, budaya dan peran tetua adat sangat penting. Tetua adat perlu memelihara warga sukunya agar menaati nilai adat, budaya dan tidak melakukan seks bebas yang berujung pada terinfeksi HIV-AIDS.¹⁵

Sebab, sesungguhnya penyebab HIV-AIDS di tanah Papua umumnya terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, dengan berganti-ganti pasangan seksual. Perilaku seksual yang tidak aman

14 Bdk. Dr. I.B. Mantra, MPH. *AIDS dan Wanita, Suatu Tantangan Kemanusiaan*. Departemen Kesehatan R.I, 1994, halaman 10-18.

15 Bdk. Alexander Furay, S.TP, *Masyarakat Papua dan Epidemi HIV-AIDS*. UM Press. 2001, halaman 32-34.

ini telah melanggengkan HIV-AIDS masuk ke dalam tubuh dan secara perlahan membunuh tubuh-tubuh kekar di tanah ini. Karena itu, tetua adat perlu mengambil peran lebih luas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS (P2HA) berbasis masing-masing marga dan suku.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk P2HA

Mengapa setelah 29 tahun (1992-2021) HIV-AIDS tidak berhenti menginfeksi OAP? Faktor internal memperlihatkan perilaku seksual tidak aman, seks bebas, seks tanpa kondom masih jamak dipraktikkan. Kita melihat tidak sedikit orang mengonsumsi minuman keras, kemudian melakukan seks bebas.

Faktor eksternal, kolaborasi antar lembaga, pemerintah, LSM, lembaga agama, aktivis HIV-AIDS tampak redup. Apa lagi, tahun 2021, Covid-19 masih menghantui tanah Papua, advokasi HIV-AIDS tenggelam ke dasar laut. Kita menyaksikan tidak banyak lembaga dan pribadi-pribadi yang mau peduli dengan isu HIV-AIDS.

Terhadap minimnya perhatian terhadap HIV-AIDS, Direktris Yayasan Harapan Ibu Papua, Vanda Kirihi bilang, “Kami yang menangani HIV/AIDS, merasa dilupakan. Perhatian pemerintah semua ditujukan kepada Covid. Kita tahu perhatian pemerintah ke sana lebih banyak, kemudian diikuti pendanaan yang banyak dengan fasilitas disediakan.” Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada minimnya perhatian terhadap isu HIV-AIDS di tanah Papua.

Belajar pada pengalaman perjalanan advokasi HIV-AIDS selama 29 tahun, yang mengalami kegagalan dalam menurunkan angka HIV-AIDS di tanah Papua, seyogianya para pihak membangun kolaborasi yang lebih erat dan intensif. Pemerintah daerah kabupaten dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Dinas Kesehatan. Pemerintah Provinsi Papua, dengan KPA Provinsi, Dinas Kesehatan. Lembaga non-pemerintah, LSM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh

perempuan. Semua pihak ini perlu memikirkan bersama strategi baru dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tanah Papua. Melalui kolaborasi lintas sektor, kita berharap upaya P2HA dapat berjalan efektif sehingga dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat HIV-AIDS.¹⁶

Ketua KPA Provinsi Papua, Dokter Anton Mote pada perayaan Hari AIDS se-dunia, 1 Desember 2021 menegaskan bahwa perayaan hari AIDS se-dunia ini mengingatkan semua elemen warga Papua bahwa penyakit menular ini masih ada sehingga diperlukan kebersamaan untuk mencegahnya! Upaya P2HA tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan harus melibatkan semua elemen masyarakat. Semua pihak harus mengambil bagian dalam menyadarkan warga, anggota komunitasnya agar berperilaku hidup sehat, tidak melakukan seks bebas sehingga dapat terhindar dari HIV-AIDS.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk P2HA

Siapa paling bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tanah Papua? Pemerintah Provinsi Papua memiliki tanggung jawab utama untuk menggerakkan sekaligus mengalokasi anggaran yang memadai bagi setiap organisasi perangkat daerah dan lembaga mitra pemerintah yang terkait dengan HIV-AIDS sehingga proses advokasi HIV-AIDS dapat berjalan efektif dan efisien yang berdampak pada turunnya angka kasus HIV-AIDS di tanah Papua.

Pemerintah Provinsi Papua telah memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS yang ditetapkan pada 28 Desember 2010. KPA Provinsi Papua juga sudah aktif beroperasi, tetapi upaya advokasi tidak berdampak pada turunnya angka HIV-AIDS karena minim kolaborasi dengan para pihak terkait. Upaya P2HA hanya sekedar program dan atau pelaksanaan proyek APBD, tidak berbasis

16 Bdk. *Ibid*, halaman 54-57.

pada analisis kebutuhan akan pentingnya penyuluhan, pemeriksaan, pengobatan, pendampingan dan pemberdayaan. Karena itu, perlu ada evaluasi di tingkat pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota terkait tata kelola pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tanah Papua selama ini.

Kasus HIV-AIDS di tanah Papua bukanlah hal biasa. Puluhan ribu orang telah terinfeksi HIV-AIDS dan mati pada usia muda. Para penyintas yang masih hidup saat ini pun masih mengalami diskriminasi, kurang mendapatkan dukungan untuk hidup, pelayanan kesehatan dan akses ke pekerjaan. Mereka semua adalah anak-anak orang asli Papua. Mereka generasi masa depan Papua. Karena itu, pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk melindungi hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pekerjaan yang layak.¹⁷

Sepanjang tahun 2021 dan juga tahun-tahun sebelumnya, permasalahan HIV-AIDS kurang mendapatkan tempat di hati para Pejabat dan Pemimpin Papua, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Di dalam senyap, tanpa suara, HIV-AIDS terus merangkak masuk ke dalam tubuh generasi Papua. Sebelum HIV-AIDS benar-benar memusnahkan OAP, maka pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota perlu bertindak cepat untuk menghentikan laju perkembangan HIV-AIDS ini. Apabila pemerintah acuh-tak acuh, maka badai kematian akibat HIV-AIDS akan terus berkecamuk dan menenggelamkan banyak generasi Papua ke dasar samudra.

Saat ini, komitmen pemerintah daerah Provinsi Papua, melalui Gubernur dan kabupaten/kota, melalui Bupati/Walikota di tanah Papua perlu diwujudkan dalam beberapa hal yaitu, *pertama* mengaktifkan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Daerah (KPAD) di setiap kabupaten/kota di seluruh tanah Papua. KPA Provinsi Papua perlu melakukan

17 Bdk. Leslie Butt, Ph.D. *Stigma HIV-AIDS di Wilayah Pegunungan Papua*. Pusat Studi Kependudukan Uncen, 2010, halaman 13-21.

asistensi, pendampingan terhadap KPAD di semua kabupaten/kota. *Kedua*, Gubernur di tingkat Provinsi Papua dan Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran untuk upaya P2HA. *Ketiga*, Gubernur Provinsi Papua dan Bupati/Walikota perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, terutama pemimpin Gereja di tanah Papua, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda guna mencari solusi mengatasi HIV-AIDS yang semakin mewabah di tanah Papua ini.

Penutup

Kita semua merindukan Papua sehat tanpa HIV-AIDS. Kenyataan menunjukkan sebaliknya. HIV-AIDS sedang tumbuh subur di tanah Papua. Perilaku seks bebas dengan berganti-ganti pasangan seksual memuluskan HIV-AIDS masuk ke dalam tubuh. Seketika tubuh gagah perkasa lunglai dan terkapar tak berdaya. Maut datang lebih cepat dari usia seharusnya.

Pintu rumah kita sedang rusak. Penjaga pintu rumah pun tak luput dari virus mematikan ini. Mama-Mama yang melahirkan generasi Papua pun tak sedikit yang terinfeksi HIV-AIDS. Generasi muda Papua pun berguguran lantaran terinfeksi HIV-AIDS.

Apakah generasi OAP akan punah? Harapan besar ada pada nilai-nilai adat, budaya, tetua adat! OAP perlu kembali ke dalam “dapur hidupnya!” Hidup tertib dan disiplin melaksanakan nilai-nilai adat: jujur, setia dan “tidak salah jalan.”

Para pihak, pemerintah, pimpinan agama-agama, terutama tokoh-tokoh Gereja, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan perlu menyatukan persepsi dan komitmen dalam upaya P2HA di tanah Papua. Setiap lembaga dan komunitas perlu bergerak ke dalam menjaga anggota komunitasnya dan keluar menyampaikan informasi yang benar dan tepat tentang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tanah Papua.

Pada akhirnya, pemerintah daerah Provinsi Papua dan kabupaten/

kota perlu menyatakan komitmen untuk menghidupkan KPAD dan mengalokasikan anggaran P2HA di APBD. Apabila pemerintah tidak serius menanggapi situasi epidemi HIV-AIDS di tanah Papua, maka ke depan kita akan menuai badai kematian mengerikan di tanah Papua akibat HIV-AIDS.

Di tengah kegelisahan akan tingginya kasus HIV-AIDS, kita tetap berharap adanya perubahan perilaku hidup. Kita perlu berubah dari cara hidup lama, melakukan seks bebas kepada cara hidup baru, setia pada pasangan hidup, dan tidak melakukan seks bebas sebelum menikah. Kita perlu memulainya dari dalam diri kita sendiri sambil mengajak orang-orang di sekitar kita agar hidup tertib. HIV-AIDS tidak lagi menembus pintu rumah dan membunuh hidup dan masa depan kita. Dengan demikian, kita mengalami umur panjang dan lanjut usia di atas tanah terberkati ini seperti pesan Mazmur, tujuh puluh tahun dan kalau kuat delapan puluh tahun. Amin.



Aksi demonstrasi menolak
Otonomi Khusus Papua
dan Daerah Otonomi Baru
2021 di Kota Jayapura.
Foto: Tedi Peki



Bab 3

Revisi Otonomi Khusus (OTSUS) 2001, Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Melemahnya Peran Majelis Rakyat Papua (MRP)

— Oleh Alexandro Rangga, OFM

Pengantar

Polemik Revisi Otonomi Khusus (Otsus) 2001, pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu isu hangat sepanjang tahun 2021. Polemik ini makin menegaskan arogansi kebijakan pemerintah pusat di Papua di satu sisi dan di sisi lain semakin melemahnya taji Majelis Rakyat Papua sebagai Lembaga representatif Orang Asli Papua (OAP). Dengan demikian polemik ini tidak hanya secara sederhana memunculkan pihak-pihak yang menyetujui atau menolak tetapi juga mempertegas makin banyaknya solusi yang dibuat semata untuk *kepentingan strategis nasional dalam rangka memperkuat NKRI* atau sekedar *memelihara citra positif Indonesia di mata Internasional*, seperti dikatakan oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Suara Orang Asli Papua Tidak Didengarkan

Penting untuk ditegaskan bahwa ada relasi yang erat antara Revisi UU Otsus 2001 dan pembentukan Daerah Otonomi Baru di satu sisi serta terbaikannya suara Orang Asli Papua (OAP) atau secara representative, terbaikannya peran Majelis Rakyat Papua. Sesungguhnya pembentukan Daerah Otonomi Baru akan sulit terlaksana tanpa adanya Revisi UU Otsus 2001 khususnya pasal 76. Sulit karena MRP dan DPRP telah menolak dengan tegas baik revisi UU Otsus 2001 maupun rencana pemekaran DOB. Penolakan MRP dan DPRP berlaku normatif karena sesuai dengan Pasal 76 UU Otsus 2001 yang menyebutkan, *Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang*. Akan tetapi dengan adanya UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, maka suara MRP dan DPRP tidak lagi menjadi referensi tunggal. Pasal 76 UU No 2 memudahkan proses pembentukan DOB. Pasal 76 UU No 2 berbunyi:

- (1) *Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.*
- (2) *Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.*

- (3) *Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.*
- (4) *Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.*
- (5) *Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang*

Terbaikannya suara OAP atau MRP sebagai Lembaga representative dapat ditelusuri lewat prosedur penetapan UU Otsus jilid II dan DOB. Maka sikap kritis yang muncul ialah mengapa Revisi UU Otsus Papua hanya fokus pada dua pasal, yakni Pasal 34 tentang dana penerimaan khusus dan Pasal 76 tentang pemekaran. Pasal 34 meningkatkan dana Otsus Papua dari 2% menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Apakah konsep pembangunan pemerintah Indonesia di Papua masih terbatas pada soal uang? Pasal 76 tentang pemerakaran, apakah semata demi memudahkan pemekaran itu sendiri?

Sebagaimana diberitakan oleh Jubi, edisi 21-22 Juli, Prof. Adriana Elisabeth, selaku Koordinator Jaringan Damai Papua, mengatakan bahwa ada 4 hal kunci tentang implementasi UU Otsus di Papua. Pertama, pemerintah perlu menjelaskan secara baik mengapa ada penambahan pasal, perubahan pasal, dan penghapusan pasal. Kedua, pemerintah perlu melibatkan orang Papua dalam proses revisi UU Otsus tersebut. Ketiga, pemerintah perlu melakukan evaluasi atas pendampingan Otsus yang sudah berjalan. Keempat, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi. Catatan kunci yang disebutkan oleh Adriana rupa-rupanya tidak satupun diperhatikan oleh pemerintah baik dalam revisi UU Otsus maupun rencana Pemekaran Daerah Otonomi

baru. Selain itu, Usman Hamid dari Amnesty Internasional menilai Revisi UU Otsus Papua sebagai usaha untuk memusatkan kekuasaan di tangan pemerintahan pusat yang artinya menghilangkan esensi Otsus sebagai desentralisasi atau penyebaran kekuasaan.

Penolakan tidak hanya datang dari MRP. Hampir semua elemen masyarakat Papua baik yang ada di Papua (Barat) maupun yang berada di luar Papua (Barat), baik itu mahasiswa, masyarakat adat maupun anggota dewan pun menolak. Terkecuali Wilayah adat Anim Ha yang menyambut positif usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Selatan. Akan tetapi hal terpenting bukanlah penolakan itu sendiri tetapi alasan yang melatarbelakangi penolakan tersebut.

Alasan penolakan beragam. Kami mencatat ada tiga hal mendasar penolakan. Pertama, Papua telah dibagi menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat, akan tetapi selama 20 tahun Otsus, kedua provinsi ini masih merupakan provinsi termiskin di Papua. Kedua, Revisi Otsus hanya bertujuan untuk memperkuat kepentingan politik strategis pemerintah Indonesia di Papua dengan Sumber Daya Alam sebagai sasaran dan bukan Sumber Daya Manusia Papua. Ketiga, Revisi Otsus dan Pemekaran DOB tidak serta merta menyelesaikan persoalan di Papua selama pemerintah Indonesia bersikeras bahwa Otsus atau kebijakan pembangunan adalah solusi bagi Papua sementara OAP tetap meminta pelurusan sejarah dan referendum.

Penutup

Sekeras apapun reaksi penolakan OAP, UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua telah disetujui oleh DPR RI pada tanggal 15 Juli 2021. Ironisnya, dengan mengabaikan suara OAP, dalam keterangannya pada 15 Juli 2021 itu, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI mengatakan, “RUU ini merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di tanah Papua.” Karena telah ditetapkan, kini tugas kita ialah mengawal

agar amanat UU No 2 Otsus Papua untuk *mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua* maupun jaminan untuk *memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya* sungguh-sungguh terlaksana.



Aksi demonstrasi menolak Otonomi Khusus Papua dan Daerah Otonomi Baru 2021 di Kota Jayapura.
Foto: Tedi Pekei

ASPIRASI PENOLAKAN DOB & OTSUS JILID II PAPUA TAHUN 2021



12 Januari

Demo tolak Otsus Jilid II
oleh Mahasiswa Uinien Jayapura
di depan Auditorium Uinien Abepera, Papua

22 Februari

Demo tolak DOB dan Perpanjangan Otsus
di Dogiyai

23 Februari

Demo tolak DOB & Otsus Jilid II
oleh IPMAPA Semarang Raya

01 Maret

Demo tolak DOB & Otsus
oleh rakyat Meepago di Dogiyai

21 Maret

Demo tolak DOB di Kota Sorong
oleh Organisasi Kemahasiswaan,
Kaum Perempuan dan Masyarakat Papua

24 Maret

BEM Mahasiswa Uinien menyerahkan
pernyataan tolak DOB kepada MKP

07 April

Demo tolak DOB & Perpanjangan Otsus
di Yahukimo

Demo tolak DOB & Perpanjangan Otsus
di Kota Semarang
oleh Aliansi Mahasiswa Papua

14 Juli

Demo tolak Otsus Jilid II
oleh mahasiswa Uinien

Demo tolak DOB & Otsus Jilid II
di Jakarta oleh mahasiswa Papua

15 Juli

Demo tolak DOB & Otsus Jilid II
di Manokwari oleh Solidaritas
Mahasiswa dan Rakyat Papua Tolak Otsus

Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua
di Semarang menggelar konferensi pers
menolak pengesahan RUU tentang
Perubahan kedua UU nomor 21 tentang
otonomi khusus Papua menjadi undang-undang

TOLAK DOB
&
OTSUS Jilid II

Aksi Kekerasan dan Konflik Bersenjata: Ancaman Serius Bagi Hak Hidup Masyarakat Sipil

— Oleh Latifah Anum Siregar

Intensitas aksi kekerasan dan konflik bersenjata di tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya dan meluas ke banyak tempat di tanah Papua seperti di wilayah Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Mappi, Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Bintuni dan Maybrat bahkan misalnya dalam 2 tahun terakhir (tahun 2020-2021) kasus terbanyak masih terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak. Peristiwa ini saling balas membalas antara TNI/PILRI dengan TPNPB hingga berimplikasi pada meluasnya target, dimana masyarakat sipil menjadi target. Masyarakat sipil yang menjadi target adalah ‘mereka’ yang dituduh sebagai mata-mata TNI/POLRI ataupun sebaliknya, sebagai mata-mata TPNPB. Bahkan peristiwa ini menyisir bagi pribadi yang mengabdikan dirinya di tempat-tempat terpencil sebagai para pendidik (guru) dan petugas medis (kesehatan).

Meluasnya korban dari masyarakat sipil dikarenakan ruang gerak dan ruang perang antara Para Pihak (TNI/POLRI dan TPNPB) cenderung dilakukan di ruang publik, tempat masyarakat sipil menetap dan beraktifitas sehari-hari. Padahal di tempat-tempat terpencil dan pada situasi tanpa perang sekalipun, mereka (masyarakat sipil) adalah bagian dari kelompok yang tidak berdaya karena keterbatasan akses dan fasilitas untuk pemenuhan hak-hak dasar. Selain itu aksi meluas ke fasilitas dan sarana publik seperti sekolah dan Puskesmas dengan berbagai argumentasi, misalnya karena salah satu pihak diduga menggunakan fasilitas tersebut. Atau juga aksi merambat ke rumah-rumah warga (honai) karena dianggap menyembunyikan atau berafiliasi dengan kelompok tertentu.

Selain itu ada klaim dan saling tuduh misalnya TNI/POLRI menuduh masyarakat yang ditembak adalah bagian dari TPNPB, di sisi lain TPNPB mengatakan korban tersebut bagian dari masyarakat sipil. Sulit sekali ditemukan klarifikasi terbuka dari pihak lain terkait duduk peristiwa yang sesungguhnya, karena alasan ancaman keamanan. Karenanya kronologis terhadap satu peristiwa terkadang tidak tunggal dan masyarakat sipil terjebak dalam informasi yang beragam dan terbatas.

Sebagai wilayah konflik maka penempatan pasukan non organik TNI dan POLRI bertambah secara signifikan sejak 5 tahun terakhir. Misalnya pada laporan tahunan ALDP tahun 2019 menunjukkan sepanjang tahun 2019 setidaknya ada 6.000 sampai dengan 6.300 aparat keamanan khususnya saat merespon aksi anti rasisme di Papua. Pada tahun 2020-2021 terkait persiapan dan penyelenggaraan PON XX ada lebih dari 21.000 aparat keamanan gabungan TNI dan POLRI ke Tanah Papua. Di tahun ini (2022) hingga semester pertama bulan Juni diperkirakan lebih dari 3.000 aparat non organik telah didatangkan ke Papua. Aparat keamanan ini difokuskan pada wilayah terpencil. Hal ini cukup asing dan mengkhawatirkan karena perbedaan budaya dan minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang konteks Papua. Potret ini akan memperburuk relasi antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat. Meski ada

perubahan kebijakan keamanan dari Operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz di penghujung tahun 2021, namun tidak mengubah cara negara mendekati rakyatnya di Tanah Papua.

Di waktu yang bersamaan, TPNPB mengalami peningkatan jumlah kelompok secara signifikan dengan sistem komando yang menyebar di beberapa tempat. TPNPB dalam berbagai pemberitaan sering disebut dengan istilah KKB dan KKSB, istilah ini pun berubah-ubah tergantung media massa dan narasumber berita. Pasca penembakan terhadap Kabinda Papua tanggal 25 April 2021 Menkopolhukam menetapkan KKB (TPNPB) sebagai kelompok teroris pada 29 April 2021. *Labeling* ini juga tidak mampu mengakhiri konflik bersenjata antara TNI/POLRI dengan TPNPB.

Di saat yang sama, peran pemerintah sipil di berbagai tingkatan nyaris beku khususnya di daerah konflik bersenjata. Ketika Majelis Rakyat Papua (MRP) berusaha untuk mengambil peran lebih aktif justru berada di situasi dilematis dan penuh tantangan. Akibatnya aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan normal. Meski wilayah-wilayah tersebut masih berstatus tertib sipil namun 'suasana militer dan *insecure*' terasa dimana-mana.

Masyarakat sipil terutama Orang Asli Papua (OAP) kehilangan hak-hak dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, tanah dan sumber daya alamnya. Hak hidup mereka terancam hingga terpaksa meninggalkan kampung, kebun dan ternak mereka untuk mencari perlindungan dengan cara mereka sendiri. Mereka mengungsi karena tidak ada yang dapat dipercaya untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Pada situasi ini tidak ada upaya yang serius terutama dari pemerintah yang memiliki tanggungjawab utama atas pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Lebih parah lagi, ketika wilayah tersebut semisal Nduga, Intan Jaya dan Puncak sejak awal memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat rendah dibanding wilayah lainnya di Papua akan menjadi

jauh lebih buruk. Akses transportasi dan komunikasi menjadi hambatan utama, keterbatasan sarana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan, ditambah dengan aksi kekerasan dan konflik menjadi lengkaphl penderitaan masyarakat sipil dalam pemenuhan hak-hak atas pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Kegagalan pemerintah untuk menghentikan kekerasan dan konflik adalah ketika pendekatan keamanan menjadi satu-satunya pilihan untuk mengatasi konflik di Papua meskipun pemerintah selalu juga bilang bahwa masalah Papua adalah ‘masalah kesejahteraan’. Selain itu di saat yang sama para elit pemerintahan lainnya di berbagai tingkatan (kabupaten, provinsi dan pusat) bersikap pasif bahkan mengabaikan kapasitas atau sumber daya lainnya yang dimiliki serta lemahnya konsolidasi diantara masyarakat sipil dan masih adanya perpektif yang berbeda terkait HAM. Apalagi jika korban masyarakat sipil dari satu aksi kekerasan atau konflik bersenjata seolah dianggap dapat dibarter dengan korban dari aksi kekerasan atau konflik bersenjata lainnya.

Berkaca pada uraian di atas, maka ada beberapa tawaran solusi yang mungkin bisa dilakukan demi terciptanya Tanah Papua yang adil dan damai;

1. Pihak yang menggunakan kekuatan bersenjata yakni TNI/POLRI dan TPNPB menghentikan aksi kekerasan dan konflik bersenjata. Situasi ini telah mengorbankan masyarakat sipil dimanapun berada dengan berbagai latar belakang terutama OAP dan non OAP.
2. Aparat keamanan dan aparat penegak hukum yang melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap yang diduga sebagai pelaku, mengedepankan sikap yang professional agar tidak menyebabkan masyarakat sipil makin terdesak, distigma atau menjadi korban berikutnya.
3. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil termasuk kepada tokoh agama, para guru dan tenaga medis yang menjadi ujung tombak dari pelayanan hak-hak dasar masyarakat

di daerah-daerah terpencil. Sejalan dengan itu, pemerintahan sipil di provinsi terutama di kabupaten hadir, menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mengambil inisiatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat guna pemenuhan hak korban termasuk penanganan terhadap pengungsi sesuai kebutuhannya.

4. Pemerintah menghentikan kebijakan yang diskriminatif, sentralisasi dan represi dengan membuka ruang dialog yang inklusif dan setara untuk menyelesaikan akar masalah di Papua.
5. Konsolidasi masyarakat sipil yang diprakarsai oleh tokoh agama dan tokoh adat untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang terverifikasi. Menciptakan inisiatif dan ruang-ruang komunikasi serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat masyarakat sipil dan bebas dari aksi kekerasan dan konflik bersenjata.

Warga Intan Jaya mengungsi di Pastoran Paroki Bilogai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, karena terjadi konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI/Polri.

Foto: Dokumentasi Paroki Bilogai.



Konflik Bersenjata TPNPB VS Militer/Polri 2021



Perampasan Tanah Adat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Orang Asli Papua

— Oleh M. Wahyu Ghani - BRIN

Land grabbing, atau perampasan tanah adat di Papua merupakan proyek terstruktur yang sudah dilakukan aktor kapital dari berbagai elite, seperti elite nasional dan elite global yang terlegalkan oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah pusat. Menurut Cochrane (2016), *Land grabbing* merupakan bentuk penjualan atau sewa-menyewa tanah yang digunakan secara tetap, musiman atau siklus oleh orang-orang yang tidak setuju untuk mengalihkan tanah itu, yang tanahnya diambil dengan cara-cara yang tidak sah, dengan atau tanpa paksaan. Dalam kasus tanah Papua, *land grabbing* termanifestasikan dalam bentuk deforestasi hutan yang masif dan pengalihan fungsi lahan yang berbuntut hilangnya sumber pangan dan sumber kehidupan masyarakat adat Papua. Selama dua dekade terakhir, tutupan hutan alam di Papua telah berkurang 663.443 hektar, 29% di antaranya terjadi pada

2001-2010 dan 71% pada 2011-2019. Ini rata-rata 34.918 hektar deforestasi per tahun, dengan tingkat tertinggi terjadi pada tahun 2015 ketika 89.881 hektar hutan alam hilang di Papua (Koalisi Indonesia Memantau, 2021).

Dalam perjalanannya *land grabbing* yang terstruktur ini dapat kita telusuri dalam berbagai kasus pelanggaran, utamanya pengalih fungsian hutan adat yang terjadi di tanah papua. ¹⁸Suku Moi adalah suku yang terugikan dengan tanah ulayatnya menjadi konsesi empat perusahaan, yakni PT Sorong Agro Sawitindo, PT. Inti Kebun Lestari, PT Papua Lestari Abadi, dan PT Papua Cipta Plantation di Distrik Salawati, Segun, Klawak dan Klamono, Kabupaten Sorong. Padahal banyak masyarakat suku Moi yang mengaku tidak menandatangani dokumen persetujuan penyerahan tanah adat kepada perusahaan. Namun, izin telah keluar dan sering kali mereka harus tergusur dari tanahnya sendiri. ¹⁹Selain itu, gulung tikarnya PT Perkebunan Nusantara II (PTPTN II) Kabupaten Keerom, malah mejadi persoalan baru dengan rencana pembukaan lahan jagung 1000 Ha. Padahal Sebagai pemilik hak tanah ulayat, masyarakat Keerom seharusnya memiliki hak untuk mengolah tanah bekas lahan sawit PTPN II dan bukan malah dialih fungsikan kembali tanpa persetujuan masyarakat adatnya.

Proses pencabutan hak secara ilegal dan pengusiran orang dari tanah dan mata pencaharian mereka, dapat didefinisikan sebagai perampasan tanah dalam skala besar sehingga menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia (Cochrane, 2016; Ginting & espinosa, 2016; Asy'ari, 2022). Pelanggaran HAM seperti ini bukanlah kejadian yang langka di tanah papua. Ada upaya terstruktur yang sengaja diciptakan untuk melanggengkan praktik konflik berkepanjangan di Papua dengan

18 Laia, Kenial. 30 Agustus 2021. *Masyarakat Adat Moi Minta Tanah Bekas Konsesi Sawit Dikembalikan*. Betahita.id. <https://betahita.id/news/lipsus/6492/masyarakat-adat-moi-minta-tanah-bekas-konsesi-sawit-dikembalikan.html?v=1630951222>.

19 Rep: Syahrul. 04 April 2022. *3.000 Ha Lahan Sawit di Keerom Papua Terancam Jadi Kebun Jagung*. Ramadana, sahril (ed). Elais.co. <https://www.elais.co/berita/baca/3000-ha-lahan-sawit-di-keerom-papua-terancam-jadi-kebun-jagung>.

tujuan merampas tanah adat demi mengeruk keuntungan ekonomi. Papua merupakan wilayah militer, tempat konflik jangka panjang antara Indonesia (pemerintah) dan Orang Asli Papua (OAP) yang mencari penentuan nasib sendiri dengan upaya terstruktur dengan menggunakan kekerasan untuk meneror penduduk asli, dan memaksa masyarakat untuk meninggalkan tanah mereka atau pemaksaan pengalih fungsian lahan yang dirahasiakan perusahaan (Dewi, 2016; Csevar & Tremblay, 2019).

Alih Fungsi Lahan Sawit sebagai Upaya Terstruktur Perampasan Tanah Adat

Dunia mengalami ketidak pastian ekonomi yang diakibatkan system ekonomi kapitalis yang dikuasai pemodal besar elite global. Hal ini menyebabkan volasitas harga di pasar global, krisis pangan global, dan tingginya tingkat aktivitas spekulasi. Secara sederhana praktek ini sangat terkait dengan tiga hal yaitu meningkatnya ketidakamanan pangan negara-negara yang kemudian mencari cara-cara mengamankan pasokan pangan negaranya, melonjaknya permintaan terhadap agrofuel dan bentuk-bentuk energi lainnya (yang dianggap alternatif dan ramah lingkungan), dan investasi yang meningkat tajam baik dalam pasar tanah maun komoditas-komoditas lainnya yang terkait dengan tanah (Daniel & Mittal, 2009: 2; dalam Tohari, 2018; Ginting & Espinosa, 2016).

Krisis pangan dan bahan bakar pada akhir tahun 2000-an mengakibatkan putaran akuisisi lahan untuk bahan bakar nabati dan produksi pangan meningkat dengan fokus khusus pada ketahanan pangan seperti gandum, beras, jagung, dengan rencana untuk melanjutkan perluasan produksi kelapa sawit yang berbasis bahan bakar nabati (Tohari, 2018; Asy'Ari, 2022). Indonesia kemudian tampil di muka dunia dengan target ambisius sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional. Total 51 juta ton minyak sawit mentah akan dibutuhkan

Indonesia untuk penggunaan domestic dan ekspor ke luar negeri pada tahun 2025, dengan catatan perluasan lahan baru hingga 6 juta hektar dengan hasil saat ini (Khatiwada dkk, 2021). Tidak mengherankan apabila pemerintah Indonesia kemudian memfokuskan Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit/CPO (Clued Palm Oli) sebagai salah satu program RPJMN 2020-2024 dengan target 23% penggunaan dari total penggunaan energi nasional.

Target resmi pemerintah tersebut kemudian tergambarkan melalui deforestasi hutan di Papua guna mendukung perluasan perkebunan sawit. Koalisi Indonesia Memantau (2021) mencatat tujuh puluh dua surat keputusan pelepasan kawasan hutan (SK PKH) seluas 1.549.205 hektar di Papua dikeluarkan oleh menteri kehutanan selama tahun 1992 – 2019. Sektor pertanian adalah penerima utama pelepasan, seluas 1.461.577 hektar, dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit menjadi alasan utama dengan total luas 1.307.780 hektar, atau 84% dari seluruh kawasan hutan yang dilepas di Papua.

***Memoria Passionis* Praktik Kekerasan**

Pelepasan Hutan Adat Papua

Proses peralihan kekuasaan di Papua berujung kepada Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) Juli-Agustus 1969 yang menyatakan Papua sebagai bagian dari NKRI. Namun demikian, sejarah Papua setelah 1969 menunjukkan bahwa hasil Pepera justru menjadi salah satu akar konflik yang berkepanjangan (Suryawan, 2012). Berbagai praktik kekerasan selalu tergambarkan di tanah Papua, salah satunya pemaksaan alih fungsi lahan hutan adat guna pembukaan lahan sawit skala besar di Papua. Perkebunan Sawit di Papua sudah ada sejak tahun 1980 an awal dengan perspektif tujuan pemerintah pusat untuk mengembangkan infrastruktur baru dan mengembangkan masyarakat local ke arah yang lebih baik. Faktanya orang asli Papua hanya diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan sawit untuk posisi non manajerial sebanyak 17% untuk memegang posisi

seperti administrator kantor, penjaga keamanan, operator peralatan, mekanik dan mandor, sisanya imigran dan bahkan sebagian kecil orang luar negeri (Andrianto dkk, 2014).

Namun masalah pelepasan tanah adat jauh lebih besar daripada mendapatkan posisi atau membuka lapangan kerja untuk OAP. Apakah dengan tidak bekerja seperti buruh pada umumnya OAP terlihat miskin? Tentu tidak, karena hutan yang mereka miliki sesungguhnya jauh lebih memberikan penghidupan dengan tanaman dan lahan berburu yang bisa mereka dapatkan kapan saja dengan gratis. Perspektif hak komunal yang kuat di masyarakat papua tidak dipahami secara utuh oleh pihak pemerintah atau perusahaan yang melakukan area ekspansi perkebunan kelapa sawit, sehingga konflik selalu muncul di kemudian hari untuk menuntut hak penggunaan tanah oleh masyarakat papua (Gellert, 2015). Tuntutan dari masyarakat adat papua tidak akan pernah selesai dengan walaupun dengan alasan telah melakukan praktik jual beli kepada 'perwakilan' masyarakat papua.

Perbedaan perspektif budaya penggunaan hak ulayat tanah inilah yang melahirkan kekerasan untuk merampas tanah adat guna mengalih fungsikan menjadi perkebunan sawit. Para tokoh masyarakat adat di keerom mengatakan bahwa pada awal 1980-an, masyarakat yang merupakan pemilik ulayat tanah di Papua diintimidasi untuk memberikan tanah mereka kepada Pemerintah, yang pada gilirannya disewakan ke perkebunan kelapa sawit. Ketika tokoh masyarakat menolak memberikan tanah, militer mengancam mereka dengan menuduh mereka sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (Ajit Joy, 2020). ²⁰Hal ini terkonfirmasi juga dengan hasil wawancara kami kepada mantan ketua dewan adat keerom, beliau mengatakan masyarakat adat dipaksa menandatangani lahan oleh aparat dibawah tekanan senjata seluas 50.000 Ha dengan kompensasi, 1 mobil kijang, 1 mobil truck dan

20 Wawancara mantan ketua adat keerom ST, Rabu 1 Juni 2022 di kediamannya.

uang 60 juta rupiah, harga yang sangat murah bahkan ketika tahun 1980 an, dan sampai sekarang masyarakat menuntut balik agar tanah tersebut dikembalikan semuanya.

Praktik kekerasan seperti inilah yang menimbulkan *memoria passionis* orang papua yang trauma dengan aparat dan pengalih fungsian lahan adat menjadi perkebunan kelapa sawit hingga detik ini. Johann Baptist Metz's menelurkan pemikiran mengenai *memoria passionis* sebagai titik awal teologi dalam keberpihakan dalam korban yang tergambarkan dalam bentuk penindasan dan kekerasan yang selalu diingat secara kolektif (Adiprasatya, 2017). Dalam konteks papua, Ingatan sosial kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui aparat TNI/Polri diwariskan secara turun menurun tumbuh menjadi “ingatan penderitaan bangsa Papua” dan dasar gerakan sosial pembebasan bangsa Papua (Suryawan, 2012).

Tidak mengherankan perlawanan massif masyarakat adat papua untuk mencegah alih fungsi lahan sawit masih kerap terjadi. Sebagian besar dari mereka memiliki ingatan kolektif bahwa perkebunan sawit merupakan proyek negara yang dilakukan secara paksa untuk mengambil tanah mereka. Banyak dari OAP yang berdiri dan melawan bentuk *land grabbing* perluasan sawit, walaupun tidak sedikit pula dari mereka yang justru menjadi korban. ²¹Marius Betera, salah satu OAP yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian beserta pihak keamanan Korindo group di Boven Digoel. Hal ini disebabkan korban mendatangi perusahaan untuk mengadu karena kebun pisangnyanya telah digusur untuk kepentingan lahan sawit, namun hal itu justru berbuntut pemukulan

21 Walhi. 18 Mei 2020. *Usut Tuntas Kekerasan di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Sawa Erma, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua*. Siaran pers Walhi. <https://www.walhi.or.id/usut-tuntas-kekerasan-di-perkebunan-kelapa-sawit-pt-tunas-sawa-erma-distrik-jair-kabupaten-boven-digoel-provinsi-papua>.

yang dilakukan oleh aparat terhadap dirinya hingga meninggal.²²

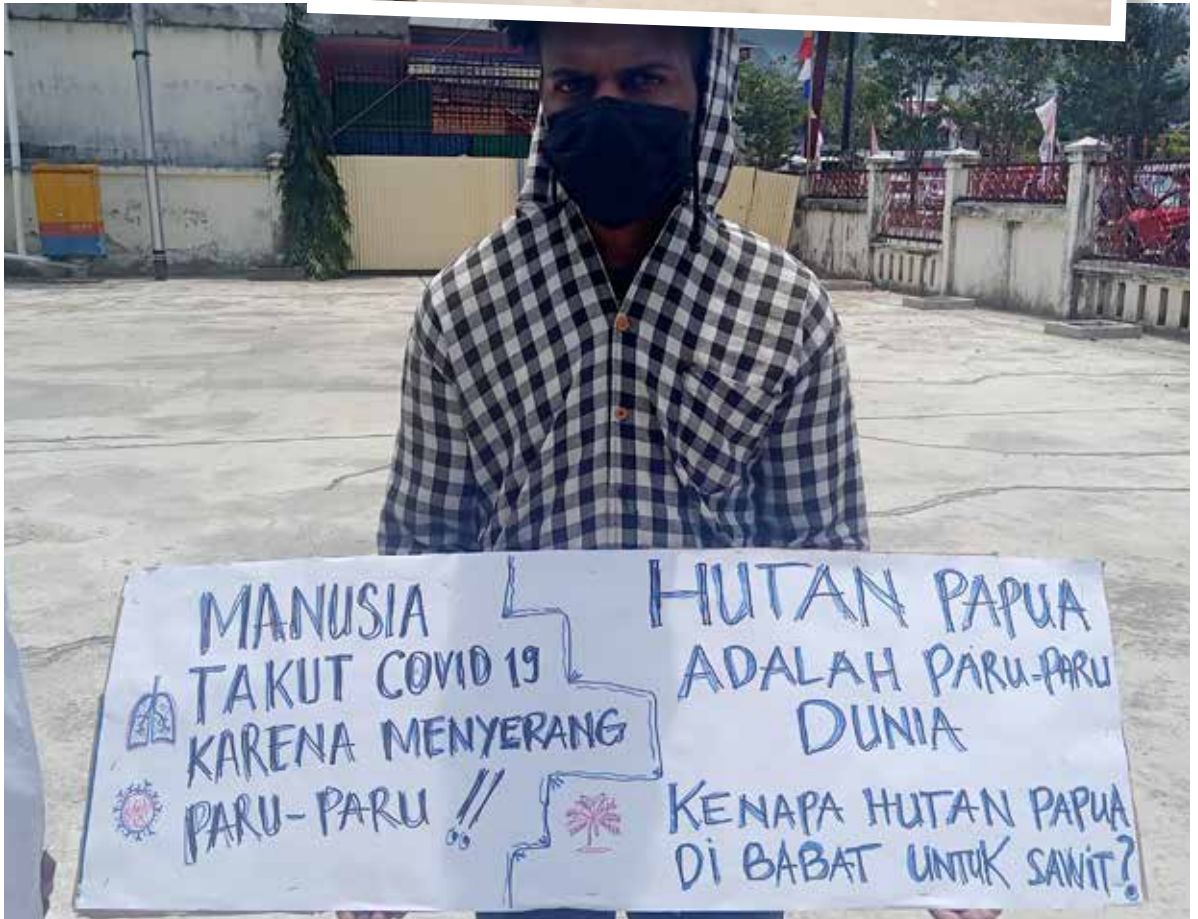
Petrus Kinggo, ketua marga Kinggo dari Suku Mandobo berkukuh mempertahankan hutan adatnya di Distrik Jair, Boven Digoel, agar tidak dijadikan kebun kelapa sawit.²³ Begitupun juga masyarakat adat suku Moi di kampung Segun, Kab. Sorong, Papua Barat yang bahkan melakukan perlawanan dengan mengukur tanah ulayat mereka untuk mencegah perusahaan sawit mencaplok tanah sembarangan. Hal ini didasarkan tidak ada efek positif dari perkebunan sawit bagi OAP, yang ada sagu sebagai makanan pokok mereka makin lama makin tergusur. Selain itu pohon-pohon yang telah menjadi warisan *tete* moyang mereka semakin hilang tergerus karena perluasan sawit.

Perlawanan serta konflik seperti ini akan terus kita saksikan di tanah papua karena *memoria passionis* orang papua menceritakan sejarah tidak tertulis mengenai penderitaan dan kekejaman yang dialami oleh mereka, dan yang pernah mengalami kekerasan kemudian mengalami trauma psikologis yang sulit untuk disembuhkan. Memori kolektif tersebut sedikit banyak mempengaruhi pola pikir orang papua untuk melawan segala penindasan di tanahnya. Gagasan tentang "*memoria passionis*" membuka perspektif kita untuk merefleksikan perjalanan sejarah Papua yang banyak ternoda oleh berbagai penderitaan fisik dan luka batin yang tidak menemukan solusinya (Taum, 2015). Kesimpulannya, pengalih fungsian lahan sawit di papua hanya menimbulkan ingatan penderitaan, dimulai dari proses *land grabbing* yang melanggar HAM hingga hasil kerusakan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat papua.

22 Amindoni, Ayomi., Henschke, Rebecca. 12 November 2020. *Papua: Investigasi ungkap perusahaan Korsel 'sengaja' membakar lahan untuk perluasan lahan sawit*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54720759>.

23 Kapisa, Hans. 23 September 2021. *Janji manis investor sawit tak lagi berefek bagi warga Moi di Segun*. Jubi.co.id. https://jubi.co.id/papua-janji-manis-investor-tak-berefek-bagi-warga-moi/?quad_cc

Aksi damai mahasiswa di PTUN Jayapura yang mendukung keputusan Bupati Sorong yang mencabut izin usaha perusahaan kelapa sawit di Sorong.
Foto: Istimewa.





Aksi damai mahasiswa di PTUN Jayapura yang mendukung keputusan Bupati Sorong yang mencabut izin usaha perusahaan kelapa sawit di Sorong. Foto: Istimewa.



Aksi damai mahasiswa di PTUN Jayapura yang mendukung keputusan Bupati Sorong yang mencabut izin usaha perusahaan kelapa sawit di Sorong. Foto: Istimewa.



Berpendapat di Papua, Tetap Dibungkam

— Oleh M. Bernard Koten

Pengantar

Mengeluarkan atau mengekspresikan pendapat, keinginan dan kehendak merupakan sesuatu yang melekat dalam diri setiap manusia. Perasaan manusiawi ini berlandaskan pada suasana atau situasi hidup yang dialaminya dan dilihatnya. Manusia secara spontan dan sadar mengungkapkan kebahagiaan, kesedihan, suka dan duka yang dialaminya.

Di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ungkapan atau ekspresi terhadap sesuatu yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar, adil dan tidak adil, wajar dan tidak wajar, merupakan ekspresi menuju perubahan hidup bermasyarakat dan bernegara. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah perubahan ke arah yang lebih baik, adil dan benar.

Bicara terkait Negara yang berdemokrasi dan berhukum, segala ungkapan dan ekspresi selalu berlandaskan pada jalur atau hukum yang sudah ditentukan. Baik itu hukum yang diatur secara adat istiadat,

Negara maupun hukum yang berlaku secara internasional atau universal. Salah satu ciri Negara yang berdemokrasi adalah Negara yang menjamin ungkapan kebebasan dan pendapat dari setiap warganya. Karena setiap kebijakan atau peraturan yang diambil oleh Negara, juga berlandaskan pada aspirasi atau pendapat dari warganya. Para pemikir dan tokoh dunia seperti Aristoteles, Abraham Lincoln, Joseph Scherer, Sidney Hook, menempatkan rakyat/warga menjadi fokus dalam kehidupan Negara demokrasi.

Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan berjuluk Negara hukum. Hal ini berarti Negara Indonesia sependapat dengan para pemikir atau tokoh dunia yakni menempatkan rakyat sebagai fokus dalam kehidupan bernegara. Begitupula peraturan atau kebijakan yang diberlakukan harus menjamin rakyat atau warganya hidup tenang, damai dan sejahtera di Negara Indonesia. Pertanyaan bagi kita, Bagaimana ruang demokrasi, khususnya Negara menerima dan menjamin kebebasan berpendapat dari rakyat di Tanah Papua di tahun 2021?

Suara Kritikan Dicap 'Pembangkang'

Pada tahun 2021, kebijakan atau peraturan yang diberikan ke Tanah Papua sangat mempengaruhi aspirasi rakyat Papua. Kebijakan pemerintah pusat seperti, pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid II, Pemekaran DOB, pendropan pasukan militer, membangkitkan kemauan orang asli Papua untuk melawannya. Kebijakan ini diperparah lagi dengan kelambanan Negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Niat baik orang asli Papua yang menegur pemerintah melalui aksi demo turun jalan secara damai terus dilakukan. Selain gerakan damai turun jalan, warga juga melakukan perlawanan secara akademik atau ilmiah. Dua jenis gerakan damai tersebut selalu dimotori oleh generasi muda dan mahasiswa Papua. Walaupun demikian, suara yang kritis ini tetap mendapatkan perlawanan yang sangat kuat dari Negara sendiri. Negara Indonesia tidak mau berkompromi. Suara yang kritis ini dianggap

oleh Negara sebagai suara ‘pembangkang’. Ketakutan yang sangat berlebihan dari Negara, menjadikan Negara bersikap semakin ‘ganas’. Ruangan akademik atau ilmiah seperti di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), bahkan ruangan diskusi ilmiah di asrama-asrama sering ‘dihantui’ dengan perlakuan Negara melalui alatnya. Pada 22 Maret 2021, mahasiswa USTJ harus berurusan dengan pihak Kepolisian Resort Kota Jayapura. Aksi damai di wilayah Kampus USTJ yang meminta Pemerintah Indonesia membuka dan memberikan akses bagi kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua, dibubarkan oleh pihak kepolisian. Lima orang mahasiswa USTJ ditangkap oleh Kepolisian Resort Kota Jayapura²⁴. Lima hari kemudian, tepatnya pada 23 Maret 2021, seminar akademik atau ilmiah yang bertajuk ‘Mencari Jalan Tengah Pelanggaran HAM di Tanah Papua’, Sabtu, 27 Maret 2021, dibubarkan oleh Polresta Jayapura²⁵.

Selanjutnya, tindakan pembungkaman kebebasan bersuara terus terjadi. Beberapa catatan dan pantauan SKPKC Fransiskan Papua adalah:

- Aparat gabungan militer polisi dan TNI membubarkan aksi damai penutupan PT Freeport Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa Uncen Jayapura pada 07 April 2021²⁶. Aparat Kepolisian di Semarang membubarkan aksi unjuk rasa menolak DOB, Penutupan PT Freeport, Otonomi Khusus Jilid II dan memberikan hak penentuan nasib sendiri Papua. Aksi unjuk rasa ini dimotori oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).²⁷
- Minggu, 09 Mei 2021, Juru Bicara Internasional Komite Nasional

24 Lihat <https://jubi.co.id/papua-demo-bawa-bendera-bintang-kejora-5-mahasiswa-ustj-ditangkap/>.

25 Lihat <https://jubi.co.id/seminar-nasional-west-papua-dibubarkan-legislator-ini-bukan-zaman-ora-ba/>, <https://www.kaskus.co.id/thread/605f4fa36415fb41a7420e71/polisi-halangi-pelaksanaan-seminar-nasional-west-papua-di-expo-waena/>

26 Lihat <https://jubi.co.id/papua-pembubaran-demo-freeport-sejarah-panjang-pembatasan-kebebasan-berpendapat-di-uncen/>

27 Lihat <https://kontras.org/2021/04/09/kembali-berulang-mengecam-pembungkaman-kebebasan-berekspresi-oleh-aparat-terhadap-aktivis-papua-di-semarang/>

Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo, ditangkap oleh polisi dari satuan Nemangkawi. Menurut pihak kepolisian, Victor Yeimo masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).²⁸

- Polisi membubarkan aksi damai unjuk rasa menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.²⁹ Sebanyak 22 mahasiswa Uncen Jayapura ditangkap polisi dan 5 lainnya mengalami luka-luka karena mengalami kekerasan dari aparat kepolisian.³⁰
- Pada 15 Juli 2021, pihak kepolisian tidak memberikan ruang bagi warga di Manokwari, Papua Barat, yang menyampaikan pendapatnya untuk menolak berlanjutnya Otsus Papua. Pihak kepolisian beralasan bahwa ada kebijakan PPKM karena situasi Covid 19.³¹
- Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura menahan 14 aktivis mahasiswa Papua, saat hendak menggelar aksi solidaritas dan tuntutan untuk membebaskan Victor Yeimo, di depan Auditorium Universitas Cenderawasih, Selasa, 20 Agustus 2021.³²
- Pada tanggal 16 Juli 2021, aksi solidaritas damai untuk pembebasan Victor Yeimo di Dekai, Yahukimo berakhir rusuh. Sebanyak 48 orang masa aksi ditangkap dan 1 orang masa aksi ditembak oleh aparat keamanan.³³
- Pada tanggal 16 Agustus 2021, aparat gabungan Kepolisian dan TNI membubarkan aksi solidaritas dari Petisi Rakyat Papua. Aksi damai

28 Lihat <https://jubi.co.id/papua-victor-yeimo-ditangkap-satgas-nemangkawi/>

29 Lihat <https://jubi.co.id/pembubaran-aksi-tolak-ruu-otsus-papua-pada-rabu-membungkam-demokrasi/>, <https://jubi.co.id/aksi-mahasiswa-tolak-otsus-dijawab-dengan-penangkapan/>

30 Lihat <https://jubi.co.id/aksi-mahasiswa-tolak-otsus-dijawab-dengan-penangkapan/>, <https://pbhi.or.id/pernyataan-bersama-koalisi-kemanusiaan-papua/>

31 Lihat <https://jubi.co.id/ppkm-darurat-aksi-tolak-revisi-uu-otsus-di-papua-barat-dibubarkan/>

32 Lihat <https://jubi.co.id/demo-solidaritas-untuk-victor-yeimo-polisi-sempat-tahan-14-aktivis-mahasiswa/>

33 Lihat <https://jubi.co.id/satu-tertembak-dan-48-warga-ditangkap-di-yahukimo/>

ini dilakukan untuk pembebasan Victor Yeimo.³⁴

- Pada tanggal 01 Desember 2021, aksi damai oleh Aliansi Mahasiswa Papua Bali dibubarkan oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara.³⁵

Kabar atau informasi terkait pembungkaman ruang demokrasi di depan umum juga dicatat secara baik oleh Negara sendiri yang diwakili oleh Komnas HAM RI dan NGO yang berada di luar Papua bahkan di luar negeri. Organisasi TAPOL yang bergerak untuk isu HAM di Papua mencatat bahwa terjadi kekerasan oleh militer Indonesia terhadap masa aksi di jalan. Pihak Komnas HAM mencatat bahwa terdapat 44 kasus pembungkaman ruang demokrasi bagi warga. Pembungkaman itu dalam bentuk serangan digital, intimidasi, ancaman, terror dan kriminalisasi.³⁶ Organisasi Amnesty Internasional Indonesia mencatat terdapat 84 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi menggunakan UU ITE dengan 98 orang korban.³⁷

Terlepas dari perdebatan jumlah kasus pembungkaman ruang demokrasi, dalam hal penyampaian pendapat di depan umum, Negara Indonesia masih tetap membungkam suara-suara untuk kebenaran dan keadilan dari Tanah Papua. Segala peraturan yang sudah ditentukan oleh Negara hampir selalu dilanggar ketika peraturan tersebut diterapkan di Tanah Papua. Orang-orang kecil atau warga biasa asli Papua harus dipaksa untuk tunduk dan taat. Dan ketika warga protes karena hilangnya keadilan, kebenaran hukum, warga dicap sebagai ‘pembangkang’ atau ‘separatis’. Suara warga Papua yang dianggap mengkritik Negara selalu diperhadapkan dengan alat Negara, militer Indonesia.

34 Lihat <https://jubi.co.id/massa-aksi-damai-bebaskan-victor-yeimo-dibubarkan-petugas/>

35 Lihat <https://jubi.co.id/demontrasi-mahasiswa-papua-di-denpasar-diwarnai-bentrokan-dengan-ormas/>

36 Lihat <https://www.niaga.asia/pelanggaran-kebebasan-bereksprei-dan-berpendapat-komnas-ham-terjadi-di-ruang-digital/>

37 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/13/19164621/ruang-kebebasan-bereksprei-sepanjang-2021-dinilai-kian-menyempit?page=all>

Berpendapat di Muka Umum dalam Peraturan

Negara Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvenan internasional yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satunya adalah meratifikasi Konvenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang masuk dan menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada pasal 19 Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pasal 19, secara jelas memberikan hak kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum³⁸. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, Pasal 28 menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulis bagi setiap warga.

Negara Indonesia juga telah menjabarkannya secara baik dan jelas dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selanjutnya dipertegas lagi di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 23 - 25 dengan jelas menyatakan setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya secara tertulis, lisan. Setiap warga Negara berhak berkumpul, berserikat untuk maksud-maksud yang damai. Di Tanah Papua, UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Bab XII mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

Tak heran orang asli Papua merasa tidak menjadi bagian dari Negara ini. Undang-undang hanya menjadi produk akademis belaka. Realisasinya tunggu dulu. Walaupun ada niat baik merealisasikannya, itu pun kalau dianggap menguntungkan segelintir pihak yang mengatasnamakan Negara Indonesia. Orang atau warga berstatus biasa, lemah dan kecil tetap berada pada jalurnya, yakni korban.

38 Bdk. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 19

Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 'Sebatas Opini'

— Oleh M. Bernard Koten

Wacana dan niat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua sampai saat ini masih terus dipertanyakan. Setiap tahunnya berbagai pihak terus bersuara penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Satu kasus terjadi, banyak pihak bersuara dan pada saat yang bersamaan, janji terus terucap dari Negara. Belum diselesaikan, muncul kasus yang baru. Akhirnya kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua terus menumpuk. Mulai dari mana untuk menyelesaikannya? Apakah masih ada niat baik dari Negara untuk menyelesaikannya?

Salah satu korban kasus 06 Juli 1998, Biak Berdarah, 23 tahun yang silam, Fillep Karma, kembali memberikan pernyataannya. Kasus Biak Berdarah yang sudah dijanjikan tapi belum diselesaikan sampai saat ini. Fillep Karma berkesimpulan bahwa Negara seakan menutupi kasus tersebut, padahal korban Biak Berdarah sampai saat ini masih merasakan traumanya. Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menilai sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang diselesaikan. Ada 'angin' segar dari pihak militer Indonesia. Melalui Panglima TNI Jendral TNI Andika Perkasa menyampaikan dan berjanji bahwa akan mengawal kasus pelanggaran HAM di Papua³⁹. Pernyataan ini disambut baik oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta. Menurut KontraS Jakarta, sebaiknya langkah pertama yang dilakukan Panglima TNI adalah menarik atau mengurangi pasukan militer di Papua dan terbuka atas penanganan terhadap Papua selama ini⁴⁰.

Di tahun-tahun sebelumnya atau dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun belakangan ini sejak kasus penembakan di Lapangan Karel Gobay, 08 Desember 2014 di Paniai, banyak pihak terus menyuarakan penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua. Bahkan seorang Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo juga berjanji menyelesaikannya. Semuanya masih sebatas janji. Menyelesaikannya adalah pekerjaan rumah yang 'mungkin dengan sengaja dibiarkan' oleh Negara. Dengan tindakan Negara yang terus mengabaikan pekerjaannya untuk menyelesaikan HAM di Tanah Papua, akan terus membangun ketidakpercayaan dari warga Papua, khususnya korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dewan Adat Meepago bahwa sampai saat ini masyarakat tidak percaya kepada negara yang hanya berjanji dan tidak menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, khususnya kasus Paniai Berdarah, 2014⁴¹.

Salah satu usaha yang didorong oleh para pihak adalah mendukung terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua. Secara peraturan perundangan, terbentuknya lembaga atau komisi ini

39 Bdk. <https://www.republika.co.id/berita/r3fpr0396/panglima-tni-kawal-kasus-pelanggaran-ham-di-papua>

40 Bdk. <https://www.republika.co.id/berita/r3hgxl485/kontras-penanganan-kasus-ham-papua-harus-transparan>

41 Bdk. <https://suarapapua.com/2021/12/18/daw-meepago-negara-gagal-tuntaskan-kasus-paniai-berdarah/>

dijamin. Sudah 15 tahun KKR ini terkantung-kantung sejak dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006⁴². Di dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pasal 45-47, Negara harus membentuk KKR. Pada Maret 2021, pihak Kepolisian Daerah Papua juga berpendapat bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui KKR⁴³. Dukungan pembentukan KKR juga dari para advokat di Tanah Papua. Direktur LP3BH Manokwari, Jan Christian Warinussy, tetap mendesak negara membentuk KKR dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Hal yang sama juga disampaikan oleh LBH Papua bahwa KKR sangat penting untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Papua yang menumpuk. Dari Komisi I DPR Papua, yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), meminta agar Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua mesti memperjuangkan bersama, agar penyelesaian dugaan pelanggaran HAM lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Di penghujung tahun 2021, patut kita memberikan apresiasi terhadap niat baik Negara Indonesia. Negara melalui Kejaksaan Agung Indonesia menetapkan tim penyidik kasus pelanggaran HAM Paniai 2014. Apakah ada harapan dan titik terang melalui KKR? Model KKR seperti apa yang perlu dibangun di Papua? Apakah niat baik ini hanya sebagai upaya 'pencitraan' ke luar bahwa Negara selalu serius mengurus masalah pelanggaran HAM?

Kita semuanya berharap bahwa pernyataan ini tidak hanya sebatas opini. Kita berharap Negara tak ingkar janji lagi.

42 Bdk. <https://jubi.co.id/papua-uu-kkr-perlu-dihidupkan-kembali-di-indonesia/>

43 Bdk. <https://jubi.co.id/polda-papua-penyelesaian-dugaan-pelanggaran-ham-sebaiknya-lewat-kkr/>

Kronik Situasi Hak Asasi Manusia di Papua Tahun 2021

Pemekaran Wilayah Daerah Otonom Baru

09 – 10 April

Ratusan rakyat Yahukimo turun jalan menggelar aksi demonstrasi damai dalam rangka menolak keberlanjutan otonomi khusus (Otsus) dan penolakan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat. Koordinator umum aksi penolakan DOB dan Otsus di Yahukimo, Yerim Kobak mengatakan, *“Jakarta jangan paksakan untuk berikan Otsus dan pemekaran daerah seenaknya. Karena Otsus sudah berakhir masanya. Biarkan kami (rakyat Papua) yang menentukan maunya kami. Dan akhirnya Kota Dekai ini kami lumpuhkan, lautan manusia di sini. Ini bukti bahwa rakyat akar rumput menolak Otsus Jilid II”*, kata Yerim Kobak saat dihubungi Jubi lewat telepon selulernya, Kamis (8/4/21). Menurut Kobak, bagi rakyat asli Papua, DOB merupakan satu paket di dalam Otsus. Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Yahukimo (SOPPY), Otniel Sobolim mengungkapkan aksi

tersebut murni dari masyarakat akar rumput di Yahukimo. Aksi dibuat oleh organisasi sipil, mahasiswa, dan pemuda namun akan didorong lewat organisasi (Koran Jubi, 09 – 10 April).

01 Juli

- Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi menyatakan sikap akan mendorong pemekaran DOB di lima wilayah adat di Papua. Pernyataan dukungan ini disampaikan pada pertemuan rutin yang digelar oleh bupati, walikota, DPR D se-Tanah Tabi dan Saireri di Hotel Asana Biak, Rabu, 30 Juni 2021 (Harian Cepos, 01 Juli 2021).
- Sejumlah organisasi pemuda yang ada di Merauke bertemu dengan Ketua DPRD Merauke Benjamin Latumahina terkait dengan rencana pemekaran Provinsi Papua Selatan. Ketua Pemuda Ansor Cabang Merauke Alfi Syahri menjelaskan mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan pikiran-pikiran pemuda dalam menghadapi proses pemekaran provinsi Papua Selatan. Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu, 30 Juni 2021 di rumah jabatan Ketua DPRD Merauke (Harian Cepos).
- Masyarakat dari Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai yang berdomisili di Wilayah Bedu Epouda berunjuk rasa di Moenamani pada 25 Juni 2021. Mereka menyatakan untuk bergabung dengan Kabupten Dogiyai. Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, menerima masa aksi ini. Menurut Yakobus, warga yang berdemo ini ingin bergabung dengan Dogiyai karena jangkauan pelayanan pemerintahan wilayah Epouda lebih dekat dengan Kabupaten Dogiyai (Koran Jubi, 30 Juni – 01 Juli).

21 Juli

Pada 15 Juli 2021, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna di DPR. Pengesahan itu sejalan dengan arahan Presiden

Joko Widodo yang menginginkan lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua. Jaleswari Pramodhawardani, Deputy V Kepala Staf Kepresidenan, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7), menyatakan ada tiga pendekatan dalam aturan terbaru ini, yaitu: segi kuantitatif (peningkatan penerimaan dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional); segi kualitatif (penggunaan dana Otsus ditentukan secara spesifik persentase minimal penggunaannya dalam aspek-aspek strategis yang mendorong pembangunan kesejahteraan); dan segi akuntabilitas (penggunaan dana otsus diatur untuk dipergunakan dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik melalui pengawasan secara koordinatif). Dalam UU Otsus Papua terbaru, ketentuan Pasal 76, perihal pemekaran wilayah, diubah. Kini terdapat lima ayat dalam aturan tersebut. Misalnya, dalam ayat 3 menyebutkan *“Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.”* Artinya, ayat tersebut semakin mencerminkan bahwa UU Otsus Papua bersifat *lex specialis* derogat *legi generali*. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan berpendapat formula Pasal 76 UU Otsus baru sama dengan UU Otsus lama, yakni atas persetujuan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Bedanya, di UU Otsus baru, selain pemekaran menjadi wilayah provinsi, parlemen dapat pula menyetujui pemekaran kabupaten dan kota. *“Artinya, sekarang itu posisi MRP dan DPRP lebih kuat,”* ujar dia kepada reporter Tirto, Jumat (16/7/2021) (<https://tirto.id/pemekaran-papua-dalam-uu-otsus-baru-berpotensi-mengancam-oap-ghTa>).

15 September

Mentri dalam Negeri (Mendagri) Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian mengaku pemerintah pusat merestui aspirasi pemekaran Provinsi Papua Selatan. Dengan hanya empat kabupaten. Pemerintah akan membuat aturan baru soal pemekaran Papua Selatan itu paling lambat terbit pada 19

Oktober 2021. Tito mengatakan pemekaran ditujukan untuk percepatan pembangunan. Ia menilai Papua Selatan sudah siap untuk menjadi sebuah provinsi. *“Di Papua harus ada percepatan pembangunan. Merauke sudah bisa dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan, walaupun hanya ada empat Kabupaten karena adanya kekhususan buat Papua,”* ungkapinya di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Minggu, 12 September 2021 (Koran Jubi, 15-16 September).

02 Desember

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua atau pemekaran wilayah akan dipertimbangkan untuk menjadi prioritas pembahasan dalam satu sampai dua tahun ke depan. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay, mengatakan rencana pemekaran wilayah Papua dilakukan atas masukan dari daerah-daerah, kabupaten, sampai dewan adat setempat. Warga yang diajaknya bicara, ujar dia, mengatakan membutuhkan akses yang lebih mudah terhadap pelayanan pemerintah. Namun, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan hal itu terlalu tergesa-gesa jika dilakukan tanpa menyelesaikan akar masalah yang ada di Papua. Adriana Elisabeth, peneliti LIPI, mengatakan situasi konflik yang masih terjadi di Papua akan menyulitkan rencana pemekaran wilayah atau DOB, meski pemerintah sudah membuat Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. *“Ada unsur ketergesaan di sini. Yang diperhatikan pemerintah itu hanya pembangunan. Pembangunan itu bukan satu-satunya masalah. Ada masalah lain yang saling berkait, itu yang tidak pernah direspons secara terbuka,”* kata Adriana. Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, meminta pemerintah untuk memperbaiki

regulasi sebelum melakukan pemekaran wilayah. *“Atur dulu tentang politik konstitusional orang asli Papua, seperti pembentukan partai lokal dulu, pengelolaan sumber daya alamnya diatur dulu, pendidikannya juga diatur dulu, kesehatan, masalah ekonomi,”* kata Timotius (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59496244>).

- Majelis Rakyat Papua (MRP) secara kelembagaan menerima aspirasi tim pemekaran Provinsi Papua Selatan. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan, penyerahan aspirasi pemekaran wilayah Provinsi Papua Selatan tentunya baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. *“Sehingga pemekaran yang disampaikan harus sesuai aspirasi masyarakat dari wilayah Selatan ini akan diproses oleh Majelis Rakyat Papua, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga ini,”* kata Timotius Murib, Rabu 24 November 2021 (Koran Jubi, 01 – 02 Desember).

Pendidikan

08 Januari

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait menyebutkan bahwa terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pihaknya di tahun 2021 ini. Pertama, buta huruf di Papua yang berada di angka 9 persen, sehingga itu menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. *“Kedua, angka putus sekolah cukup tinggi di seluruh jenjang, baik SD, SMP, SMA, SMK, yang angkanya berkisar di 21 – 22 persen,”* jelas Christian Sohilait, Kamis (7/1) kemarin. Adapula, anak-anak aibon (ngelem) yang tersebar di 6 -7 kabupaten/kota di Papua. Menurut Sohilait, kalau ini tidak diberikan perhatian, maka akan menyebabkan masalah di sektor pendidikan, khususnya di Papua.

“Kita juga masih punya persoalan dengan sumber daya manusia, baik guru maupun tenaga kependidikan. Artinya, ada yang perlu sertifikasi, peningkatan kapasitas guru maupun peningkatan kapasitas di bidang IT,” tambahnya.

Lanjutnya, regulasi juga dinilai menjadi satu persoalan yang perlu diselesaikan. Dengan banyaknya regulasi, maka harus dilihat penerapannya, apakah ada regulasi pusat yang tidak sesuai dengan Otsus Papua, maupun regulasi daerah yang mesti diperbaiki dan memberikan dukungan bagi pendidikan (<https://www.ceposonline.com/2021/01/08/tahun-ini-dppad-hadapi-berbagai-persoalan-pendidikan/>).

28 Januari

Yayasan Nusantara Sejati (YNS) menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) bersama dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Kabupaten Lanny Jaya. Kepala DPPAD Provinsi Papua, Christian Sohilait menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memiliki 3 program besar, yakni Organisasi Penggerak, Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Dalam Program Organisasi Penggerak, Yayasan Nusantara Sejati menandatangani MoU ini bersama dengan Pemerintah. Terdapat 6 kabupaten/ kota yang menjadi sasaran program dari YNS, yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Kota Jayapura. Beliau menyampaikan bahwa YNS diberi kepercayaan untuk membantu dalam 2 tahun. Sehingga beliau berharap agar angka statistic pendidikan khususnya literasi di 6 Kabupaten/Kota ini bisa meningkat (<https://yns-iggrd.org/2021/01/28/yns-jalin-kerjasama-dengan-6-kabupaten-di-provinsi-papua-untuk-tingkatkan-literasi-kelas-awal/>).

11 Februari

Akibat konflik berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Nduga 2018 lalu, seluruh aktivitas termasuk pendidikan lumpuh total. Tercatat, para siswa yang bersekolah di kabupaten ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak selama 3 tahun. Oleh sebab itu pemerintah harus segera melakukan upaya penyelamatan terhadap pendidikan di Nduga, Provinsi Papua. Hal tersebut dikatakan langsung oleh kepala Kepala Dinas

Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua, Christian Sohilat. *“Pemerintah harus segera melakukan upaya penyelamatan atas persoalan tersebut. Sebab, anak-anak itu ialah generasi penerus di daerah mereka,”* tutur Chistian, Kamis 11 Februari 2021 (<https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/lokal/pr-1301418274/sekolah-di-nduga-papua-tutup-3-tahun-akibat-konflik-senjata-berkepanjangan>).

05 Maret

Beberapa tahun terakhir pendidikan di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua menjadi sorotan berbagai pihak, terutama di kalangan DPRD setempat. Dalam setiap sidang, pendidikan menjadi masalah utama yang dibincangkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Deiyai, Nataniel Pekei, mengatakan setelah beberapa bulan diberikan nota tugas, sebagai orang yang berasal dari tenaga kependidikan ia melakukan perubahan dalam manajemen. *“Saya menjalankan tugas masing-masing kepala bidang tanpa jadi mengambil ahli tugas mereka,”* kata Nataniel Pekei kepada Jubi, Jumat (5/3/2021). Selain itu, Pekei juga melakukan pembentukan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) melalui bidang menengah (SMP). *“Bidang menengah (SMP) juga sudah bentuk Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat kabupaten”* (<https://jubi.co.id/papua-cara-dinas-pendidikan-deiyai-majukan-pendidikan/>).

24 Maret

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohila berharap kepada Komisi X DPR RI agar membantu memperjuangkan pendidikan Papua kepada pemerintah pusat. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X di Komplek DPR/MPR di Jakarta, Selasa (23/3), Christian mengungkapkan masalah pendidikan di Papua yang menurutnya sudah beberapa kali diperjuangkan ke pemerintah pusat. *“Pemerintah daerah (Provinsi Papua) bergantung pada bapak, ibu. Kami sekarang sangat bermohon-mohon untuk ini kita selesaikan masalah*

guru ini,” kata dia di hadapan pimpinan dan anggota Komisi X. Christian mengungkapkan ragam masalah pendidikan di Papua yang terdiri dari kendala kesejahteraan dan jaminan kehidupan bagi guru, minimnya sarana dan prasarana, hingga konflik sosial yang berdampak pada siswa (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210323120356-20-620918/setumpuk-kendala-pendidikan-di-papua-yang-dibawa-ke-pusat>).

10 April

Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan penyerangan dua guru di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, sebagai perbuatan tidak berperikemanusiaan. Insiden ini berdampak besar bagi perbaikan kualitas pendidikan di pedalaman Papua. Hal ini disampaikan Nomensen Mambraku dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua di Kota Jayapura, Sabtu (10/4/2021). PGRI mengecam keras aksi penembakan dua guru oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Beoga, yakni Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden. Oktovianus adalah seorang guru Sekolah Dasar Jambul dan Yonatan sebagai guru Matematika di SMP Negeri 1 Beoga. Oktovianus ditembak KKB pada Kamis (8/4/2021) di Kampung Julugoma, Distrik Beoga. Sementara Yonatan ditembak mati Jumat (9/4/2021) di Distrik Beoga (<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/10/penyerangan-guru-berdampak-bagi-layanan-pendidikan-di-papua>).

26 April

Di tengah masa ujian pelajar tingkat dasar di seluruh Indonesia, didapati dua sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Merauke justru tidak menjalankan aktivitas belajar mengajar. Berdasarkan kunjungan Kepala Dinas Pendidikan Merauke di sejumlah distrik diantaranya Distrik Kimaam, Waan, Tabonji, Ilwayab dan Okaba. Kepala Dinas Pendidikan Merauke, Thiasony Betaubun mengatakan dari empat SD yang ada di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke hanya ada dua sekolah yang

menjalankan kegiatan belajar mengajar. Duanya lagi: SD Padua dan SD Yuli-Ulim lumpuh aktifitas belajar. Kedua sekolah ini sejak dari Januari hingga saat ini tidak menjalankan aktifitas belajar mengajar karena para guru tidak ada di tempat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke telah memanggil guru yang telah meninggalkan tempat dan diberi sanksi berdasarkan peraturan pemerintah No.10 (Harian Cepos, 26 April).

25 Juni

Dinas Pendidikan Provinsi Papua kembali mendapat sorotan berkaitan dengan sebuah gedung sekolah yang berada di Kampung Bareri, Distrik Roufaer, Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak layak lagi digunakan (plafon mulai lapuk dan pintu sekolah yang bolong) diunggah di media social *Facebook* (FB) oleh akun bernama Ulis Aisoki. Ulis juga menulis bahwa jumlah siswa di SD itu lebih dari 100 siswa disekolahkan di gedung ini namun tidak ada guru sehingga masyarakat sendiri yang mengajar anak-anak mereka (Harian Cepos, 25 Juni).

02 Juli

Pembangunan di Papua dan Papua Barat sampai saat ini belum seperti di daerah lainnya. Sejumlah pihak meminta pemerintah lebih memperhatikan Papua dan Papua Barat. Khususnya kondisi layanan pendidikan. Kondisi layanan pendidikan di Papua dan Papua Barat diungkapkan oleh Dosen Universitas Negeri Medan (UNM), Dr Rosmaida Sinaga, masih dijumpai adanya fasilitas pendidikan yang rendah. Diantaranya seperti adanya gangguan internet yang kerap terjadi. Di tambah lagi, para guru tidak punya jaringan internet. Padahal saat ini banyak kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari rumah berbasis internet. Kemudian di pedalaman Papua dan Papua Barat, lanjutnya, masih dijumpai siswa yang tidak punya buku atau hanya punya satu buku tulis. Lalu ada siswa yang harus berjalan berkilo-kilo meter

menuju sekolah. Sehingga, secara fisik lelah dan kurang fokus dalam belajar. *“Dijumpai mereka hampir tidak sekolah, karena gurunya tidak ada,”* jelasnya. Parahnya terkadang hanya ada satu guru di satu sekolah. Belum lagi kesejahteraan sangat kurang. Menurut dia para guru itu lebih digerakkan oleh panggilan jiwa. Rosmaida juga mengungkapkan, metode pendidikan berasrama dinilai cukup membantu menghasilkan kualitas pendidikan yang baik di Bumi Cendrawasih. Pasalnya, anak-anak yang tempat tinggalnya jauh bisa belajar dengan efisien di asrama. *“Kalau pembangunan dan pendidikan diperbaiki, maka kesejahteraan akan naik. Pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi maka akan mampu bersaing dengan daerah lain,”* pungkasnya (<https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/02/07/2021/butuh-perhatian-pemerintah-pendidikan-di-papua-perlu-pembenahan/>).

03 Juli

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan program afirmasi pendidikan tinggi (Adem) dan afirmasi pendidikan menengah (Adik). Berdasarkan data yang dimiliki pihak dinas, sudah sebanyak 350 anak Papua yang diikutsertakan dalam kedua program tersebut. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, Christian Sohilait, menjelaskan bahwa tahun ini (2021) merupakan tahun kedua. Ratusan anak muda Papua dikirim ke beberapa kota studi di Indonesia agar dapat ditolong dalam pengembangan sumber daya manusianya ke depan (Harian Cepas).

05 Juli

- Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendidikan sejak tahun 2011 melaksanakan program Sarjana Mengajar untuk Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T). Tujuan program ini adalah mempercepat pembangunan pendidikan di daerah 3 T. Di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sempat mendapatkan program tersebut

namun sekarang sudah tidak dilaksanakan. Kabupaten Nabire mendapatkan 55 orang guru yang tersebar di sekolah-sekolah. Untuk melanjutkan program tersebut, Pemkab Nabire merekrut 100 orang tamatan PGSD Uncen. Pemerintah Nabire membayar sekitar Rp 2,5 juta perbulan dari dana Otsus untuk honor para guru tersebut (Koran Jubi, 05 – 06 Juli).

- Pihak SMAN 1 Merauke menandatangani MoU kerja sama dengan SMKN 3 Merauke dalam rangka program pendidikan vokasi atau life skill bagi siswa SMAN 1 Merauke. Sekolah SMAN 1 Merauke diresmikan sebagai sekolah inklusif di bagian selatan Papua dan menjadi pilot project pendidikan inklusif (Harian Cepos, 05 Juli).
- Sebanyak 100 siswa pendidikan menengah atas dari 29 Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, tiba di Lembang, Bandung, Senin (5/7) guna mengikuti Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sebanyak 100 siswa tersebut pada tahun ajaran baru 2021/2022 akan bersekolah di 10 Kabupaten/Kota di Jawa Barat *“Sekolah kami tahun lalu mendapat Siswa Adem sebanyak 11 orang, tahun ini cuma 10 orang. Kami sejak pertama kali program Adem dilaksanakan pada tahu 2012 sudah menerima siswa Adem asal Papua dan Papua Barat. Mereka tinggal di asrama sekolah yang kami sediakan,”* ujar Wakil Kepala Sekolah SMA Kristen Paulus Bandung, Jawa Barat, Hengky Aguw kepada School Media, Sabtu (3/7). Tercatat enam Provinsi setiap tahun menerima siswa Adem yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten dan Bali. Mereka akan belajar, berasimilasi serta berinteraksi dengan beragama kebudayaan. Jumlah peserta didik tahun ajaran baru 2021/2022 berasal dari Papua dan Papua Barat yang mengikuti Program ADEM tercatat 500 orang anak terdiri dari 350 siswa asal Provinsi Papua dan 150 siswa asal Papua Baratm (<https://smadharmakaryaut.sch.id/berita/500-siswa-adem-indonesia->

asal-papua-dan-papua-barat-ikuti-tahun-ajaran-baru-di-enam-provinsi).

07 Juli

Program afirmasi pendidikan tinggi guna meningkatkan SDM dan mutu pendidikan di Papua. Terkait dengan program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua melalui DPPAD memberangkatkan sebanyak 350 anak (Harian Cepos, 07 Juli).

12 Juli

Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua meresmikan tiga ruang kelas baru dari SD Negeri Banua Koerem di Kampung Hukulagi, Distrik Mukiama. Acara peresmian sekaligus pelepasan 12 sisi yang dinyatakan lulus dari sekolah tersebut sebagai angkatan pertama di sekolah tersebut (Harian Cepos, 12 Juli).

23-24 Juli

Sebanyak 302 pelajar orang asli Papua dinyatakan lolos seleksi administrasi beasiswa Program D-III profesi kesehatan tahun 2021. Para pelajar tersebut akan mengikuti studi Poltekes setelah lulus dari tes potensi akademik (TPA). Mereka akan studi di Manado dan Jayapura (Koran Jubi, 23-24 Juli).

02 September

- Dana Otsus untuk Pendidikan harus dikelola secara transparan. Dana Otsus Papua dinaikan setelah undang-undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus disahkan. Dengan meningkatnya dana tersebut, MPR berharap alokasinya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketua MPR RI Bambang Soe Satyo mengatakan, UU Otsus memberikan garansi kepada pemerintah pusat untuk memberikan dana untuk Papua hingga

2041. Menurut Bambang, salah satu fokus dana Otsus ialah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di Tanah Papua (Harian Cepos, 02 September).

- Sejumlah guru honorer berbondong-bondong datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Merauke di jalan Taman Makam Pahlawan Merauke. Tujuan kedatangan mereka adalah bertemu dengan Kadis. Selain itu, Raches Manufan menjelaskan bahwa mereka mau menemui kepala dinas, karena sampai sekarang para guru honorer dengan SK kolektif ini belum dibayar. Sementara dari mereka telah berkeluarga, sehingga membutuhkan biaya makan minum dan kebutuhan lainnya (Harian Cepos, 02 September).

08 September

Salah satu persoalan pelik yang dihadapi dalam mengembangkan kegiatan pendidikan bagi masyarakat Papua antara lain ialah kondisi daerah yang bergunung dan berhutan. Selain itu juga soal ketersediaan transportasi dan guru. Hal ini terungkap dalam Webinar bertajuk “Mahasiswa Papua Mengajar” yang diselenggarakan oleh Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik dan Program Pascasarjana UMY bekerjasama dengan Majelis Dikti PP Muhammadiyah, pada Senin, 6 September 2021 melalui media Zoom Meeting. Profesor Dr. Abdul Munir Mul Khan menyampaikan Gerakan Mahasiswa Papua Mengajar menjadi pilihan strategis. Gerakan mengajar ini khusus bagi mahasiswa asli Papua yang mengajar di kampungnya sendiri sebagai bagian dari cinta kampung dan keluarga (<https://szpi.umy.ac.id/gerakan-mahasiswa-papua-mengajar-alternatif-pengembangan-pendidikan-di-tanah-papua/>).

09 Oktober

Militer telah aktif di sektor pendidikan di Papua dan wilayah perbatasan lain selama beberapa tahun, demikian menurut seorang peneliti Indonesia, Hipo Wangge, seorang mahasiswa PhD di

Universitas Nasional Australia. *“Pada tahun 2013, Dinas Pendidikan Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman dengan Kodim Papua untuk menugaskan para prajurit mengajar di daerah terpencil, khususnya daerah dataran tinggi dan pegunungan”* (Koran Jubi, 08-09 Oktober).

02 November

- Warga Suku Namblong-Nimbokrang membangun rumah belajar bahasa Namblong demi mempertahankan bahasa daerah dan membangun minat belajar dari generasi-ke-generasi (Koran Jubi, 01-02 November).
- Gedung SMKN 1 Sentani, Kabupaten Jayapura dipalang oleh pemilik ulayat karena pemerintah belum melunasi ganti rugi atas wilayah yang digunakan untuk membangun sekolah. Hal ini mengakibatkan kegiatan belajar-mengajar tidak berjalan karena siswa dan guru tidak bisa memasuki sekolah (Harian Cepos, 02 November).

20 November

Kabupaten Jayawijaya (Wamena) mengalami kekuarangan guru agama untuk mengajar di sekolah swasta maupun negeri. Masalah ini telah lama dibicarakan, namun belum ada tindak lanjut dari pihak terkait dan menyebabkan beberapa sekolah mengalami kekuarangan guru dan berakibat pada pelaksanaan pendidikan (Koran Jubi, 19-20 November).

25 November

Ketidakhadiran guru untuk mengajar di sekolah di Papua mencapai 40% kerana berbagai alasan, yaitu: urusan keluarga, gaji, kesejahteraan dan jaminan lainnya. Hal ini, dikatakan oleh Plt. Kepala Dinas, Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Protasius Loby. Persoalan ini dapat memperlamabat pendidikan dan

kualitas pendidikan (Koran Jubi, 24-25 November).

Penyelenggaraan Pemerintah

01 Juli

- Pemerintah Provinsi Papua menunjukan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Tugas Harian Gubernur Papua. Gubernur Papua meminta agar masyarakat di Provinsi Papua tidak terprovokasi. Hal ini disampaikan oleh Jubir Gubernur Papua, Muhamad Rifai Darus pada Rabu 30 Juni 2021. *“Gubernur Papua berharap masyarakat tidak memberikan ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain untuk mengadudomba dan memisahkan Papua dari NKRI,”* ungkap Darus. Selain itu Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Papua, Thomas Sondegau mengingatkan agar Pelaksana Tugas Harian Gubernur Papua tidak melampaui kewenangannya dalam melaksanakan tugas (Harian Cepos, 1 Juli dan Koran Jubi, 30 Juni – 01 Juli).
- Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat di Papua, khususnya dalam memerangi isu-isu dan berita-berita hoax yang beredar. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesta Sekda Papua, Muhamad Musa’ad menjelaskan bahwa keterbukaan informasi sudah menjadi kewajiban sekaligus tolak ukur transparansi layanan pemerintahan (Harian Cepos, 01 Juli).
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, Paino mengakui bahwa adanya calo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merauke. Pernyataan ini disampaikan karena adanya informasi dari masyarakat yang telah membayar uang sebesar Rp 700.000 untuk mengurus perpindahan penduduk (Harian Cepos, 01 Juli).

13 Juli

Partai koalisi pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lukas Enembe-Klementinal (Lukmen) akhirnya melakukan pertemuan untuk membahas soal nama yang diusulkan dan diajukan sebagai sosok wakil gubernur. Gubernur berharap dalam waktu satu bulan ke depan dua nama calon segera ditetapkan dari 9 partai koalisi. Masyarakat diharapkan agar tenang mengikuti proses ini (Harian Cepas, 13 Juli).

14 Juli

Komunitas Fotografi Papua mengkritik pemerintah Jayapura dengan memotret jalan rusak dari Sereh hingga Depare yang berkolam dan tergenang air. Mereka mengambil gambar bahwa ada pempuda Papua yang sedang memancing di kolam tersebut (Harian Cepas, 14 Juli).

18 Juli

Sebuah statemen tegas disampaikan Wakil Ketua 1 DPR Papua, Yunus Wonda tentang adanya upaya-upaya membunuh karakter terhadap pimpinan atau pejabat di Papua yang berkaitan dengan disintegrasikan bangsa dan beraktifitas dengan kelompok (Harian Cepas, 18 Juli).

19 Juli

Bupati Paniai Meki Nawipa membangun jalan apung. Pembangunan jalan apung tersebut sangat membantu warga setempat yang sering kewalahan untuk berjalan melintasi rawa untuk melakukan aktifitas pertanian termasuk anak sekolah (Harian Cepas, 19 Juli).

21 Juli

Kantor Gubernur Papua akan dibangun menjadi 10 lantai. Gubernur Papua Lukas Enembe telah melakukan penancangan pembangunan kantor gubernur Papua. Hal ini merupakan penyesuaian

dengan peradaban baru di dunia modern (Harian Cepas, 21 Juli).

05 Agustus

Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Polres Kawasan Pelabuhan Laut (PKL) Jayapura membagikan Bendera Merah Putih di Kompleks Werf Pantai, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Rabu (4/8) (Harian Cepas, 05 Agustus).

09 Agustus

- Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap generasi bangsa di Tanah Papua, khususnya di bidang pendidikan, Satgas Binmas Noken Polri terus melakukan terobosan inovatif dengan program-program andalan. Salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan Polisi 'Pi Ajar'. Kali ini personel Satgas Binmas Noken menggelar kegiatan Polisi 'Pi Ajar' terhadap puluhan anak di Kampung Jiginigme, Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya, Kamis (5/8). Kegiatan ini dipimpin oleh Kakorwil Binmas Noken Puncak Jaya Iptu Alauddin Patawary bersama 2 personel Binmas Noken yakni Briptu Odesua M. Kiding dan Bripda Lafry Hasan (Harian Cepas, 09 Agustus).
- Didampingi Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat di Kota Jayapura, Sabtu (7/8). Mensos dan rombongan bergerak ke dua pusat pengembangan SDM yakni di kompleks ICCI (Indonesia Cross Cultural Institute) dan kemudian ke kantor Maga Edukasi Papua. *"Penting bagi anak-anak Papua untuk mendapatkan akses pendidikan dan pengembangan vokasional. Dengan SDM yang unggul, Papua akan bisa mandiri. Seperti kebutuhan akan minyak, bisa dicukupi oleh anak-anak Papua, tanpa harus bergantung dari luar. Caranya dengan mengembangkan minyak dari kelapa yang banyak tumbuh di sini."* Ujar Mensos (Harian Cepas, 09 Agustus).

10 Agustus

- Befa Yigibalom menegaskan dirinya telah mendapatkan informasi bahwa gubernur Papua telah menentukan dua nama calon wakil gubernur Papua sesuai dengan keinginan Gubernur Papua dan menurutnya itu tidak sesuai dengan mekanisme. *“Saya sudah dengar bocoran bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe melingkar dua nama calon Cawagub versi Pak Lukas Enembe dan itu tidak sesuai dengan mekanisme”* (Harian Cepas, 10 Agustus).
- Pemerintah Provinsi Papua akui pasca kerusuhan di Kabupaten Yalimo, saat ini kondisi dan situasi Kabupaten Yalimo sudah membaik. Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah mengusulkan Carateker Bupati Yalimo. Sementara ini diharapkan masyarakat bersabar menunggu proses dari Kementrian Dalam Negeri (Harian Cepas, 10 Agustus).
- Pemerintah Kota Jayapura melakukan doa bersama Ketua Klasis GKI Sentani, Klasis Port Numbay, dan PGGS Kota Jayapura, serta para pemimpin OPD beragama Kristen, di Kantor Wali Kota Jayapura. *“Hari ini kita berkumpul, dimulainya doa dan puasa. Setiap hari Jumat di lingkungan klasis masing-masing. Terimakasih Klasis GKI Sentani sudah menyeberang ke sini untuk mendoakan provinsi Papua dari kepalanya, yakni Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Papua. Doa dan puasa dari kepala itu akan turun berkat juga kepada 28 kabupaten lainnya di Papua,”* ungkap Wali Kota Jayapura, Tomi Mano (Harian Cepas, 10 Agustus).
- Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan, tidak mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini terkait kunjungan ke Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. *“Ibu menteri itu kan perpanjangan tangan dari presiden, berarti negara dalam hal ini presiden. Komunikasi dengan pemerintahlah, bukan dengan swasta, orang perorangan, itu etika pemerintahan”* (Harian Cepas, 10 Agustus).

- Sejumlah kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua mendatangi kantor bupati untuk minta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan honor aparat pemerintah kampung (Harian Cepos, 10 Agustus).

18 Agustus

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui unit vertikal di bawahnya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura (KPKNL Jayapura) memberikan piagam apresiasi kepada Pangkalan TNI AU Silas Papare, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Papua (Harian Cepos, 18 Agustus).
- Semarakkan HUT RI Ke-76, Binmas Noken Keerom bagikan Bendera Merah Putih kepada warga di Kampung Walma, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Keerom AKP Mujait beserta para personelnnya dengan menyasar para tokoh, kepala kampung dan warga yang ada di kampung Walma (Harian Cepos, 18 Agustus).
- Masyarakat meminta agar putusan penentuan dua nama calon wakil Gubernur Papua harus diberikan hak kepada koalisi Lukmen Jilid II. Weki Gambo salah satu pemuda Papua mengatakan apapun keputusannya agar tidak menimbulkan keributan. *“Lukas Enembe adalah pemimpin yang netral, semua Cawagub adalah kader terbaik Lukas Enembe, apapun putusan koalisi terima baik, jangan bikin onar hal itu sudah keputusan final, maka jangan ada pengakomodiran massa”* (Harian Cepos, 18 Agustus).
- Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalon menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati. Hal itu ditegaskan Befa seusai bertindak selaku Inspektur upacara pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Lanny Jaya yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Lanny Jaya di Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya (Harian Cepos, 18 Agustus).

- Pemerintah Kabupaten Nduga sukses melaksanakan memperingati HUT RI ke 76 di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Nduga yang dipimpin langsung oleh Bupati Nduga Wentius Nimiage. *“Karena kami adalah anak bangsa punya hak yang sama untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, seperti perhatikan daerah-daerah lain, kami orang Nduga mau maju, mau sejahtera, mau hidup aman dan juga mau hidup mandiri”* (Harian Cepos, 18 Agustus).

19 Agustus

- Dinamika terkait pemilihan calon wakil gubernur Papua menggantikan almarhum Klemen Tinal melalui partai koalisi yang ada di Provinsi Papua belum final. Ketua Koalisi Partai Pengusung Lukmen Jilid II, Mathius Awoitauw mengatakan, dari pertemuan terbaru yang dilakukan oleh 9 partai koalisi di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Rabu 18/8 dinamika masih terjadi. Empat partai masih menolak sementara lima partai menyetujui dua nama yang sebelumnya sudah dilingkari Gubernur Papua Lukas Enembe (Harian Cepos, 19 Agustus).
- Guna memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) Papua membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 1000 meter di Bukit Fromokho, Kampung Nendali, Sentani, Selasa 17/8. Hal ini sebagai bentuk ungkapan semangat nasionalisme dari ujuang Timur Indonesia, menunjukkan kepada saudara sebangsa dan se-tanah air bahkan dunia bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gercin Hendrik Yance Udam mengatakan, *“Rasa nasionalisme kebangsaan tidak berpatokan pada uang, ini adalah yang lahir dalam diri kita orang Papua”* (Harian Cepos, 19 Agustus).
- Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Kemanusiaan Banjir Bandang Sentani, 16 Maret 2019, melakukan

aksi demonstrasi di depan pintu masuk Kantor Bupati Jayapura, Rabu, 18/8. Aksi kali ini menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk segera mewujudkan pembangunan rumah bagi korban bencana banjir bandang di wilayah Danau Sentani. Koordinator massa, Manase Taime mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya itu, hanya ingin menuntut dan menagih janji Bupati Jayapura, Mathius Awoiutauw yang berjanji untuk menyalurkan dana pembangunan rumah kepada masyarakat (Harian Cepos, 18 Agustus).

20 Agustus

- Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo secara resmi meluncurkan program unggulan JOSHUA (Jaminan Sosial Hari Tua) di aula Bappeda Kabupaten Tolikara, di Igari, Karubaga, Kamis 19/8. Launching ditandai dengan penyerahan secara simbolis kartu JOSHUA dan buku tabungan oleh Bupati Usman Wanimbo kepada 10 orang lanjut usia (lansia). Bupati Usman G Wanimbo dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Tolikara sangat peduli terhadap pembangunan sumber daya manusia masyarakat asli Papua. Selain program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), sekolah unggulan berpola asrama dan prioritas jabatan ASN putra daerah (Harian Cepos, 20 Agustus).
- Pemerintah Provinsi Papua sangat mendukung program pemulihan ekonomi dan berharap diluncurkannya Kredit Papeda dan Website Siap Waropen dapat memberi kontribusi yang baik untuk kemajuan di Tanah Papua. Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menjelaskan, *“Dengan dilaunchingnya program Kredit Papeda dan Website Siap Waropen diharapkan dapat berdaya guna dan berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat di Papua”* (Harian Cepos, 20 Agustus).

08 September

- DPR Papua menyepakati membahas empat rancangan peraturan daerah atau Raperda pada paripurna non-APBD dalam waktu dekat. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPR Papua, John NR Gobai mengatakan, kesepakatan itu diputuskan dalam rapat badan musyawarah (Banmus) DPR Papua. Empat Raperda yang akan dibahas dalam paripurna non- APBD merupakan usulan rancangan peraturan 2020, dan baru akan dibahas tahun ini. Empat Raperda yang akan dibahas DPRD, terdiri dari tiga rancangan peraturan daerah provinsi atau Perdasi dan satu rancangan peraturan daerah khusus atau Perdasus. Ketiga Repardasi, yakni Repardasi Penyelamatan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua, Repardasi Perubahan atas Perdasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Repardasi Perubahan Kedua atas Perdasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua. Sementara Repardasus yang akan dibahas, yaitu Repardasus Kampung Adat (Koran Jubi, 08 – 09 September).
- Kelompok kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) Provinsi Papua, memberikan apresiasi kepada Bupati Nduga, Wentius Numiangge atas tindakannya memberantas minuman beralkohol. Tindakan nyata sang bupati dianggap sebagai tindakan penyelamatan manusia Papua (Koran Jubi, 08 – 09 September).
- Ferdinand Okoseray mengatakan selama ini pihaknya kurang mendapat peran dalam perencanaan anggaran. Pemerintah tidak mengaggap Dewan Adat sebagai bagian dari masyarakat ada di Papua. Ferdinand Okoseray menyatakan pihaknya sering diabaikan pemerintah dalam proses perencanaan anggaran. *“Mungkin karena Dewan Adat tidak diatur dalam regulasi pemerintah kabupaten/kota sampai kampung. Dewan Adat kerap*

kali dilihat sebagai pelengkap dalam pertemuan-pertemuan di kampung, distrik dan kabupaten,” ungkapnya pada saat Pelatihan Memahami Perencanaan Penganggaran Daerah Provinsi Papua, yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit atau GIZ Pemerintah Jerman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 13 September (Koran Jubi, 15-16 September).

10 September

- Kelompok Kerja Agama (Pokja) Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan sosialisasi akan bahaya minuman beralkohol dan narkoba. Sosialisasi dilakukan melalui kunjungan kerja (kunker) pada Selasa lalu 07 – 09 September 2021 di Lapangan Mandiri RW III Kelurahan Imbi, Komplek Dok IX Imbi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura (Koran Jubi, 10-11 September).
- Menurut Mathius Fakhiri, menganggu pembangunan jalan di Papua sama saja menghambat pemerintah untuk membuka keterisolasian di daerah pegunungan. Hal ini diungkapkannya karena bertolak dari kejadian pembakaran satu unit truk dan dua unit alat berat milik PT. Wijaya Karya (Wika) di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang Kabupaten Pegunungan Bintang, Rabu (8/9). *“Selain itu pemerintah berusaha agar setiap jalan yang diperbaiki cepat diselesaikan, sebelum hari pelaksanaan PON XX di Papua Jayapura”*, ujar Kapolda Mathius Fakhiri (Harian Cepos, 10 September).

29 September

DPR dan Pemprov Papua menandatangani persetujuan bersama atas materi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran (TA) 2021. Penandatanganan

itu dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, bersama Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy dalam paripurna, Selasa 28 September 2021 (Koran Jubi, 29-30 September).

05 Oktober

Anggota DPD RI menyatakan akan menolak apabila RPP yang diusulkan pemerintah melemahkan UU Otsus Papua dan Papua Barat. Filep Wamafma, anggota DPD RI menyatakan RPP UU Otsus mesti memperkuat tiga substansi utama: kewenangan, afirmasi untuk orang asli Papua dan masyarakat adat Papua. *“RPP ini mengarah pada orang asli Papua dan masyarakat adat Papua, itu yang menjadi subjek utama. Orang asli Papua secara personal dan masyarakat adat sebagai komunal”* (Koran Jubi, 04 – 05 Oktober).

07 Oktober

Di periode pertama terhitung 12 kali menginjak provinsi paling timur ini. Menurut Presiden Jokowi bilang, sejak pertama kali ke Papua, ia melihat langsung ketimpangan pembangunan infrastruktur dibanding daerah lain di wilayah Indonesia Barat. *“Ketimpangan, terutama infrastruktur, konektivitas akan terus kita kejar. Agar Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian Timur memiliki sebuah persamaan, jangan sampai terlalu berbeda sekali”* (Koran Jubi, 06 – 07 Oktober).

16 Oktober

- Tokoh masyarakat adat Kabupaten Merauke. Johannes Gluba Gebze menyesalkan negara yang kerap menggunakan berbagai aturan untuk melemahkan hak-hak masyarakat adat demi kepentingan investasi (Koran Jubi, 15-16 Oktober).
- Pemerintah mencatat ada lebih 39 ribu penduduk miskin di Papua Barat. Situasi ini menjadi prioritas penyelesaian terhadap kemiskinan

ekstrem pada tahun ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, *“Pengurangan kemiskinan ekstrem untuk menekan tingkat kemiskinan sampai nol persen (di seluruh Indonesia) pada 2024. Tingkat (kategori) kemiskinan ekstrem mengacu kepada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni (berpendapatan) sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity/paritas daya beli) per kapita per hari”* (Koran Jubi, 15-16 Oktober).

19 Oktober

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdialog dengan tokoh masyarakat dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua membahas pengurangan kemiskinan ekstrem dan percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua. Ma'ruf menegaskan anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan sudah cukup besar. *“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama”* (Koran Jubi, 18 – 19 Oktober).

28 Oktober

- Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, pembangunan smelter di Gresik tidak hanya dikecam oleh seluruh masyarakat Papua dan lembaga cultural orang asli Papua (OAP), tetapi juga dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua. *“Masalah utama pemerintah bilang listrik kita tidak ada dan waktu itu pusat listrik mau dibangun tenaga air dari muara Paniai yang dibuang ke Kokonao, dan itu sudah disurvei dua kali oleh gubernur Papua dengan pihak pemerintah pusat, pihak perusahaan namun tidak ditindaklanjuti,”* kata Murib di kantor MRP, Selasa, 19 Oktober 2021 (Koran Jubi, 27 – 28 Oktober).
- Sebanyak 50 unit rumah permanen akan dibangun untuk masyarakat Asmat di Merauke. Rumah-rumah itu akan dibangun

di dua titik yakni di Jalan Onggatmit, Kelurahan Karang Indah, dan di samping Lantamal XI, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. *“Memang masyarakat Asmat yang menempati dua tempat tersebut selama ini, bukan tanah milik mereka, hanya menumpang tinggal dengan membangun rumah yang kondisinya sudah tak layak ditempati,”* jelas Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, Senin, 25 Oktober 2021 (Koran Jubi, 27 – 28 Oktober).

02 November

- Tokoh adat kabupaten Intan Jaya yang diwakili oleh Moses Belau merasa kesal dengan DPR Papua yang tidak menanggapi situasi yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, seperti kasus penembakan. Dia melihat bahwa DPR Papua dan MRP periode 2014-2019 jauh lebih baik dibandingkan dengan yang menduduki jabatan pada saat ini (Koran Jubi, 01 – 02 November).
- Dewan adat Papua mengkritik polemik smelter Freeport di Jawa Timur yang dibangun oleh PT FI, karena banyak pihak dari Papua yang meminta untuk membangun smelter di Papua. Sementara dewan adat menegaskan bahwa itu berpotensi untuk menjual tanah dan membuka jalan bagi investor asing yang ingin menimba hasil dari Papua (Koran Jubi, 01 – 02 November).

09 November

Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Jayawijaya terancam diusir dari kontraknya di Jakarta karena pemerintah daerah belum membayar dan memperpanjang kontrak sebagai tempat tinggal mahasiswa. Hal ini amat mengganggu kegiatan belajar dari para mahasiswa karena adanya desakan dari pemilik kontrak (Koran Jubi, 08 – 09 November).

01 Desember

Kepala Bappeda kabupaten Jayapura, Parson Horota mengatakan, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kepala Kebijakan Umum Anggaran-prioritas plafon Anggaran Sementara (KUA-PPS) diprioritaskan untuk menjawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura guna menuntaskan capaian pada 12 indikator. Salah satunya indikator makro yang mencakup Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian (Harian Cepas, 01 Desember).

22 Desember

Bupati Merauke Romanus Mbaraka bersama pimpinan DPRD Kabupaten Merauke melakukan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022 di Ruang sidang DPRD Kabupaten Merauke, Selasa, 21 Desember 2021. Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengungkapkan, penandatanganan KUA PPAS tersebut untuk belanja 2022 dan berharap semuanya bisa berjalan baik (Harian Cepas, 22 Desember).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

01 Juli

- Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat ini lebih fokus pada penyelesaian gangguan keamanan terkait kericuhan dan pembakaran fasilitas pemerintah di pusat kota Kabupaten Yalimo, Papua. Komisioner KPU RI Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan bahwa saat ini jajaran KPU Yalimo belum bisa berbuat banyak karena kantor KPU dan berbagai fasilitas pemerintah di Yalimo rusak pasca kebakaran. Kebakaran dan kerusakan fasilitas ini disebabkan masa pendukung Calon Bupati Erdi Dabi marah dan mengamuk karena MK mendiskualifikasi Erdi dari proses Pilkada (Harian Cepas, 1 Juli dan Koran Jubi, 30 Juni – 01 Juli).

- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Boven Digoel mengusulkan ke KPU RI untuk pemungutan suara ulang (PSU) yang sebelumnya ditetapkan pada 7 Juli diundur ke tanggal 17 Juli. Alasan pengunduran waktu ini adalah berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat yang dilakukan oleh KPUD dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan melihat ketersediaan logistik dan APD di kabupaten (Harian Cepas, 1 Juli).

02 Juli

- Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf. Arif Budi Situmeang, Kamis, 1 Juni 2021, menjelaskan bahwa kondisi keamanan di Elelim, Kabupaten Yalimo mulai kondusif. Walaupun demikian aparat keamanan baik TNI dan Polri masih berjaga di Elelim untuk menghindari konflik atau kejadian seperti sebelumnya. Menurut data yang dimiliki, sekitar 1.146 warga yang saat ini masih di tempat perlindungan (Koran Jubi, 02 – 03 Juli).
- Pihak Kodam XVII Cenderawasih siap membantu KPU untuk mengamankan proses Pilkada di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan oleh Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Igantius Yogo Triyono ketika menerima kunjungan kerja KPU RI yang diwakili oleh Komisioner KPU RI Pramono Tanthowi pada 30 Juni 2021, di Jayapura (Harian Cepas, 2 Juli).

03 Juli

Sejumlah tokoh dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Erdi Dabi, Kabupaten Yalimo ke Kantor KPU Provinsi Papua pada Jumat, 2 Juli 2021. Tujuan kedatangan mereka adalah mempertanyakan keputusan MK terhadap sengketa Pilkada Yalimo (Harian Cepas, 3 Juli).

05 Juli

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri

melakukan kunjungan ke Kabupaten Yalimo, Senin 5 Juli 2021. Tujuan kunjungan tersebut adalah bertemu dengan warga dan beberapa tokoh masyarakat di Yalimo terkait putusan MK tentang Pilkada Yalimo (Harian Cepas, 05 Juli).

Kebudayaan

01 Juli

- Peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto mengungkapkan bahwa hampir sebagian besar tempat-tempat sakral di Provinsi Papua belum mendapatkan perhatian dari Pemda setempat. Pada saat ini DPR Papua sedang menyiapkan draft Perda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pengembangan tempat-tempat sacral di Papua (Harian Cepas, 1 Juli).
- Ketua Pemuda Adat Port Numbay Rudi Mebri, merasa khawatir akan keberlangsungan suku-suku asli di Kota Jayapura. Berdasarkan riset dan data yang mereka miliki pada tahun 2014 silam, populasi orang Port Numbay hanya sebanyak 9.456 jiwa. Dia berharap pemerintah harus mengambil kebijakan ekstrim menjaga populasi warga asli Kota Jayapura (Koran Jubi, 30 Juni – 01 Juli).

Situasi Politik di Tanah Papua

01 Juli

Sejumlah warga yang tergabung dalam Komponen Merah Putih dan Komponen Pemuda Merah Putih Papua melakukan deklarasi dan menyampaikan pernyataan sikap terkait moment 01 Juli, di Obhe Kampung Sere Sentani, 30 Juni 2021. Koordinator Komponen Merah Putih Papua, Yanto Eluay mengatakan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI dan itu sudah final (Harian Cepas, 01 Juli dan Koran Jubi, 30 Juni – 01 Juli).

03 Desember

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak

Asasi Manusia (HAM) DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan pengibaran bendera bintang kejora (BK) pada enam daerah di Papua pada 1 Desember 2021, mesti menjadi refleksi semua pihak, terutama para pengambil kebijakan (Koran Jubi, 03 Desember).

31 Desember

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengatakan, Provinsi Papua sudah memasuki usia ke-72. Pada usia tersebut, sudah sepatutnya menjadikan Papua sebagai daerah yang siap menyambut perubahan, terbuka akan inovasi dan dewasa dalam bersinergi (Harian Cepos, 31 Desember).

Situasi Konflik Bersenjata dan Dampaknya serta Kekerasan terhadap Warga Sipil

17 Februari

Di Intan Jaya, Papua, tiga warga sipil kembali menjadi korban. Ketiganya meninggal dunia diduga lantaran dianiaya oknum aparat keamanan di Puskesmas Sugapa, Senin (15/2). Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Intan Jaya Martinus Maisini mengutuk tindakan tersebut. Ia menduga adanya kesalahan prosedur. *“Kami kesal dengan tindakan seperti ini yang terus menyiksa sipil dan ini membuat masyarakat menjadi trauma. Setidaknya kalau salah harus ditangkap dan melakukan pembinaan, bukan langsung disiksa hingga meninggal dunia,”* ungkap Martinus kepada Cendrawasih Pos melalui telepon selulernya, Selasa 16 Februari. Ketiga korban adalah Ganisu Bagau merupakan tenaga honorer di Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan kedua korban lainnya yaitu Soni Bagauw (16) dan Yustinus Bagauw (16) merupakan kakak beradik yang berada di pusat kota Sugapa. Menurut Martinus, sebenarnya Ganius Bagau merupakan korban pertama yang ditembak, lalu dia mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Sugapa. Dalam perawatan medis, Ganius ditemani dua adiknya. Namun saat malam hari datang

oknum anggota dan melakukan penyiksaan terhadap ketiganya hingga meninggal dunia. Ketiga jenazah telah diambil keluarga dan dimakamkan pada Selasa, 16 Februari. Akibat rentetan peristiwa di Kabupaten Intan Jaya sejak beberapa hari terakhir maka terjadi pengungsian besar-besaran di lima desa yang ada di Intan Jaya yakni Kampung Mamba, Bilogai, Kumbalawupa, Sambili dan Joparu. Sementara itu, data yang diterima Cendrawasih Pos menyebutkan tiga orang anggota KKSB dilumpuhkan aparat gabungan TNI-Polri karena berusaha merampas senjata aparat gabungan di Puskesmas Sugapa, Senin (15/2). Setelah dilakukan pengecekan dan dicocokkan dengan KTP yang didapatkan saat pemeriksaan, dapat dipastikan orang tersebut adalah Janius Bagau salah satu anggota KKSB yang sering melakukan aksi teror di Sugapa dan menjadi salah satu penandatangan surat pernyataan perang kepada TNI-Polri beberapa waktu lalu. Kapen Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa membenarkan kejadian tersebut. *“Janius Bagau dan Januarius Sani keduanya turut menandatangani surat pernyataan perang kepada TNI-Polri yang beberapa waktu lalu. Sudah dikordinasikan dengan Pemda setempat untuk pengurusan tiga jenazah KKSB itu”,* kata Suriastawa. Juru Bicara Sebby Sembom dalam rilisnya kepada Cendrawasih Pos, kemarin. Ia mengaku bahwa selalu mendapat konfirmasi dari pimpinan TPNPB di setiap wilayah perang bahwa pasukan TPNPB tidak ada yang menjadi korban. *“Dari sejumlah informasi yang dikumpulkan, Senin, 15 Februari 2021 siang Janius Bagau dievakuasi ke Puskesmas menggunakan mobil milik Bupati dari TKP di Amaesiga. Dalam mobil tersebut ada dua pemuda lain dari keluarga korban ikut serta untuk menjaga korban di Puskesmas sambil mendapat perawatan dari pihak medis. Kedua pemuda itu adalah Justinus Bagau dan Soni Bagau. Semua berasal dari satu keluarga. “Saat ketiga korban tersebut berada di Puskesmas, TNI datang pada malam hari lalu interogasi ketiganya sambil siksa dan pukul hingga meninggal dunia pada Senin, 15 Februari 2021 malam. Janius itu korban yang sebelumnya tertembak dari Amaesiga. Dua orang Soni dan Justinus*

itu sehat. Mereka ada di Puskesmas untuk jaga Janius. Tetapi mereka diperiksa dan diinterogasi lalu dipukul sampai ketiganya meninggal dunia di Puskesmas tadi malam,” bebrnya (Harian Cepos, 17 April).

25 April

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK, Minggu (25/4) dikabarkan meninggal dunia di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Kabar meninggalnya Kabinda Papua ini dikonfirmasi oleh Kapolda Papua, Irjenpol Mathius Fakhiri. Namun apa penyebabnya belum diketahui secara pasti. *“Memang benar Brigjen TNI Putu Dani yang menjabat Kabinda dilaporkan meninggal di Beoga namun hingga kini belum ada laporan lengkapnya,”* kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri diikuti Antara, Minggu (25/4/2021) (<https://jubi.co.id/kabinda-papua-dikabarkan-meninggal-dunia-di-beoga-papua/>).

27 April

Pihak Polri tak kerahkan personel tambahan ke Papua, khususnya Distrik Boega, lokasi insiden penembakan terhadap Kepala Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, pada Minggu, (25/4/2021). *“Sementara tidak, karena di sana selain kegiatan-kegiatan maupun operasi yang dilakukan oleh Polda Papua khusus Polri, Polri juga menggelar Operasi Nemangkawi 2021,”* ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, Selasa (27/4/2021). Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu Danny tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata pada 25 April 2021. Saat itu, Danny beserta tim menyambangi Distrik Boega untuk mengobservasi serta menentukan lokasi titik ambush (penyergapan) pasukan. Dia terkena tembakan di bagian kepala (<https://jubi.co.id/kepala-bin-papua-tertembak-polri-tak-kerahkan-personel-tambahan-ke-papua/>).

04 Juni

Kontak tembak antara kelompok bersenjata TPNPB dan TNI/Polri kembali terjadi di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat (4/6/2021). Tiga warga sipil dilaporkan meninggal dunia tertembak di Kampung Nipuralome itu, sementara tiga warga lainnya terluka. Sumber Jubi mengungkapkan kontak tembak di Kampung Nipuralome terjadi sejak pukul 05.00 WP. Kontak tembak yang dilaporkan terjadi di kawasan Kolam Merpati itu berlangsung sengit hingga sekitar pukul 07.00 WP. Ketiga warga sipil yang meninggal tertembak adalah Kepala Kampung Nipuralome yang bernama Patianus Kogoya (40), istri Patianus yang bernama Paitena Wakerkwa (35), dan seorang aparat Kampung Nipuralome bernama Erialek Kogoya (50). *“Mereka bertiga mati tertembak aparat keamanan pada pukul 06.00 WP,”* kata sumber Jubi. Jenazah ketiga korban itu langsung diperabukan di depan balai kampung di Nipuralome pada Jumat siang. Sepanjang Jumat siang, kontak tembak juga beberapa kali terdengar sampai di Kampung Eromaga yang berada di Distrik Omukia. Aktivis Hak Asasi Manusia Yones Douw yang dihubungi secara terpisah di Nabire menyatakan pihaknya juga telah menerima laporan bahwa ada tiga warga sipil di Ilaga yang tewas tertembak aparat keamanan pada Jumat. Ketiga warga itu adalah Patianus Kogoya, istri Patianus yang bernama Paitena Wakerkwa, dan seorang aparat Kampung Nipuralome bernama Erialek Kogoya (<https://jubi.co.id/kontak-tembak-kembali-terjadi-di-ilaga-papua-3-warga-sipil-tewas-3-terluka/>).

06 Juni

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy mendesak Presiden Joko Widodo segera menghentikan operasi keamanan di Papua. Operasi keamanan di sejumlah wilayah seperti Puncak, Nduga mau pun Sugapa, Intan Jaya telah berujung masyarakat sipil jadi korban. Peristiwa terbaru tertembaknya Kepala Kampung Nipuralome

Patianus Kogoya (40) bersama istrinya Paitenawa Wakerkwa (35) dan seorang aparat kampung Erialek Kogoya (50) jelas menunjukkan rakyat sipil senantiasa menjadi korban konflik. Ketiga korban tewas tertembak saat baku tembak aparat TNI/Polri dengan KKB atau TPNPB-OPM di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Puncak pada Jumat (4/6/2021) (<https://seputarpapua.com/view/warga-jadi-korban-presiden-didesak-hentikan-konflik-bersenjata-di-papua.html>).

27 Juni

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) hingga saat ini masih menjadi perhatian bagi Polda Papua. Karena itu dibentuk Satgas untuk menangani kelompok ini. Dari catatan Polda Papua ada sekitar 7 hingga 8 KKB yang ada di beberapa wilayah Papua diantaranya adalah KKB di Puncak Jaya, KKB Sinak yang dipimpin LK, KKB Ilaga yang dipimpin MM, KKB Timika dipimpin TB, Paniai dipimpin MY, Sugapa dipimpin AW, Lanny Jaya dipimpin TOW, dan KKB Nduga dipimpin TK. Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol. Paul Waterpauw, harus dilakukan penindakan hukum terhadap mereka karena mereka adalah kelompok yang bersenjata dan melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Paul Waterpauw dalam menyampaikan refleksi semester I tahun 2020 di Mapolda Papua pada Jumat (26/6) (Harian Cepos, 27 Juni).

07 Juli

Kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTb) perlu terus digerus. Tidak hanya terkait pasokan senjata yang harus dipangkas, upaya KKTb untuk merekrut anggota baru juga penting untuk dihentikan. Peningkatan jumlah anggota KKTb terbilang mengkhawatirkan (Harian Cepos, 07 Juli).

09 – 10 Juli

Pemerintah Kabupaten Puncak membuat upacara bakar batu babi di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, Papua, Kamis, 8 Juli 2021. Bupati

Puncak, Wiliam Wandik menyatakan, bakar batu itu menandai selesainya perang dan eskalasi konflik bersenjata yang terjadi di Puncak sejak akhir April lalu. Saat upacara bakar batu, terdengar sejumlah suara tembakan, hingga para peserta bakar batu sempat membubarkan diri (Koran Jubi, 09 – 10 Juli).

12 Juli

Kontak tembak antara personel gabungan TNI Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Tendius Gwijangge terjadi di Kali El Kampung Mosom Dua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Kontak tembak tersebut menyebabkan Briptu Keny Carlos Julian Kipuw mengalami luka tembak pada bagian perut bahwa (Harian Cepas, 12 Juli).

14 Juli

- Dua anggota TNI dari personel Yonif RK 751/vjs mengalami luka tembak dalam kontak tembak antara TNI dan kelompok separatis bersenjata di Mapenduma, Kabupaten Nduga. Pelaku penembakan diduga dari kelompok Eginus Kogoya (Harian Cepas, 14 Juli).
- Kepolisian Daerah Papua menyatakan situasi di Kabupaten Yahukimo Papua kondusif pasca kontak senjata antara personel gabungan TNI-Polri dengan kelompok bersenjata (Harian Cepas, 14 Juli).
- Jubir TPN PB Sebby Sembom meminta warga pendatang (non papua) untuk pergi atau keluar dari sejumlah daerah yang dijadikan basis pergerakan kelompok tersebut. jika tidak dilakukan maka ia meminta jangan menyalahkan kelompok mereka ada yang menjadi korban. Hanya saja statemen ini kemudian ditanggapi oleh Polda Papua yang meminta agar warga nusantara tidak terpengaruh karena semua daerah memiliki alat negara yang wajib mengamankan daerah dan rakyat (Harian Cepas, 14 Juli).

22 Juli

Sekitar 30 organisasi masyarakat sipil Indonesia mengancam perbuatan aparat negara yang melakukan tindakan kekerasan, penyiksaan dan apapun, yang merendahkan martabat seseorang, mengancam dan menghilangkan nyawa seseorang. Kecaman organisasi masyarakat sipil ini berkaitan dengan dugaan penembakan oleh oknum anggota TNI bernama Syarifudin atau Saryfudin, yang bertugas sebagai Babinsa Pos Ramil Asgon, Koramil 1707/Kepi terhadap warga sipil, Yosep Kamogou Samogoi (26 Tahun) di Kampung Kanami, Distrik Asgon, Kabupaten Mappi, Papua. Penembakan ini terjadi pada tanggal 16 Juli 2021, pukul 15.40 waktu setempat. Berdasarkan keterangan kerabat korban, penembakan ini berawal dari pemukulan Syarifudin kepada Anes Samogaoi (saudara korban) yang kemudian terjatuh. Upaya korban untuk menolong Anes direspon dengan tindakan penembakan menggunakan senjata api kepada korban. Saat itu menurut kerabat korban ini, terdengar dua kali tembakan. Tembakan pertama tidak mengenai korban, tembakan kedua mengenai paha kiri korban sehingga menimbulkan luka parah. Selain sebagai anggota TNI, masyarakat mengenal Syarifudin berperan dalam bisnis kayu gaharu di daerah setempat. Kedua korban berkerja sebagai pencari gaharu. Saat ini, korban Yosep Kamogou telah dirawat di RSUD Kabupaten Mappi. Keluarga korban berharap agar aparat penegak hukum segera bertindak menangkap dan memproses pelaku, memberikan sanksi hukum yang adil, serta korban dapat dipulihkan kesehatan dan hak-haknya. *“Pendekatan kekerasan oleh aparat negara (TNI-Polri) menjadi persolaan yang terus terjadi ditanah Papua. Tahun 2020 kekerasan dialami Marius Betera, dilakukan oaparat kepolisian Boven Digoel. Diduga akibat kekerasan ini korban meninggal dunia. Selang beberapa bulan kekerasan kembali terjadi kepada Oktovianus Betera yang dilakukan pasukan Satgas Pantas di Boven Digoel, korban juga meninggal dunia,”* tulis YL. Frangky, aktivis masyarakat sipil melalui pernyataan bersama masyarakat sipil

yang dikirimkan kepada Jubi, Minggu (19/7/2021) (<https://jubi.co.id/warga-sipil-tertembak-di-mappi-diduga-pelakunya-oknum-babinsa-pos-ramil/>).

23 Juli

Lima tahun masuk dalam DPO, OW alias UT anggota KKB yang berstatus narapidana di Lapas Abepura ditangkap Satgas Gakkum Ops Nemangkawi di Kampung Wandigobak, Kabupaten Puncak Jaya (Harian Cepas, 23 Juli).

28-29 Juli

- Salah satu warga Papua, Steven, seorang tunawicara yang diperlakukan sewenang-wenang oleh dua oknum anggota angkatan AU yang bertugas di Lanud JA Dimara-Merauke Provinsi Papua. Perlakuan terhadap Steven dengan menginjak kepada Steven (Koran Jubi, 28 – 29 Juli).
- Anggota polisi di Polres Sorong Selatan, Papua Barat berinisial OD diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu warga sipil Nikolas Kemerai yang berdomisili di Kampung Barat, Kabupaten Sorong Selatan (Koran Jubi, 28 – 29 Juli).

30 Juli

Adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 2 oknum (Serda A dan Serda V) anggota Lanud Merauke yang viral di media sosial yang berujung dicopotnya Komdan Lanud Merauke, Kolenel Hardy Arief Budyanto bersama Kepala POM AU menimbulkan pro kontra di masyarakat (Harian Cepas, 30 Juli).

30 – 31 Juli

- Penganiayaan terhadap penyandang disabilitas di Marauke menambah Panjang daftar kasus kekerasan oleh aparat militer di

Papua. Tindakan itu makin memperburuk citra Pemerintah Indonesia di mata publik termasuk warga sipil di Papua. Tindakan kedua oknum TNI AU itu dianggap lalai melaksanakan tugas secara kondusif (Koran Jubi, 30 – 31 Juli).

- Situasi di Kabupaten Puncak, Papua berangsur pulih pasca konflik bersenjata. Warga yang mengungsi sudah mulai memberanikan diri untuk kembali berkebun atau mengunjungi kampungnya. Walaupun demikian, warga masih tetap memilih untuk bermalam di tempat pengungsian. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak Peniel Wakerkwa saat dihubungi oleh Jubi, 29 Juni 2021 via telepon. Menurut Peniel, warga sipil juga masih takut mengungsi ke hutan karena di hutan banyak aparat keamanan yang berjaga (Koran Jubi, 30 Juni – 01 Juli).

05 Agustus

Pentingnya pemahaman budaya Papua bagi aparat keamanan. Menurut Ketua Aliansi Papua Penuh Damai (Papeda), Yulinaus, materi tentang psikologi dan pengenalan tentang budaya di Papua perlu diberikan kepada para aparat keamanan, terutama mereka yang datang dari luar dan bertugas di Papua. Ini penting kedepan perlu ditingkatkan lagi, sehingga tidak ada warga sipil yang menjadi korban akibat perlakuan oknum aparat TNI-Polri (Harian Cepos, 05 Agustus).

18 Agustus

Satu unit sawmill atau tempat penggeregajian kayu dan dua unit rumah warga yang berlokasi di Jalan Paradiso Belakang, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Selasa (17/8) dibakar sekitar pukul 06:00 WIT. Kapolres Yahukimo, AKBP Denny Hendriana menyebut, pelaku diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di wilayah tersebut (Harian Cepos, 18 Agustus).

22 Agustus

Ferianus Asso, korban luka tembak polisi pada aksi demonstrasi damai pembebasan Victor Yeimo di Kota Dekai, Yahukimo Papua, Senin, (16/7) dikabarkan meninggal dunia di RS. Bhayangkara, Jayapura dua hari setelah dirawat di rumah sakit tersebut. Ferianus dirujuk ke rumah sakit di Jayapura setelah dokter di RSUD. Yahukimo mengeluarkan dua butir peluru di tubuhnya. Setelah peluru dikeluarkan, Ferianus sempat dibawa pulang ke rumahnya karena keluarga khawatir jika dirawat di rumah sakit. Ruben Wakia, seorang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dikutip suarapapua.com, mengatakan pada tanggal 17 Agustus Ferianus sempat mengalami sesak nafas dan pingsan. Namun korban normal kembali sehingga keluarga tak jadi membawanya ke rumah sakit. Ferianus akhirnya dibawa kembali ke rumah sakit Yahukimo pada tanggal 20 Agustus karena perutnya membengkak. Diduga masih ada serpihan peluru dalam perutnya. Keluarga akhirnya sepakat mengikuti rujukan tim dokter di RSUD Yahukimo untuk membawa Ferianus ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Lanjut Ruben, pada tanggal 20 Agustus, sekitar pukul 15.00 waktu setempat Ferianus dibawa ke Jayapura kemudian dirawat di RS. Bhayangkara atas petunjuk Kapolres Yahukimo. Meski demikian, Ferianus akhirnya meninggal dunia di RS. Bhayangkara pada hari Minggu (22/8/2021) sekitar pukul 03.00 WP (<https://jubi.co.id/korban-tembakan-polisi-di-yahukimo-meninggal-dunia-di-rs-polisi/>).

24 Agustus

Komite Nasional Papua Barat mengajak keluarga mendiagnosa Ferianus Asso untuk melaporkan penembakan Ferianus Asso saat berdemonstrasi di Kabupaten Yahukimo, Papua, pada 16 Agustus 2021. Asso akhirnya meninggal pada Minggu (22/8/2021) setelah dirujuk ke RS Bhayangkara, Kota Jayapura, karena luka tembak yang dialaminya saat berunjuk rasa menuntut pembebasan juru bicara internasional KNPB,

Victor Yeimo. Hal itu dinyatakan Ketua Umum KNPB, Agus Kossay di Kota Jayapura, Selasa (24/8/2021). Kossay menyatakan KNPB meminta Kepala Kepolisian Resor Yahukimo mempertanggungjawabkan penembakan yang diduga dilakukan polisi saat menangani demonstrasi KNPB di Yahukimo pada 16 Agustus lalu. *“Dari sisi politik, kami akan kampanye. Akan tetapi, dari sisi hukum, kami [meminta] Kapolres Yahukimo diadili,”* kata Kossay. Ia menyatakan KNPB akan berkoordinasi dengan keluarga mending Ferianus Asso. KNPB juga meminta bantuan hukum Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua untuk melakukan advokasi litigasi perkara itu. *“Kami sudah kordinasi dengan teman-teman PAHAM Papua. Kami akan umumkan [perkembangan] upaya itu kepada publik,”* kata Kossay. Kossay menyatakan upaya untuk mengadukan dugaan pembunuhan atau kekerasan polisi akan dilakukan, karena polisi semakin kerap merepresi demonstrasi di Papua. Padahal demonstrasi secara damai merupakan bagian dari demokrasi dan kebebasan berekspresi rakyat Papua (<https://jubi.co.id/knpb-ingin-adukan-kasus-penembakan-demonstran-di-yahukimo-papua/>).

01 September

Antisipasi para aparat kepolisian ini terjadi diduga dan diperkirakan akan ada serangan dari kelompok KKB. Dugaan ini dilakukan karena empat orang dari KKB yang diamankan oleh pihak kepolisian. Hal ini dikatakan langsung oleh Dirkrimum Polda Papua Kombes Pol. Faisal Ramadhani saat dikonfirmasi Cendrawasi Pos, Selasa (31/8) (Harian Cepos, 01 September).

03 September

Senat Soll yang melarikan diri saat dibekuk polisi, karena aksinya ini aparat kepolisian melumpuhkannya. Kemudian ia dilarikan ke RSUD Dekai untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut data Kepolisian Senat Soll diduga dalang aksi teror di Kabupaten Yahukimo

di antaranya pembunuhan staf KPU Yahukimo Agustus tahun 2020 dan penyerangan terhadap dua anggota TNI di ujung Bandara Nop Goliat Dekai, 18 Mei 2021 (Harian Cepas, 03 September).

07 September

Simpatisan TPN-OPM menyerahkan sepucuk senjata api jenis M16 A1 kepada aparat TNI di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Jayapura, Minggu (5/9). Hal ini terjadi karena merupakan hasil dari pendekatan serta komunikasi sosial yang tepat yang dilakukan oleh pihak TNI, ujar Kolonel Arm Reza Nur Pa Tria (Harian Cepas, 7 September).

08 September

Ketua Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Manokwari-Sorong, Pastor Isak Bame Pr, mengatakan warga dari lima distrik di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, mengungsi pasca insiden penyerangan Pos Koramil Persiapan di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Maybrat. Pastor Isak meminta para pihak yang bertikai memastikan warga sipil tidak menjadi korban pertikaian mereka. Pastor Isak mengatakan ratusan warga yang mengungsi itu terpencar di dalam hutan, menghindari penyisiran aparat keamanan TNI/Polri yang tengah mencari para pelaku penyerangan Pos Koramil Persiapan di Kisor yang terjadi pada Kamis 2-9-2021 (Koran Jubi, 08 – 09 September).

09 September

Personel Koramil 1715 Batom dan warga yang tergabung dalam Linmas Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang menangkap dua anggota kelompok Sipil Bersenjata (KSB). Selain mengamankan kedua anggota KSB, aparat juga mengamankan lima pucuk senjata api. Penangkapan itu terjadi pada Selasa (7/9) tanpa ada perlawanan. Dalam wawancara dari kedua anggota KSB, mereka mengungkapkan bahwa senjata tersebut bukan senjata organik milik TNI Polri, melainkan

mereka mendapatkan dari jual beli senjata dari Bogenvile, PNG (Harian Cepos, 09 September).

10 September

Tim gabungan TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata penyerang Posramil Kisor Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Juru bicara Kodam VXIII/Kasuari, Kolonel Hendra Pesireron, mengatakan tim gabungan sudah menduduki sejumlah perkampungan warga yang sempat menjadi lokasi teror kelompok bersenjata tersebut (Koran Jubi, 10 – 11 September).

14 September

Pada Senin, (13/9) terjadi konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan KKB kembali pecah di Distrik Kiwirok, Kabupaten Bintang, Papua. Selain baku tembak dengan aparat keamanan, insiden tersebut juga menyebabkan sejumlah fasilitas publik terbakar seperti puskesmas, kantor kas BPD Papua, dan gedung sekolah dasar. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito mengatakan, insiden baku tembak antara KKB dengan aparat gabungan TNI dan Polri terjadi pada Senin sekitar pukul 09.30 WIT. Akibatnya, seorang anggota TNI bernama Prada Ansar mengalami luka tembak di bagian lengan kanan. Namun demikian, kondisi korban diketahui stabil dan telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Adapun KKB yang terlibat baku tembak tersebut diduga pimpinan Lamek Tablo. Korban yang lainnya adalah petugas kesehatan di Kiwirok, salah satunya meninggal dunia akibat peristiwa ini, yakni Gabriela Meilani. Kesembilan petugas kesehatan sudah dievakuasi ke Jayapura yakni dr. Restu Pamanggi, Marselinus Ola Attanila, Manuel Abi, Martinus Deni Satya, Lukas Luji, Patra, Siti Khodijah, Katrianti Tandila, dan Christina Sampetonapa. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh SKPKC Fransiskan Papua dan Petugas Pastoral di Dekenat Pegunungan Bintang, pasca konflik baku tembak ini banyak

warga yang mengungsi ke luar Kiwirok. Selain itu terjadi pendropan pasukan militer dan banyak fasilitas umum rusak dan terbakar. (<https://kabar24.bisnis.com/read/20210914/16/1442150/konflik-kkb-di-papua-tak-kunjung-usai-mpr-singgung-penanganan-aparat>, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/20/120200423fakta-penyerangan-dan-penembakan-nakes-di-papua-1-orang-meninggal?page=2>, <https://jubi.co.id/papua-satu-nakes-kiwirok-hilang-ada-di-markas-tpnpb-opm/>).

16 September

Terkendala Cuaca, Nakes di Kiwirok belum Dievakuasi. Tim gabungan TNI Polri belum mengevakuasi tenaga Kesehatan dan guru dari Distrik Kiwirok menuju Jayapura. Pasalnya helikopter milik TNI belum bisa menjangkau Distrik Kiwirok karena cuaca yang buruk. Karena cuaca yang buruk, maka direncanakan evakuasi akan dilakukan hari Kamis (16/9) pagi di mana pesawat terbang dari Sentani menuju Distrik Kiwirok untuk mengevakuasi korban-korban, ungkap Komandan Korem 172 PWY, Brigjen TNI Izak Pengemanan kepada Cendrawasi Pos, Rabu (15/9). Tenaga Kesehatan diperkirakan 12 orang, namun salah satu di antara mereka sudah izin turun ke Jayapura dan yang tersisah 11. Dari 11 orang ini 8 orang telah diselamatkan di pos, sedangkan 2 orang lainnya berada di jurang dan satu orang belum ditemukan (Harian Cepas, 16 September).

17 September

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Irjen Tornagogo Sihombing, memerintahkan seluruh Polres menyebarkan foto beserta identitas Daftar Pencarian Orang penyerangan Posramil Kisor, Maybrat sampai ke pelosok provinsi. *"Foto-foto DPO pelaku tindak pidana penyerangan Posramil Kisor yang menyebabkan gugurnya 4 personil TNI AD pada 2-9-2021 harus disebar sampai ke pelosok daerah ini."* Selanjutnya, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi,

mengatakan perintah pimpinan Polda Papua Barat ini sebagai bentuk keseriusan polisi bersama TNI terus memburu para pelaku penyerangan tersebut (Koran Jubi, 17 – 18 September).

18 September

Anggota Satgas Pamtas Gabungan berusaha melakukan evakuasi jenazah Gabriella Meilani, dari jurang kedalaman sekitar 300 meter dengan kemiringan 90 derajat. Proses evakuasi ini dilakukan oleh 10 Personil Satgas Pamtas yang turun ke jurang tempat jenazah itu ada. Saat proses pengevakuasi anggota Satgas ditembaki dari arah ketinggian oleh KKB, Jumat (17/9) (Harian Cepos, 18 September).

20 September

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua menyatakan peristiwa di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) mencedraikan kemanusiaan. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyatakan siapapun pelaku pembakaran puskesmas, gedung sekolah dasar, dan beberapa bangunan lain di sana, aksi itu tidak dibenarkan. Apalagi selain membakar sejumlah fasilitas publik, seorang tenaga kesehatan (Nakes) wafat dalam peristiwa itu. Beberapa lainnya dianiyah kelompok terduga pelaku. *“Atas nama kemanusiaan, Komnas Perwakilan Papua menyampaikan duka cita mendalam. Tindakan ini mencederai kemanusiaan, karena selain membakar fasilitas publik juga mengintimidasi Nakes. Bahkan ada Nakes yang wafat”* (Koran Jubi, 20 – 21 September).
- Menjelang satu tahun kematian Pendeta Yerimia Zanambi, yang tewas setelah ditembak di Distrik Hitadipa, Intan Jaya 19 September 2020, Dian Maria Danomira salah satu aktivis muda dan pemerhati budaya Papua mengenangnya dengan sedih. *“Banyak yang merasakan hal-hal seperti saya terutama anak-anak muda Papua. Anak-anak*

Papua sangat berpegang teguh dengan kitabnya, tokoh-tokoh yang ada di gereja” (Koran Jubi, 20 – 21 September).

- Pihak Polres Jayawijaya memusnahkan sekitar 850 senjata tajam sitaan dari sejumlah operasi penertiban sejak 2019. Pemusnahan senjata turut disaksikan pemuka masyarakat setempat (Koran Jubi, 20 – 21 September).

24 September

Anggota Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua atau MRP, Pdt. Nikolaus Degei menilai berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua sejak awal tahun 1960-an terjadi karena berbagai kepentingan ekonomi dari kelompok elit Papua. Kepentingan ekonomi berbagai kelompok elit itu pula yang membuat kekerasan baru terus terjadi di Papua, dan konflik di Papua tidak kunjung diselesaikan (Koran Jubi, 20 – 21 September).

27 September

- TPN PB Kodap XV Ngalum Kupel di bawah pimpinan Panglima Kodap XV Ngalum Kupel Brigadir Jendral Lamek Alipky Taplo, mengakui pihaknya telah menembak mati sorang militer Indonesia yang diketahui bernama Muhammad Kurniadi dari satuan Brimob, pada Minggu, 26 September 2021. *“Hari ini (pagi), Minggu, kami sudah tembak mati pasukan TNI-Polri. Pokoknya satu orang kami sudah tembak, dan sekitar dua orang luka-luka. Tapi kami belum bisa pastikan soal berapa yang mati, berapa yang luka, itu urasn mereka”* (Koran Jubi, 27 – 28 September).
- Sedikitnya seribu warga dari ibu kota Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua mengungsi ke daerah terdekat yang dianggap aman. Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, mengatakan situasi di Distrik Kiwirok tidak kondusif pascapembakaran sejumlah fasilitas umum oleh kelompok

bersenjata pada 13, September 2021. *“Kalau (pengungsi) dari ibu kota distrik itu kurang lebih 400 di Distrik Oklip, sekitar 100 di Oksibil, terus yang lain itu ada di Oksebang, terus ada yang masih di hutan sehingga diperkirakan jumlah pengungsi itu sekitar 1.000 orang”* (Koran Jubi, 27 – 28 September).

- Salah satu tenaga medis kesehatan Puskesmas Kiwirok yang selamat dari insiden kontak tembak di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Geral Sokoy mengatakan, *“kitong mau lari keluar, tapi takut, jadi kami tinggal di dalam rumah saja. Karena sudah takut sekali, saya keluar, lari saja keluar, lompat ke jurang. Sempat dengar juga, ada bunyi tembakan dari dalam rumah sendiri, dari dalam kitong punya rumah”* (Koran Jubi, 27 – 28 September).

28 September

Pada hari Minggu tanggal (26/9), pemimpin KKB Senat Soll meninggal dunia, di rumah sakit Bayangkara, selama menjalani perawatan di rumah sakit selama 24 hari. Pukul 22.30 WIT, kondisi Senat Soll semakin memburuk sehingga dilakukan pemasangan inkubasi. Pada pukul 22.50 WIT, tim medis menyatakan tersangka Senat Soll dijemput oleh maut (Harian Cepas, 28 September).

29 September

- Kontak tembak antara Satgas dan KKB, kembali terjadi lagi di Distrik kiwirok, Kabupaten pegunungan Bintang, Selasa (28/9). Dalam kontak tembak tersebut satu anggota Polri bernama Iptu Budi Basra mengalami luka tembak (Harian Cepas, 29 September).
- Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobai berharap rencana Polda Papua Memanggil Gerald Sokoy harus sesuai prosedur. Gerald Sokoy merupakan tenaga kesehatan (Nakes), yang keberadaannya sempat tidak diketahui pasca kejadian di Kiwirok, 13 September 2021. Bupati Pegunungan Bintang, Spei

Yan Bidana telah menyerahkan Sokoy kepada keluarganya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Sabtu (25/9). Akan tetapi, belakangan Polda Papua berencana memanggil Gerald Sokoy untuk dimintai keterangan berkaitan dengan peristiwa pembakaran sejumlah fasilitas umum di Kiwirok (Koran Jubi, 29 – 30 September).

04 Oktober

Dekai Rusuh, 6 warga tewas, 41 terluka dan 1.000 orang mengamankan diri di Mapolres Yahukimo. Kerusuhan ini terjadi di Dekai Ibukota Kabupaten Yahukimo, akibat kerusuhan tersebut 6 warga dilaporkan tewas, dan 42 orang luka-luka termasuk diantaranya satu anggota Polri (Harian Cepos, 04 Oktober).

15 Oktober

Seorang warga sipil bernama Surya Wenda dinyatakan meninggal akibat terkena tembakan, pada Selasa (12/10) malam, di Jalan Patimura Atas, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Korban meninggal akibat terkena tembakan yang diduga dikeluarkan oleh anggota Brimob yang bertugas di Wamena, yang pada saat kejadian membela diri akibat dilempar sekelompok warga di sekitar lokasi kejadian. Pada Jumat (15/10/2021), Kepolisian Resor Jayawijaya melakukan pertemuan guna penyelesaian kasus tersebut, dengan menghadirkan keluarga korban meninggal maupun korban luka, untuk mencari tahu persoalan sebenarnya. Dalam pertemuan itu, dihadirkan pula saksi-saksi yang saat kejadian berada di lokasi. Seorang saksi berinisial GK menyebut memang terjadi suara tembakan yang dilakukan aparat. *“Ada tiga kali tembakan ke arah atas, dan ada juga tembakan mengarah ke massa,”* kata GK, Jumat (15/10/2021). Hal itu bermula ketika adanya ucapan syukur atas wisuda seorang warga bernama Novita Matuan, bertempat di Jalan Patimura Atas, dan dalam kegiatan itu juga digelar acara bergoyang. Namun dari pengakuan Novita Matuan, acara itu hanya dihadiri

keluarga tanpa mengundang pihak luar, sehingga dengan adanya penembakan itu, ia mengaku tidak mengetahui sumber permasalahannya (<https://jubi.co.id/seorang-warga-sipil-di-wamena-meninggal-dunia-akibat-tertembak/>).

23 Oktober

Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan perwakilan wilayah adat Meepago, John NR Gobai meminta Polisi Militer Kodam (Pomdam) XVII Cenderawasih segera menyampaikan ke publik, hasil investigasi dugaan hilangnya seorang warga di Kabupaten Intan Jaya beberapa waktu lalu. Sebab, seorang warga bernama Sem Kobogau (51 tahun) diduga hilang sejak 5 Oktober 2021 lalu (Koran Jubi, 22 – 23 Oktober).

26 Oktober

Ketua Pansus DPR Papua, John NR Gobai berpendapat perlu ada tim independen menginvestigasi hilangnya beberapa warga di Kabupaten Intan Jaya, dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan hingga kini tiga warga Intan Jaya dinyatakan hilang. Dua pemuda, Luther Zanambani dan Apinus Zanambani dinyatakan hilang sejak April 2020 (Koran Jubi, 25 – 26 Oktober).

28 Oktober

- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua meminta pemerintah dan Palang Merah Indonesia atau PMI turun tangan menangani warga sipil yang mengungsi karena konflik bersenjata di sejumlah wilayah Tanah Papua. Direktur LBH Pers, Emanuel Gobay berharap Komnas HAM perwakilan Papua memantau kondisi pengungsi serta penanganan pengungsi oleh pemerintah dan PMI (Koran Jubi, 27 – 28 Oktober).
- Kontak tembak TNI-Polri dengan TPN PB kembali terjadi di

Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dilaporkan bahwa seorang bocah tewas tertembak dan satu prajurit TNI terluka (Harian Cepas, 28 Oktober).

- Ribuan warga Distrik Okika dan Kiwirok masih mengungsi. Tak bisa dipungkiri ada ribuan warga Kabupaten Pengunungan Bintang yang sedang mengungsi di dalam hutan pasca konflik yang terjadi di daerahnya (Harian Cepas, 28 Oktober).

30 Oktober

- Warga sipil dari empat kampung di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua tengah mengungsi pasca kontak tembak antara TNI Polri dengan TPN PB. Kontak tembak ini mengakibatkan satu anggota TNI terluka, serta dua anak menjadi korban satu selamat dan satu meninggal dunia, Rabu (26/10) (Koran Jubi, 29 – 30 Oktober).
- Majelis Rakyat Papua menggelar Rapat Koordinasi dengan Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam XVII/Cendrawasih dan Kepala Kepolisian Daerah Papua di Kota Jayapura, Kamis (28/10). Rapat itu membahas eskalasi kekerasan di Tanah Papua. Menurut MRP negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan rasa kenyamanan dan kedamaian bagi rakyat. *“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan solusi bersama dan menciptakan kedamaian di Tanah Papua (sebagai) rumah bersama,”* ungkap Timotius Murib (Koran Jubi, 29 – 30 Oktober).

31 Oktober

Lembaga Bantuan Hukum Papua mengecam keras konflik antara TPN PB dengan TNI Polri yang menyebabkan meninggalnya warga sipil, di Intan Jaya, Papua. Pihak LBH Papua menilai hal ini menunjukkan bahwa negara masih gagal melindungi warga. *“Fakta adanya masyarakat sipil yang menjadi korban penembakan menunjukkan nihilnya perlindungan*

di tengah konflik bersenjata,” ujar Direktur LBH Papua Emanuel Gobay, dalam keterangan tertulis, Ahad, 31 Oktober 2021. Sebelumnya, diketahui eskalasi di Intan Jaya kembali memanaskan antara kelompok pro kemerdekaan Papua dengan TNI-Polri. Aksi baku tembak terjadi hingga dikabarkan menyebabkan dua balita ikut tertembak. Satu di antaranya disebut meninggal. Emanuel mengatakan perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata merupakan tanggung jawab Negara. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4), Konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia ke dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (<https://nasional.tempo.co/read/1523114/lbh-nilai-negara-gagal-lindungi-korban-konflik-di-papua>).

02 November

- Pembakaran kantor Airnav di Sugapa oleh anggota KKB, karena merasa bahwa pejabat pemerintah selalu melarikan diri dari Intan Jaya ketika ada situasi-situasi buruk yang terjadi. Mereka mengharapkan supaya pihak pemerintah harus hadir dan selalu ada bersama masyarakat. Pastor Paroki Titigi Pastor Yance Yogi, Pr dan Pastor Frans Sondegau, Pr, bersama Melianus Belau (anggota DPRD Intan Jaya) berhasil menyelamatkan enam orang yang terjebak di kantor Bandara sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini (Koran Jubi, 01 – 02 November).
- Sugapa, Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya masih seperti kota mati pasca tragedy penembakan yang menewaskan anak kecil pada 26 Oktober 2021. Dan bahkan sampai tanggal ini masih ada kontak tembak yang menyebabkan aktivitas masyarakat terhambat dan banyak yang mengungsi (Harian Cepos, 02 November).
- Nathan Pahabol yang merupakan Sekretaris Komisi V DPR Papua, mengakui bahwa akibat konflik antar TNI-POLRI dan TPM-OPM di beberapa daerah seperti, Intan Jaya, Pegunungan Blintang, Nduga

dan beberapa daerah lain di Papua mengakibatkan adanya darurat pendidikan, anak-anak merasa trauma dan takut serta sekolah ditutup dan para pengajar pun tidak selalu hadir (Harian Cepas, 02 November).

08 November

- Kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok bersenjata kembali terjadi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Jumat, 05 November 2021. Insiden tersebut mengakibatkan satu anggota KKB tewas, dua anggota terkena rekaset dan satu warga sipil terkena peluru aparat (Harian Cepas, 08 November).
- Dua anggota TNI dan dua anggota polisi ditembak oleh TPNPB dalam kontak senjata di Sugapa, Intan Jaya, 07 November 2021. Selain itu juga ada dua anggota TPNPB yang meninggal dalam konflik senjata tersebut (<https://suarapapua.com/2021/11/08/5-7-november-tpnpb-tembak-dua-anggota-tni-dan-dua-anggota-polisi/>).

09 November

Peristiwa penembakan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Selasa 09 November 2021. Kali ini, seorang mama menjadi korban penembakan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Mamba merupakan daerah perkantoran pemerintahan yang dialihfungsikan menjadi tempat pos aparat keamanan di Sugapa. Mama Agustina Hondau (24) adalah warga sipil dari Kampung Dibuga. Ia berada bepergian ke Yokatapa untuk belanja bahan makanan bersama sejumlah mama lainnya. Ia tertembak di Kampung Mamba saat dalam perjalanan pulang ke Dibuga. Seorang warga Intan Jaya yang enggan disebutkan namanya mengatakan Agustina Hondau mengalami luka tembak serius di bagian kanan perut, persis di bawah tulang rusuknya (<https://jubi.co.id/mama-yang-tertembak-di-intan-jaya-papua-akan-dirujuk-ke-timika/>).

10 November

- Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia berharap bahwa dengan terpilihnya Panglima TNI yang baru dapat memberikan dampak positif bagi Papua dan terutama Komnas HAM meminta agar Jendral Andika dapat memberikan klarifikasi terkait rumor bahwa dirinya terlibat dalam kasus penculikan Theys Hiyo Eluay (Harian Cepas, 10 November).
- Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas meminta para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Papua tidak mengorbankan warga sipil. Legislator RI dari daerah pemilihan Papua itu menyatakan, pihak yang berkonflik mesti menghentikan penembakan terhadap warga sipil di Papua. Pernyataan itu dikatakan berkaitan dengan penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya, Papua pada Selasa (09/11). Mandenas mengatakan, berdasarkan pemberitaan media korban tertembak di pelipis dan pinggang hingga tembus ke perut. Berdasarkan keterangan salah seorang saksi, ada dugaan pelaku penembakan adalah oknum TNI (<https://jubi.co.id/yan-mandenas-hentikan-penembakan-terhadap-warga-sipil-di-papua/>).

11 November

Solidaritas Rakyat Papua Tolak Kekerasan Negara melakukan jumpa pers di Kantor LBH Papua, Abepura, Kota Jayapura. Pertemuan ini kembali mengkritisi situasi pengungsian di Papua dari tahun 2018-2021 mencapai 50 ribu pengungsi dan 300 orang tewas (Koran Jubi, 10 – 11 November).

12 November

Ratusan Pastor Katolik se-tanah Papua menggelar Konferensi Pers untuk menyuarakan keadilan, kemanusiaan, kebenaran dan keselamatan orang asli Papua serta menanggapi konflik bersenjata di

Papua yang mengorbankan warga sipil. Pertemuan ini dilaksanakan di Aula Paroki Kristus Terang Dunia Waena pada 11/11/2021 (Harian Cepos, 12 November).

13 November

Seorang anak bernama Evelina Aimaui yang berasal dari Distrik Aifat, Kabuapten Maybrat, Papua Barat meninggal pada Senin, 8 November 2021 saat mengungsi di hutan pasca penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor (2/11/2021). Korban meninggal karena sakit (Koran Jubi, 12 – 13 November).

15 November

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa kunjungan Jokowi sebagai Presiden RI ke Papua pada satu bulan terakhir tidak sedikit pun menyinggung soal pengungsi yang ada di Kabupaten Pegunungan, sehingga Jokowi dianggap tidak mampu melindungi masyarakat Papua (Harian Cepos, 15 November).

19 November

Kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dan TPN PB kembali terjadi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Kamis (18/11). Pihak TPN PB mengklaim bahwa mereka menembak lima anggota TNI Polri. Namun klaim itu dibantah oleh Komando Daerah Militer atau Kodam XVII/Cenderawasih. Kontak tembak antara TNI Polri dan TPN PB kembali terjadi di Distrik Sugapa pada Kamis sekitar pukul 08.30 – 10.50 WP. Juru bicara TPN PB, Sebby Sambom menyatakan serangan TPN PB pada Kamis itu dilakukan oleh pasukan Komandan Operasi Kodap 8 Intan Jaya, Ondius Kogeya. Sambom mengklaim sejumlah lima prajurit TNI terluka dalam kontak tembak pada Kamis. *“Kami berhasil tembak lima anggota TNI/Polri, empat tewas dan seorang luka-luka,”* kata Sambom kepada Jubi, Kamis malam (<https://jubi.co.id/kontak-tembak->

terjadi-lagi-di-intan-jaya-tni-bantah-klaim-tpnpb/).

20 November

Saat mengunjungi korban penembakan di Intan Jaya, Ibu Agustina mengaku kepada Komnas HAM Papua bahwa saat dirinya ditembak tidak ada situasi kontak tembak antar kelompok bersenjata dan pihak TNI Polri (Harian Cepos, 20 November).

22 November

Juru Bicara TPN PB, Sebby Sambom menyatakan pasukan Komando Daerah Pertahanan XVI Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan seorang prajurit TNI di Suru-suru, Kabupaten Yahukimo, Papua, pada Sabtu, 20 November 2021. Sambom juga mengumumkan Yahukimo sebagai zona perang, dan menyampaikan empat ultimatum Elkius Kobak. Hal itu dinyatakan Sambom kepada Jubi pada Senin (22/11). *“Manajemen Markas Pusat TPNPB-OPM telah terima laporan resmi dari pimpinan Kodap XVI Yahukimo. Mereka bertanggungjawab atas penembakan yang menewaskan seorang anggota TNI dan seorang lagi luka,”* tulis Sebby Sambom. Sambom menyatakan pasukan Elkius Kobak melakukan penembakan itu pada Sabtu, sekitar pukul 08.00 Waktu setempat. Sambom menjelaskan Suru-suru merupakan wilayah perang Batalion Yamue yang dipimpin Kopy Tua Heluka yang melakukan penembakan itu. Menurut Sebby Sambom, Elkius Kobak juga menetapkan Yahukimo adalah wilayah perang untuk merebut kemerdekaan Papua. *“Perang tetap berlanjut sampai kita merebut kemerdekaan Papua,”* kata Sambom (<https://jubi.co.id/umumkan-yahukimo-sebagai-zona-perang-tpnpb-keluarkan-4-ultimatum/>).

23 November

Tanggal 20 November merupakan Hari Raya anak sedunia yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak

Anak pada tanggal 20 November 1995. Namun, LBH menegaskan bahwa anak-anak Papua hidup dalam ketakutan karena konflik berkepanjangan di berbagai tempat di Papua, seperti dalam pengungsian di Kabupaten Nduga tahun 2018-2021, kabupaten Intan Jaya dari tahun 2019-2021, kabupaten Puncak Papua dari awal tahun 2021 dan kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2021 (Koran Jubi Edisi 22-23 November 2021).

Komnas HAM perwakilan Papua mengalami kesulitan memasuki daerah Kiwirok karena alasan keamanan. Komnas HAM ingin melihat secara langsung tempat kejadian insiden pembakaran tempat layanan Publik yang mengakibatkan satu orang petugas kesehatan meninggal dunia (Koran Jubi, 22 – 23 November).

25 November

Warga di Distrik Suru-suru Kabupaten Yahukimo dikabarkan kembali mengungsi di hutan pasca penembakan dua anggota TNI dari satuan BKO aparat teritorial (Apter) Koramil Persiapan Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo yang dilakukan oleh KKB pada 20 November 2021 (Harian Cepos, 25 November).

26 November

- MRP dan Komnas HAM Perempuan menggelar lokakarya membahas perlindungan terhadap perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS yang berada di wilayah konflik pada Rabu, 17 November 2021 di Jayapura (Koran Jubi, 26 – 27 November).
- Dewan Gereja Papua mengeluarkan 13 poin seruan moral kepada Pemerintah Indonesia dan masyarakat Internasional (PBB) untuk turun tangan menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Seruan moral ini dikeluarkan di Kota Jayapura, 25 November 2021 (Koran Jubi, 26 – 27 November).
- Dewan Gereja Papua menyebut sekitar 60 ribu penduduk Papua

mengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI Polri dengan TPN PB yang masih terjadi di enam kabupaten. Anggota Dewan Gereja Papua, Pendeta Benny Giay mengatakan pihaknya mencatat, memasuki pertengahan November 2021 pemerintah semakin gencar melakukan politik rasisme, kriminalisasi, marjinalisasi, dan militerisme dalam menangani konflik Papua. *“Sekitar 60 ribu orang lebih umat Tuhan telah mengungsi,”* kata Benny dan tiga pendeta lainnya sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (26/11). Benny mengatakan pada 21 November, konflik antara TNI Polri dengan TPN PB masih terjadi di enam kabupaten, yakni Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Maybrat, dan Puncak Papua. Menurut Benny, aparat gabungan TNI Polri masih menyisir pemukiman warga sipil dengan alasan mencari anggota TPN PB. Akibatnya, banyak warga Papua memilih mengungsi di hutan maupun kabupaten tetangga (<https://www.cnnindonesia.com nasional/20211126114005-20-726387/dewan-gereja-papua-60-ribu-orang-mengungsi-akibat-konflik-bersenjata>)

29 November

- Temius Magayang, yang tercatat dalam daftar pencarian orang karena diduga sebagai dalang beberapa aksi teror di Kabupaten Yahukimo ditangkap oleh personel gabungan Satgas Nemangkawi dan Polres Yahukimo di Dekai, Yahukimo. Temius Magayangpun dicegat oleh anggotan gabungan dengan menggunakan dua peluru timah yang menyebabkan korban luka pada bagian lutut (Harian Cepos, 29 November).
- Sebanyak 46 orang tewas dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Papua selama 2021. Kepala Kepolisian Daerah Papua Papua, Mathius D Fakhiri mengatakan korban merupakan warga sipil, aparat keamanan dan anggota

kelompok bersenjata. Dari 29 kasus yang dilakukan kelompok bersenjata tahun ini, berada pada lima kabupaten yang merupakan wilayah potens konflik. Yakni meliputi daerah Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Mathius mengatakan, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yahukimo sebelumnya tidak masuk dalam kategori daerah rawan konflik bersenjata. Akan tetapi belakangan situasi keamanan di sana mulai berubah (https://kbr.id/nusantara/12-2021/selama_2021__46_orang_tewas_akibat_konflik_bersenjata_di_papua/107222.html)

03 Desember

Delapan bulan pasca tewasnya dua warga Intan Jaya Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membuka kembali proses penyidikan terhadap kasus yang terjadi April 2021 lalu. Sebelumnya dalam kasus tersebut, sembilan orang anggota TNI menjadi tersangka karena membakar dua jenazah warga Hitadipa tersebut. Panglima Andika Perkasa menyebutkan, dalam kasus tewasnya dua warga tersebut, sudah ada dua oknum TNI yang sudah diproses hukum dan memiliki kekuatan hukum (Harian Cepos, 03 Desember).

16 Desember

Anggota DPR RI asal Papua Yan P. Mandenas meminta kepada pihak-pihak yang berkonflik di Papua agar segera mengakhiri konflik dan lebih baik fokus terhadap bagaimana membangkitkan perekonomian masyarakat Papua. Hal ini ditegaskan Mandenas ketika menjadi bintang tamu pada program Ngopi Bareng Redaksi Cenderawasih Pos di gedung Graha Pena, Rabu, 15 Desember (Harian Cepos, 16 Desember).

17 – 18 Desember

Pekerja Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Meepago, Yones

Douw menyatakan keluarga korban peristiwa Paniai berdarah, menyurati Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Katanya, surat itu ditandatangani keluarga empat siswa SMA yang tewas dan saksi korban dalam peristiwa 8 Desember 2014 silam itu (Koran Jubi, 17 – 18 Desember).

24 Desember

Sepanjang tahun 2021, terjadi 92 kasus kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua. Jumlah ini meningkat drastis bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 49 kasus. Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menerangkan, 92 kasus aksi KKB tersebut terbesar di lima kabupaten di Papua yaitu Yahukimo, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak dan Nduga. Aksi KKB tersebut menyebabkan aparat keamanan dan warga korban (Harian Cepos, 24 Desember).

29 Desember

Sebanyak 46 orang tewas dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Papua selama 2021. Kepala Kepolisian Daerah, Irjen Pol. Mathius D Fakhiri mengatakan korban merupakan warga sipil, aparat keamanan dan anggota kelompok bersenjata. Kata dia, dari 29 kasus yang dilakukan kelompok bersenjata tahun ini, berada pada lima kabupaten yang merupakan wilayah potensi konflik. Yakni meliputi daerah Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Mathius mengatakan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yahukimo sebelumnya tidak masuk dalam kategori daerah rawan konflik bersenjata. Akan tetapi belakang situasi keamanan di sana mulai berubah. Dia merinci, korban tewas dari kalangan warga sipil sebanyak sebanyak 19 orang, prajurit TNI 11 orang, anggota Polri empat orang dan kelompok bersenjata 12 orang (https://kbr.id/nusantara/122021/selama_2021__46_orang_tewas_akibat_konflik_bersenjata_di_papua/107222.html).

Politik Papua Merdeka

05 Juli

Juru Bicara TPN PB, Sebby Sambom melalui keterangan persnya pada Kamis, 01 Juli 2021, menjelaskan bahwa dalam memperingati 50 tahun deklarasi kemerdekaan Papua pada 01 Juli 2021, pihaknya telah meluncurkan kampanye internasional yang meminta Dewan Keamanan PBB mengintervensi kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua (Koran Jubi, 05 – 06 Juli).

09 Juli

Situasi politik di Papua sering mengalami pasang surut atau hilang dan muncul seperti adanya penembakan di kampung Yal, Distrik Mbua, Kabupaten Nuga. Menurut Letkol inf Chritian FR Ireeuw, motif penembakan dan gangguan yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya terhadap TNI adalah untuk menunjukkan eksistensi keberadaan mereka (Harian Cepos, 09 Juli).

21 Juli

Penyataan Polda Papua yang mencurigai operasional TPN PB mendapat dukungan dari oknum-oknum pejabat di Papua dibantah keras oleh jurubicara TPN PB Sebby Sembom. Melalui pesan singkat ia menyatakan tudingan tersebut tidak mendasar dan terkesan hanya menggiring opini (Harian Cepos, 21 Juli).

26 – 27 Juli

Ketua KNPB konsulat Indonesia, Hiskia Meage menyampaikan bahwa untuk menuju pada kebebasan sebuah negara yang berdaulat sangatlah tidak mudah, sebab membutuhkan proses yang Panjang (Koran Jubi, 26 – 27 Juli).

Otonomi Khusus Papua dan Majelis Rakyat Papua

13 Januari

Sejumlah mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura kembali menggelar aksi demo terkait Otonomi Khusus di depan Auditorium Uncen di Abepura, Selasa (12/1). Mereka menyuarakan agar Otsus dikembalikan kepada masyarakat Papua. Mereka menyatakan menolak segala rancangan dan akal-akalan elit politik Papua terkait pembahasan Otsus. Koordinator lapangan aksi demo, Rizal Seregon mengatakan aksi yang digelar ini untuk merespons pembahasan perpanjangan Otsus yang sedang dibahas DPR RI tanpa melibatkan rakyat Papua dan penuh muatan politik (Harian Cepos, 13 Januari).

02 Juli

Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, 17 Juni 2021. Permohonan ini diajukan karena pemerintah pusat secara sepihak mengajukan RUU tentang Perubahan Kedua UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pihak MRP dan MRPB ingin mencari keadilan dan kebenaran (Koran Jubi, 02- 03 Juli).

07 – 08 Juli

- Ketua MRP, Timotius Murib memaparkan catatan atas situasi demokrasi di Papua Pada masa sebelum dan sesudahnya pemberlakuan Otonomi Khusus Papua. Ia menegaskan situasi demokrasi di Papua pada masa sebelum pemberlakuan Otsus Papua buruk, dan tetap buruk setelah Otsus Papua diberlakukan. Itu artinya perkembangan Otsus tidak membawa perubahan, terlebih perubahan bagi orang Papua di tanahnya sendiri (Koran Jubi, 07 – 08 Juli).
- Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman

Hamid mengatakan bahwa pemerintah ingin memusatkan kekuasaan lewat revisi Undang-undang Otonomi Khusus atau RUU Otsus Papua. Selain itu, Otonomi khusus Papua adalah esensi dari desentralisasi atau penyebaran kekuasaan dari pemerintah pusat (Koran Jubi, 07 – 08 Juli).

09 – 10 Juli

- Wakil Ketua 1 DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan jika Otsus Papua untuk rakyat mestinya pemerintah mendengar aspirasi orang asli Papua dalam pembahasan revisi UU Otsus. Ia mengatakan beberapa waktu lalu presiden Joko Widodo menyatakan, dalam tahapan evaluasi atau revisi UU Otsus mesti mendengar saran serta masukan dari para tokoh dan masyarakat Papua. Akan tetapi dalam tahapan pembahasan UU Otsus antara pemerintah dan DPR RI kini, apa yang disampaikan presiden tersebut tidak terwujud (Koran Jubi, 09 – 10 Juli).
- Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej menyampaikan pihaknya mengusulkan agar RUU Otsus Papua bisa disahkan menjadi UU dalam Rapat Parnipura DPR. Pemerintah dan DPR tengah membahas rencana revisi UU Otsus Papua. Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan UU Otsus Papua (Koran Jubi, 09 – 10 Juli).
- Sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) melaksanakan Reses kedua, Tahun 2021. Reses itu dilakukan dalam rangka sosialisasi dan jaring aspirasi terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Afirmasi dan perubahan kedua RUU otsus Papua serta kondisi Papua terkini (Harian Cepos, 10 Juli).

12 – 13 Juli

- Perubahan RUU Otsus Papua itu merupakan usulan pemerintah yang belum pernah dibicarakan dengan MRP. Hal itu dikatakan oleh

Direktur LP3BH Manokwari Warinussy melalui layanan pesan whatsapp yang menjawab pertanyaan Jubi, Jumat (9/7). Warinussy bahkan menyebut pembahasan RUU perubahan UU Otsus Papua sebagai upaya revisi yang dipaksakan dan tidak memenuhi mekanisme revisi yang diatur sendiri di dalam UU Otsus (Koran Jubi, 12 – 13 Juli).

- Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib menjelaskan bahwa wewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan Otonomi khusus Papua ada pada MRP, dan bukan merupakan wewenang pemerintah pusat ataupun DPR RI. Sebab salah satu kekhususan Otsus Papua adalah wewenang rakyat Papua untuk mengevaluasi otsus itu, dan mengusulkan perubahan UU Otsus Papua. (Koran Jubi, 12-13 Juli).

14 Juli

- Anggota fraksi Gerindra DPR RI menyampaikan bahwa revisi UU Otsus Papua pada awalnya hanya tiga pasal (pasal 1, 34, dan 76) akan tetapi berdasarkan masukan dan pendapat dari masyarakat maka ditetapkan perubahan terhadap 19 pasal (3 usulan pemerintah dan 16 usulan dari luar), berdasarkan kenyataan ini menunjukkan bahwa adanya tanggapan positif dari aspirasi masyarakat meskipun tidak diakomodir secara keseluruhan (Harian Cepas, 14 Juli).
- Ketua MRP, Timotius Murib mendesak Mahkamah Konstitusi RI segera menghentikan pembahasan RUU tentang perubahan UU No 21 tentang Otsus Papua oleh DPR dan DPD RI (Harian Cepas, 14 Juli).
- Pembahasan RUU tentang perubahan UU Otsus No. 21 Tahun 2001 telah selesai dilakukan. Menurut rencana akan disahkan menjadi undang-undang melalui rapat Paripurna DPR RI (Harian Cepas, 14 Juli).

15 Juli

Revisi RUU atas UU Otsus telah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI untuk diparipurnakan dan ditetapkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, namun penolakan terhadap revisi RUU Otsus masih terjadi. Hal ini perlihatkan adanya demo dari solidaritas mahasiswa (Harian Cepos, 15 Juli).

16 – 17 Juli

Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang menggelar konferensi pers di Asrama Mahasiswa Dogiyai Semarang. Mereka menyatakan sikap menolak pengesahan RUU tentang perubahan kedua UU No. 21 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi undang-undang (Koran Jubi, 16 – 17 Juli).

19 Juli

Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano memberikan apresiasi kepada Pansus DPR RI maupun pemerintah yang telah menghasilkan revisi kedua UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua yang optimal walaupun memang tidak semua aspirasi dan keinginan dapat diakomodir (Harian Cepos, 19 Juli).

19 – 20 Juli

- Undang-undang Otsus Papua yang telah disetujui dan disahkan di DPR RI itu merupakan upaya bersama dan wujud komitmen pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian dari integral NKRI (Koran Jubi, 19 – 20 Juli).
- Kedepan jaminan perlindungan hak-hak orang asli Papua berpotensi semakin terancam. Karena UU Otsus Papua yang baru mengatur mengenai pemekaran wilayah tanpa melewati tahap persiapan ini bertentangan dengan UU No 21 Tahun 2001

yaitu pemekaran wilayah dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua dan dewan perwakilan Rakyat Papua dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM dan ekonomi (Koran Jubi, 19 – 20 Juli).

21 Juli

- Anggota komisi I DPR Papua, Yonas Nusi berpendapat bahwa setelah pengesahan UU Otsus tindakan selanjutnya adalah bagaimana ada instrument pelaksanaan teknis untuk penerapan UU tersebut (Harian Cepos, 21 Juli).
- Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus telah ditetapkan menjadi UU oleh DPR RI. Salah satu pasal yang direvisi adalah menyangkut pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten kota di Papua dan Papua Barat. Hal ini tentu membuka ruang bagi pemekaran di dua provinsi ini kedepan. Salah satunya adalah Kabupaten Grime Nawa yang sudah lama diusulkan menjadi kabupaten sendiri (Harian Cepos, 21 Juli).
- Juru Bicara Gubernur Papua, Muhamad Rifai Darus menyatakan pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-Undang pada 15 juli 2021 lalu tidak serta merta menyelesaikan masalah di Papua. Karena jika tidak ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua, maka tidak akan terealisasi. Maka dibutuhkan partisipasi pemerintah di semua tingkatan akan menentukan terlaksananya mandat undang-undang (Koran Jubi, 21 – 22 Juli).
- Koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth mengatakan 4 hal kunci tentang implementasi UU Otsus di Papua. Pertama, pemeritnah perlu menjelaskan secara baik mengapa ada penambahan pasal, perubahan pasal, dan penghapusan pasal. Kedua, perlu melibatkan orang Papua dalam proses revisi UU Otsus tersebut, ketiga perlu evaluasi atas pendampingan Otsus yang sudah berjalan,

dan terakhir perlu membuka ruang komunikasi (Koran Jubi, 21 – 22 Juli).

23 – 24 Juli

- Direktur Jendral Pertimbangan Keuangan Kementerian, Astera Primanto menyebutkan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengatur pengelolaan dana Otsus menjadi lebih konprehensif dibandingkan sebelumnya (Koran Jubi, 23 – 24 Juli).
- Fraksi Otsus DPR Papua mempertanyakan progress dari draft aspirasi masyarakat yang merupakan regulasi proteksi, keberpihakan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua (OAP) (Harian Cepos, 24 Juli).
- Majelis Rakyat Papua Barat menetapkan 1.500 rekomendasi bagi calon siswa bintang Polri program afirmasi otonomi khusus atau Bintaro Otsus Polri 2021 Provinsi Papua Barat. Ini ditetapkan sesuai dengan kuota tahun ini (Koran Jubi, 23-24 Juli).

28 – 29 Juli

Ketua tim kelompok kerja MRP wilayah Mepago Yuliten Anouw mengatakan selama ini hak-hak dasar orang asli Papua dianggap sebelah mata atau disepelekan. Hal ini terlihat ketika para pelaku usaha tambang yang memasuki wilayah adat OAP tanpa memperhatikan hak-hak dasar pemilik ulayat (Koran Jubi, 28 – 29 Juli).

27 September

Majelis Rakyat Papua (MRP) akan melakukan uji materiil perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2001, yaitu ada perubahan beberapa pasal yang kita ketahui ada 19 pasal yang mana ada 8 pasal yang dianggap berpotensi merugikan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua (Koran Jubi, 27-28 September).

07 Oktober

Anggota MRP dari Kelompok Kerja (Pokja) Adat melakukan sosialisasi identifikasi hak-hak adat orang asli Papua (OAP). Sosialisasi berlangsung di rumah makan JDF di Jalan Semarang Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Ketua tim kelompok kerja (MPR) wilayah adat Meepago, Yuliten Anouw, mengatakan pihaknya mengundang beberapa badan musyawarah adat (BMA) serta dewan adat Papua (DAP) di wilayah ini untuk mengidentifikasi hak-hak dasar OAP yang masih terabaikan (Koran Jubi, 06 – 07 Oktober).

12 Oktober

Majlisi Rakyat Papua melakukan pertemuan dengan Wali Nangroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar dan rombongan pada Minggu, 3 Oktober 2021 di Kota Jayapura. Pertemuan ini untuk membahas tentang kerja sama antara Papua dan Aceh dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan UU Nomor 11 untuk Aceh. Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, *“dari hasil pertemuan tersebut kami melihat janji antara bangsa Papua dan bangsa Aceh dengan pemerintah Indonesia dalam undang-undang kekhususan tersebut tidak dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat”* (Koran Jubi, 11 – 12 Oktober).

06 November

Presiden Indonesia Jokowi Dodo membuat aturan baru tentang pengoalahan dana Otsus Papua melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otsus Provinsi Papua. Peraturan tersebut berlaku sejak diundangkan pada 15 Oktober 2021 (Koran Jubi, 05 – 06 November).

09 November

Ketua MRP, Timotius Murib, merasa kesal karena Presiden Jokowi tidak pernah mengunjungi kantor MRP untuk mendengar dan memahami secara lebih baik aspirasi masyarakat, termasuk dalam perubahan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Koran Jubi, 08 – 09 November).

29 Desember

Pemerintah Provinsi Papua akui adanya perubahan UU Otsus, maka ke depan akan dilakukan pembahasan tematik, antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Sekda kab/kota serta para pejabatnya. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad menjelaskan, dengan adanya perubahan UU Otsus, maka penggunaan dana Otsus di kabupaten/kota maupun provinsi masing-masing akan sangat jelas (Harian Cepos, 29 Desember).

Investasi dan Sumber Daya Alam di Papua

27 Juni

- Polresta Jayapura Kota menggerebek tambang ilegal yang berlokasi di belakang gunung dekat kampus IPDN Waena, Jumat, 26 Juni 2020. Aksi penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Gustav Urbinas yang mengamankan 17 orang dan 6 alat berat yang berada di lokasi tambang. Terkait dengan penambangan ini, para pelaku disangkakan dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian UU No. 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan. Menurutnya, tindakan penambangan ilegal ini tidak boleh dibiarkan sebab memiliki dampak buruk bagi lingkungan hidup dan bisa menjadi sebuah bencana (Harian Cepos, 27 Juni).
- Pemerintah Kabupaten Keerom membuka lahan jagung seluas

1.000 Ha guna meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi di tengah wabah Covid-19. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Keerom, Sunar, Pemkab Keerom membantu dengan memberikan bibit unggul 20 Kg, herbisida untuk pra tanam 5 liter, dan untuk masa perawatan dan palet pupuk urea 50 kg, serta biaya tanam Rp 750.000 (Harian Cepos, 27 Juni).

29 Juni

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano nampaknya tak mau diam dengan informasi penambangan liar di Buper Waena. Ia meminta agar aktivitas penambangan liar tersebut dihentikan karena tak memiliki izin atau ilegal. Wali Kota tidak ingin dari aktivitas penambangan liar memberi dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat banyak di kemudian hari (Harian Cepos, 29 Juni).

30 Juni

Direktur Eksekutif Nasional Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati mengatakan *food estate* yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo di Papua hanyalah perubahan nama proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Kedua proyek ini mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak ulayat masyarakat adat. Hal ini disampaikan Nur, Senin 28 Juni 2021 dalam diskusi daring Peluncuran Kertas Posisi WALHI atas proyek *food estate* di Papua. Tajuk diskusinya adalah 'Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan' (Koran Jubi, 30 Juni – 01 Juli).

01 Juli

Kementrian Perekonomian mengusulkan agar Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam 62 kabupaten prioritas nasional. Menurut Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agrobisnis Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian

Musdhalifah Machmud pada Senin 28 Juni 2021 di Jakarta, Kabupaten Pegunungan Bintang tengah

menyiapkan master plan kawasan ekonomi khusus (KEK) ketahanan pangan berbasis sumber daya alam lokal di Distrik Batom (Koran Jubi, 30 Juni – 01 Juli).

02 Juli

Sekretaris Komisi Bidang Sumber Daya Alam DPR Papua, Sinut Busup menyarankan Pemkab dan DPRD Kabupaten Yahukimo membuat regulasi tentang tambang rakyat di wilayahnya. Busup khawatir sejumlah aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Yahukimo bisa memicu konflik kalau tidak diatur dengan baik (Koran Jubi, 02 – 03 Juli).

16 – 17 Juli

- Sebanyak 957 karyawan PT Kodeco mengadu nasib ke DPR Papua karena di- PHK tetapi mereka tidak mendapat pesangon dari pihak perusahaan (Koran Jubi, 16 – 17 Juli).
- Pemerintah membuka kesempatan kepada Biak numfor untuk mengeksport ikan Tuna ke Malaysia dan Singapura sebagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi (Koran Jubi, 16 – 17 Juli).

28 – 29 Juli

Salah satu tokoh masyarakat dari Kampung Zanegi, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Bonefasius Gebze menyampaikan bahwa hutan sumber kehidupan masyarakat adat banyak yang hilang dan lingkungan rusak. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat kesulitan mencari makan, mata pencaharian susah dan kesehatan masyarakat terganggu (Koran Jubi, 28 – 29 Juli).

08 September

Dinas Kehutanan Papua Barat Hendrik Runaweri membantah

dugaan pemalsuan izin pelepasan kawasan hutan di Teluk Wondana. Ia mempersilahkan Balai Penegak Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengecek keaslian dokumen serta fakta di lapangan. Dugaan pemalsuaan dibongkar Aliansi Peduli Masyarakat Adat dan Lingkungan Papua Barat. Temuan itu kemudian mereka laporkan kepada Balai Penegak Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) wilayah Maluku dan Papua (Koran Jubi, 08 – 09 September).

15 September

- Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengingatkan supaya masyarakat di Kabupaten Jayapura sebagai pemilik hak ulayat tidak menjual tanah ulayatnya, sehingga hutan sagu tetap lestari. Hutan sagu sedang dimanfaatkan menjadi tempat bagi masyarakat lokal menyelenggarakan Festival Sagu. Di hutan sagu juga dibangun tempat wisata, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Yoboi, secara khusus generasi mudahnya (Koran Jubi, 15 – 16 September).
- Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP menghimbau kepada masyarakat Kampung Yakotim/Sanggai, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura agar tidak menjual tanah adat sembarangan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pokja Adat MRP, Amatus Ndatipis saat kunjungan kerja dalam rangka pendataan dan penataan hak masyarakat adat terkait keberadaan kebun kako (cokelat) di Kampung Yakotim/Sanggai, Selasa (7/9), bertempat di balai kampung Yakotim. *“Hak-hak tanah yang dimiliki orang asli Papua tidak boleh dijual karena tanah adalah mama, sebab di atas tanah ini ada kehidupan dari generasi ke generasi orang Papua,”* ungkapnya (Koran Jubi, 15 – 16 September).

17 September

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan, Rancangan

Peraturan Daerah Khusus atau Repardasus Kampung Adat yang merupakan usulan eksekutif, mesti mendapat pertimbangan Majelis Rakyat Papua (MRP). DPR Papua akan menyerahkan draf Repardasus Kampung Adat kepada MRP, untuk mendapat pertimbangan. Lembaga kultur orang asli Papua tersebut akan memberi pertimbangan, paling lama dua pekan atau 14 hari. Setelah memberi pertimbangan, MRP akan mengembalikan draf Repardasus ke DPR Papua untuk dibahas dalam paripurna. Ungkapnya pada Rabu, 15-9-2021 (Koran Jubi Edisi 17-18 September 2021).

22 September

- Kampung Yoboi di Distrik Sentani ditetapkan sebagai salah satu dari 50 pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Setelah Desa Wisata, kampung Yoboi akan ditingkatkan menjadi Desa Wisata Mandiri, ungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiogo Uno, saat menandatangani prasasti ADWI 2020 untuk Kampung Yoboi, pada Selasa 21-9-2022 (Koran Jubi Edisi 22-23 September 2021).
- Tony Wenas, Presiden Direktur Freeport Indonesia, mengatakan Blok Wabu awalnya merupakan bagian dari Blok B dalam kontrak karya miliki perusahaan yang lalu. Freeport Indonesia pun telah melakukan eksplorasi blok dengan wilayah total 200 ribu hektar tersebut, tetapi memutuskan tidak tertarik untuk melakukan penambangan. *“Jadi sama sekali Freeport Indonesia tidak punya kepentingan apa-apa di Wabu lagi, karena sudah kami lepaskan dan sudah kami kembalikan ke Kementiran ESDM, dan sudah dinyatakan dalam IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus)”* (Koran Jubi, 22 – 23 September).

24 September

Masyarakat Adat Suku Moi berkomitmen menjaga kelestarian hutan di Kampung Segun, Distrik Segun, Kabupaten Sorong. Mereka tidak mau tergiur untuk melepaskan kawasan hutan ulayat tersebut kepada

investor perkebunan kelapa sawit. Sekretaris Kampung Segun, Samuel Ketumlas mengatakan, *“kami tidak akan melepas sejengkal pun tanah untuk perkebunan kelapa sawi. Apapun tawarannya. Kami bisa hidup (meskipun) tanpa kelapa sawit”* (Koran Jubi, 24 – 25 September).

07 Oktober

Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yan Pugu mengatakan pintu-pintu keluar dan masuk Tanah Papua, seperti pelabuhan udara dan laut, perlu diwaspadai untuk mengantisipasi maraknya penyeludupan satwa-satwa Papua ke luar Papua (Koran Jubi, 06 – 07 Oktober).

14 Oktober

Keterlibatan masyarakat adat menjaga keberlangsungan sagu sangat penting. Badan Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian (Kementan) Papua menyatakan, keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga keberlangsungan tanaman sagu di Papua penting, terutama pemilik hak ulayat (Koran Jubi, 13 – 14 Oktober).

25 Oktober

Masyarakat adat di Kabupaten Keerom, Papua, kini berupaya melindungi hutan dan tanah adatnya dari ancaman investasi terutama perkebunan sawit. Perwakilan masyarakat adat Kampung Wembi, Distrik Manam, Kabupaten Keerom, Kosmas Boryam mengatakan pihaknya merancang upaya menjaga keberlangsungan hutan dan tanah adat mereka (Koran Jubi, 25 – 26 Oktober).

09 November

Dewan adat, WALHI, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAME) dan beberapa lembaga lainnya

menolak pembangunan *Food Estate* yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Mereka berpendapat bahwa proyek itu hanya menguntungkan investor asing dan dapat mengganggu keadaan tanah sakral masyarakat (Koran Jubi, 08 – 09 November).

06 – 07 Desember

Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Jayapura, Benhur Wally menyatakan dalam tatanan adat di Papua, perempuan tidak punya hak berbicara atau tampil dalam forum atau pun pertemuan tertentu di para-para adat. Hal ini juga perlu diklarifikasi, karena peran perempuan sangat penting dalam semua aktivitas masyarakat adat di setiap kampung, apa jadinya jika tidak ada perempuan di dapur (Koran Jubi, 06 – 07 Desember).

13-14 Desember

Pencabutan izin usaha perkebunan kelapa sawit di Papua Barat menarik perhatian media internasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan Papua Barat, Yacob Fonataba menegaskan pencabutan izin usaha perkebunan tersebut mengacu kepada kebijakan nasional moratorium terhadap perluasan dan penanaman kelapa sawit di Indonesia (Koran Jubi, 13 – 14 Desember).

Ekonomi

03 Agustus

Aktifitas pegawai di Kantor Pemkab Jayawijaya pada Senin, (2/8) dilumpuhkan oleh Gabungan Pengusaha Kontraktor Asli Jayawijaya, dengan melakukan aksi pemalangan di depan kantor. Para pengusaha putra daerah ini menilai pembagian paket pekerjaan tak merata kepada pengusaha asli. Koordinator Gabungan Pengusaha Konstruksi Asli Jayawijaya, Imanuel Elosak menilai pembagian paket pekerjaan yang dilakukan Pemkab Jayawijaya tak adil (Harian Cepos, 03 Agustus).

20 Agustus

- Kepala Dinas Perindokop Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay menjelaskan, terkait kolaborasi yang dilakukan antara Disperindang Provinsi Papua dan Perbankan diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik bagi pelaku UMKM di Papua. *“Kami harap para pelaku UMKM di Papua bisa naik kelas dan kedepan kita dapat mengubah pola pikir masyarakat Papua agar tidak monoton mencari pekerjaan hanya sebagai ASN, TNI/Polri dan pegawai BUMN. Melainkan dapat menciptakan peluang-peluang usaha di Papua”* (Harian Cepos, 20 Agustus).
- Kepala Dinas Perikanan Jayawijaya Lamberth Hesegem, mengatakan ada 32 paket bantuan pengembangan perikanan air tawar yang sedang didorong untuk dilaksanakan di tahun ini dengan pendanaan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 2 miliar lebih. *“Dana satu paket di satu distrik, itu ada bibit, pakan, peralatan. Rata-rata bibit yang kita kasih itu nila, mas dan juga lele. Tetapi kami sesuaikan dengan menu yang ditawarkan pemerintah pusat karena ini sumber dananya dari DAK”* (Harian Cepos, 18 Agustus).

10 September

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan eksportasi perikanan mengutamakan peran serta nelayan lokal. Pemerintah tetap mengandalkan hasil tangkapan nelayan setempat dalam memenuhi setiap permintaan pasar di dalam maupun luar negeri. Efendi Igrisa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor meyakinkan Pemkab Biak Numfor sangat serius dalam mengembangkan sektor perikanan tangkap dengan membidik pasaran nasional dan intenasional (Harian Cepos, 10 September).

24 September

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontra Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu berhubungan dengan tayangan Youtube Haris yang menyoal keterlibatan Luhut dalam rencana eksplorasi tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua (Koran Jubi, 24 – 25 September).

23 Oktober

PT Freeport Indonesia yang menambang emas dan tembaga di Kabupaten Mimika, Papua, menyampaikan sejumlah alasannya membangun smelter di Provinsi Jawa Timur dan bukan di Provinsi Papua. Pada Selasa, 19-10-2021 Vice President Corporate Communications PT Freeport, Riza Pratama menyatakan alasannya pertama adalah keekonomian. Kedua, pengelolaan limbah berbahaya yang bisa diserap oleh industri atau pabrik lain di Jawa Timur. Ketiga, fasilitas umum. Keempat, power atau daya listrik (Koran Jubi, 22 – 23 Oktober).

26 Oktober

- Ketua MRP Timotius Murib menyatakan orang asli Papua harus mendapat prioritas untuk bekerja di smelter yang sedang dibangun PT Freeport Indonesia di Jawa Timur. Murib mengingatkan orang asli Papua adalah kelompok yang paling terdampak aktivitas tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua (Koran Jubi, 25 – 26 Oktober).
- Pemerintah Provinsi Papua Barat mempersiapkan tiga daerah sebagai kawasan industri perikanan berkelanjutan yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Daerah tersebut ialah Kabupaten Sorong, Manokwari, dan Kaimana (Koran Jubi, 25 – 26 Oktober).

15 Desember

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua,

khususnya para pelaku UMKM, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong perkembangan koperasi di Provinsi Papua. Kepala Dinas Perindagkop Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay berharap perubahan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat harus ada kolaborasi yang baik. Bukan hanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tapi juga masyarakat (Harian Cepos, 15 Desember).

28 Desember

Dalam keterangan Persnya Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menilai bahwa PT Freeport Indonesia tidak menghargai hak mogok kerja (moker) 8.300 buruh PT Freeport. Pihak LBH berharap Presiden Indonesia Cq Menteri Ketenagakerjaan RI segera memerintah manajemen PT Freeport Indonesia untuk membayar hak-hak buruh dan mempekerjakan kembali 8.300 buruh mogok kerja sesuai perintah nota pemeriksaan (Harian Cepos, 28 Desember).

Korupsi

09 Januari

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menemukan dugaan penyalahgunaan sebanyak 1.028,6 ton beras di Kabupaten Nabire. Ribuan ton beras ini milik Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi regional Papua dan Papua Barat. Kepala Kajati Papua, Nikolaus Kondomo mengatakan dari hasil penyelidikan sementara, penyalahgunaan ribuan ton beras dari tahun 2017 hingga 2018. *“Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 10, 8 miliar. Dari penyelidikan tim kami, sudah terjadi pencairan anggaran untuk membeli beras hingga miliaran rupiah. Namun, beras tersebut tidak terlihat di gudang Bulog Nabire,”* ungkap Kajati Kondomo di Kantor Kejati Papua, Jumat (8/I) (Harian Cepos, 09 Januari).

09 – 10 Juli

Kejaksaan Negeri mengusut indikasi korupsi dalam pengadaan mobil dinas di Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim penyidik memaparkan bukti adanya perbuatan melawan hukum dan indikasi kerugian negara (Koran Jubi, 09 – 10 Juli).

22 Juli

Penyaluran dana kampung ke 354 kampung di Lanny Jaya dilaporkan tidak diterima utuh oleh masing-masing kampung. Dimana setiap kampung ada pemotongan sebesar Rp 71 juta yang kemudian ditransfer ke salah satu rekening perusahaan bernama CV Poropaga (Harian Cepas, 22 Juli).

23 Juli

- Kejaksaan Tinggi Papua telah melakukan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi pengadaan obat di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua. Dalam kasus ini, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai RP 5 miliar (Harian Cepas, 23 Juli).
- Kejaksaan Negeri Jayawijaya melakukan eksekusi terhadap barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang senilai Rp 9.743.548.000 atas nama tersangka Victor Arief Effendy. Eksekusi dilakukan karena perkara ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1640K/Pid. Sus/ 2020 (Harian Cepas, 23 Juli).
- Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penyidikan adanya dugaan korupsi dana Otsus untuk program wajib belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke (Harian Cepas, 23 Juli).
- Kejaksaan Negeri Merauke sedang melakukan penyidikan

terhadap dugaan korupsi dana honorarium sekolah dasar senilai 8 miliar lebih, yang bersumber dari Otonomi Khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, tahun anggaran 2019 silam (Harian Cepos, 23 Juli).

24 Juli

Dua tersangka korupsi pengadaan kapal fiktif pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang bersumber dari dana Otsus tahun 2018 dijatuhi hukuman penjara (Harian Cepos, 24 Juli).

10 September

Anggota Kepolisian Resort Jayawijaya, Polda Papua, menduga mantan Kepala Distrik Wouma berinisial SM telah menjual empat ton beras bantuan sosial (bansos) yang seharusnya diberikan secara gratis untuk masyarakat Wouma. Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Iptu Mattinetta di Wamena, Rabu (8/9) mengatakan pihaknya masih mencari di mana SM menjual beras bantuan sosial itu. *“Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Distrik Wouma, di mana tempat dijualnya beras itu, karena kami menduga beras milik masyarakat Wouma ini sudah dijual”* (Koran Jubi, 10 – 11 September).

28 Oktober

- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan mantan Bupati Yalimo Papua periode 2016-2020, Lakius Peyon, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bansos tahun anggaran 2020. Peyon dijadikan tersangka korupsi karena menggunakan Rp 1 miliar untuk membayar tuntutan ganti rugi dari warga yang marah karena identitasnya diumumkan sebagai pasien Covid-19 (Koran Jubi, 27 – 28 Oktober).
- Penetapan terhadap Bupati Yalimo dalam kasus dugaan korupsi memicu protes dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa

pendukung Bupati Yalimo, Lakius Peyon (Harian Cepas, 28 Oktober).

Penyelesaian Kasus HAM Papua

24 Juni

Dewan pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo meminta kepada semua pihak untuk menerima putusan dari Majelis Hakim (MK) terhadap 7 tahanan politik (Tapol) Papua di Pengadilan Negeri Kelas 1 A di Balikpapan, Kalimantan Timur. Arebo berharap dengan putusan dari hakim, maka tidak boleh ada lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk tidak menerima putusan tersebut, karena ini bisa menambah situasi yang kurang bagus di kalangan masyarakat (Harian Cepas, 24 Juni).

07 – 08 Juli

Penyelidikan kasus Tragedi biak berdarah yang terjadi pada tanggal 6 Juli 1998 tidak dapat dituntaskan oleh Komnas Ham. Pada hal kasus tersebut sudah berlalu 23 tahun yang menyisahkan trauma yang mendalam bagi pihak korban (Filep Karma). Filep Karma mengatakan “saya melihat dari awal negara berusaha menutupi kasus biak berdarah. Itu terlihat waktu banyak ditemukan penggalan-penggalan tubuh yang dimutilasi dan muncul di perairan Biak. Mereka bilang itu korban tsunami dari Papua Nugini” (Koran Jubi, 07 – 08 Juli).

09-10 Juli

Laporan pelanggaran HAM di Biak yang disusun Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Irian Jaya. 10 Juli 1999, disebutkan cukup dengan kronologi kejadian peristiwa biak berdarah.

1 Desember 2004, hari yang ingat bangsa Papua sebagai hari kemerdekaan, Karma lagi-lagi ditangkap karena mengorganisir pengibaran bendera. Filep Karma dan Yusak Pakage dinyatakan

bersalah atas tindak makar. Hukuman untuk Filep Karma 15 tahun. Hakim ketuk palu vonis pada 26 Mei 2005. Pada 19 November 2015, karma dipaksa bebas lewat remisi dasawarsa. Pada hal dia sudah menolak grasi atau remisi berkali-kali karena dia yakin tidak bersalah (*Koran Jubi, Edisi 9-10 Juli 2021*).

14 Juli

- Komisi untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan (kontras) mencatat kurun Januari-November 2022, sedikitnya ada 40 kasus pelanggaran HAM di Papua. Kasus kekerasan itu berwujud macam-macam; penembakan, pengania; penembakan, penganiayaan, dan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat. Orang jadi korban baik ditangkap, luka-luka maupun meninggal dunia (*Koran Cepos, Edisi 14 Juli 2021*).
- Penegakan Hukum dan HAM terhadap kekerasan di Papua telah membuat luka dan tangisan Panjang dalam hati orang Papua. Karena itu sudah sepantasnya dibentuk komisi kebenaran dan Rekonsiliasi untuk dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau (*Koran Cepos, Edisi 14 Maret 2021*).

01 Oktober

Fraksi Gabungan II Bangun Papua di DPR Papua mengingatkan pemerintah tidak mengabaikan sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di dalam Papua dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Fraksi Gabungan Bangun Papua Alferd Fredy Anouw mengatakan euforia pelaksanaan pesta olahraga bergengsi, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, jangan menutupi berbagai peristiwa kekerasan di Papua yang terjadi belakangan ini (*Koran Jubi, 01 – 02 Oktober*).

09 Oktober

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM

DPR Papua, Laurens Kadepa menyatakan korban krisis kemanusiaan di Papua tidak hanya orang asli Papua (OAP). Warga non-Papua pun selama ini menjadi korban. *“Kalau bicara krisis kemanusiaan, korban tak hanya orang asli Papua, juga warga non-Papua. Korban sudah cukup banyak. Mesti menunggu berapa banyak lagi korban. Pemerintah tak bisa terus menunggu, mesti segera ada kebijakan dan model pendekatan baru di Papua”* (Koran Jubi, 08 – 09 Oktober).

14 Oktober

- Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem meminta pemerintah Indonesia belajar kejujuran dalam menyampaikan situasi Hak Asasi Manusia di Papua pada pertemuan/forum internasional (Koran Jubi, 13-14 Oktober).
- Direktur LP3BH Manokwari desak Jokowi selesaikan 2 akar masalah Papua. Yan Christian Warnussy mengatakan sepanjang 25 tahun berdirinya LP3BH, pihaknya belum menemukan upaya nyata dan riil pemerintah untuk mengatasi dua akar masalah Papua. Kedua akar masalah itu adalah kontroversi sejarah Papua dan macetnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia di Tanah Papua (Koran Jubi, 13-14 Oktober).

09 Desember

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua desak Presiden Joko Widodo segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua (Harian Cepos, 09 Desember).

10 Desember

Dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Koalisi Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua gencar kampanyekan isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan di Tanah Papua. Koordinator Umum Kampanye Hari Anti Kekerasan

terhadap Perempuan (I6HA KtP) Koalisi Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua, Ani Sipa mengatakan, ini kampanye tahun ketiga yang dilakukan Koalisi Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua yang dimulai sejak tahun 2019 lalu (Harian Cepos, 10 Desember).

Bencana Alam

09 Juli

Desakan dari masyarakat, korban bencana banjir bandang terhadap DPRD untuk membentuk Pansus penggunaan dana bencana di Kabupaten Jayapura, tampaknya belum ditindaklanjuti oleh DPRD Jayapura. Menurut Clief Ohee mengatakan “secara reulasi Lembaga terhormat itu belum mengambil sikap untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat (Harian Cepos, 09 Juli).

26 – 27 Juli

- Badan Nasional penanggulangan Bencana melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan pada januari hingga juni 2021 meningkat seluas 8.597 hektar atau 16,3 persen perbandingan periode yang sama pada tahun 2020 (Koran Jubi, 26 – 27 Juli).
- Kawasan Arso 2 dan swakarsa, kabupaten Keerom dilanda banjir lagi sejak Minggu (25/7/2021). Tidak ada korban jiwa dan air setinggi 1 meter yang meluap dari kali Tami (Koran Jubi, 26 – 27 Juli).

Kebudayaan

13 Juli

Balai Arkelogi Papua melakukan ekskavasi atau penggalian terhadap situs khulutiyaew yang berlansung dikampung abar, Distrik Ebungfauw, kabupaten jayapura. Di tempat tersebut ditempuh dua buah batu berbentuk bundar yang biasa digunakan untuk membuat gerabah (Harian Cepos, 13 Juli).

23 – 24 Juli

Balai arkelogi provinsi Papua menemukan fosil kayu yang telah menjadi batu berbentuk batang pohon dengan berat sekitar 39 kg. Fosil tersebut ditemukan diperbukitan sebelah barat kampung abar, distrik Ebungfauw kabupaten Jayapura. Hari suroto (peneliti balai arkelogi) mengatakan fosi kayu ditemukan pada ketinggi 162 meter di atas permukaan laut tersebut diperkirakan berasal dari Zaman pertengahan Miosen atau 15 juta tahun silam (Koran Jubi, 23 – 24 Juli).

30 – 31 Juli

Hampir sebagian besar rumah adat suku Amungme atau dalam Bahasa setempat di sebut Kalokia Hinangami Devin sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada mungkin hanya bentuk rumah keluarga, apalagi masuknya agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik di Bumi Amungme menyebabkan rumah adat pun beralih ke rumah ibadah atau Gedung Gereja. Masyarakat suku Amungme kini bermukim di distrik Akimuga dan sekitar Kawasan tambang PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika (Koran Jubi, 23 – 24 Juli).

06 Agustus

Pemerintah didesak untuk menetapkan tanggal 05 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Budaya Papua. Kelompok khusus (Lokus) DPR Papua meminta agar pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Kota dapat menetapkan 05 Agustus sebagai hari Kebangkitan Budaya Papua. Ketua Lokus Papua, John NR Gobai menjelaskan, Perdasus 16 tahun 2008 tentang perlindungan kebudayaan asli Papua, pemerintah provinsi dan kabupaten kota mewajibkan tempat-tempat publik seperti bandara, angkutan umum, kantor-kantor, hotel dan sebagainya pada hari tertentu harus putar lagu-lagu Papua (Harian Cepos, 06 Agustus).

16 September

Dewan Adat Papua Wilayah Adat Lapago memprotes pembangunan Jalan lingkar Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Papua. Jalan lingkar yang dinamai Jalan Lingkar Lukmen itu dinilai tidak akan membawa dampak positif bagi masyarakat adat Lembah Hubulama dan pembangunannya merusak sejumlah lokasi sakral Suku Hubula. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dewan Adat Papua wilayah Adat Lapago, Engel Surabut saat dibubungi Jubi melalui panggilan telepon Pada Senin, 13-9-2021. "Jalan Lingkar Lukmen itu sangat merusak. Jalan ini membawa malapetaka bagi Suku Hubula". Katanya (Koran Jubi, 15 – 16 September).

24 September

- Peneliti ahli muda Balai Arkeologi Papua, Erlin Novita Djami, mengatakan sudah saatnya Situs Gunung Srobu masuk dalam kurikulum muatan lokal (mulok) sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal. "Informasi budaya dari Srobu dimanfaatkan untuk membuat buku (kurikulum) mulok yang membuat anak-anak bisa mengenal kebudayaan dan memahaminya (Koran Jubi, 24 – 25 September).
- Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta pihak kontraktor dan pemerintah mempertimbangkan dengan baik pembongkaran jalan lingkar Lukmen di Jayawijaya yang tidak disetujui oleh pihak hak ulayat, masyarakat setempat dan mahasiswa. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Agama MRP, Helena Hubi mengharapkan agar pembangunan jalan lingkar Lukmen di Jayawijaya tidak merugikan masyarakat setempat sebagai pemilik hak wilayah (Koran Jubi, 24 – 25 September).

09 Oktober

Masyarakat adat Papua di wilayah adat Mamta mendesak DPR

Papua dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kampung adat. Desan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Yakonias M Wabrar, dan Koordinator Sembilan Dewan Asat Suku (DAS) di Kabupaten Jayapura, Daniel Toto usai bertemu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua (Koran Jubi, 08 – 09 Oktober).

19 Oktober

- Yayasan Pengembangan Sekolah Adat Kabupaten Jayapura berencana mendirikan Universitas Adat Papua dengan kebutuhan anggaran Rp 500 miliar: Salah satu upaya agar adat dan budaya tidak hilang. Direktur Yayasan Pengembangan Sekolah Adat di Kabupaten Jayapura Origenes Monim mengatakan universitas tersebut akan memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum Adat dan Fakultas pendidikan adat (Koran Jubi, 18 – 19 Oktober).
- Bupati Sorong, Papua Barat, Johny Kamuru menyerahkan surat keputusan (SK) bupati tentang pengakuan terhadap hak Gelek Malak Kalawilis Pasa, salah satu marga Suku Moi di Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong (Koran Jubi, 18 – 19 Oktober).

03 November

MRP dan DPR Papua menetapkan 30 Oktober sebagai hari Budaya diseluruh tanah Papua. Hal ini dilakukan demi melestarikan setiap budaya yang ada di setiap daerah atau kabupaten/kota yang ada di Papua (Koran Jubi, 03 – 04 November).

Kesehatan

03 Januari

Papua selalu masuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Tahun lalu, kasus HIV Papua ada di posisi keempat nasional dengan 37.662 kasus. Sedangkan untuk AIDS,

Papua duduk di urutan teratas dengan 23.629 kasus. Namun, pandemi mengubah banyak hal di Papua dalam penanganan HIV/AIDS, kata Vanda Kirihio, Direktur Yayasan Harapan Ibu, Papua. *“Kami yang menangani HIV/Aids, merasa dilupakan. Perhatian pemerintah semua ditujukan kepada Covid. Kita tahu perhatian pemerintah kesana lebih banyak, kemudian diikuti pendanaan yang banyak dengan fasilitas disediakan,”* papar Vanda. Padahal, lanjut Vanda, Papua tidak hanya memiliki masalah dengan Covid-19. Dia menyebut ATM, yaitu AIDS, TB dan Malaria sebagai problem besar menahun yang belum bisa diselesaikan. Terlalu fokus pada Covid-19, berisiko membawa Papua ke situasi sulit dalam penanganan tiga penyakit mematikan di Papua itu (<https://www.voaindonesia.com/a/di-tengah-covid-papua-dan-papua-barat-tetap-dibayangi-aids/5722827.html>).

01 Februari

Legislator Papua mempertanyakan peran tenaga kesehatan atau nakes, terutama para kepala Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di tengah konflik bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua. Anggota komisi bidang kesehatan DPR Papua, Namantus Gwijangge mengatakan Kepala Dinas Kesehatan Nduga, Ina Gwijangge belum lama ini mengaku tetap berupaya melayani para pengungsi di sejumlah wilayah. Akan tetapi, itu bertentangan dengan pengakuan pengungsi Nduga di Kabupaten Jayawijaya. Pengungsi di sana menyatakan, selama ini yang biasanya memberikan layanan kesehatan kepada mereka adalah komunitas relawan yang bergerak di bidang kesehatan. *“Saya kira patut kita pertanyakan peran dan seperti apa kinerja nakes, terutama para Kepala Puskesmas di Nduga,”* kata Namantus kepada Jubi, Senin (1/2/2021) (<https://jubi.co.id/legislator-papua-pertanyakan-peran-nakes-di-tengah-konflik-nduga/>).

03 Mei

Kementerian Kesehatan menempatkan 390 tenaga kesehatan (nakes) di berbagai pelosok Provinsi Papua sepanjang 2021 untuk mengoptimalkan

pelayanan medis bagi masyarakat setempat. *“Rencana penempatan tahun 2021 sejumlah 390 nakes dan lama penugasan selama dua tahun,”* kata Sekretaris Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan, Trisa Wahjuni Putri melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin. Trisa mengatakan nakes yang sudah ditempatkan dan yang sedang bertugas di Provinsi Papua per awal April 2021 melalui penugasan khusus sebanyak 134 orang. Penempatan tenaga kesehatan dari kalangan dokter spesialis, bidan, perawat itu merupakan implementasi dari Program Nusantara Sehat yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan (<https://www.antaranews.com/berita/2135730/kemenkes-tempatkan-390-nakes-di-papua-sepanjang-2021>).

07 Juni

- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan capaian pembangunan kesehatan di wilayah otonomi khusus Papua dan Papua Barat sudah mengalami perbaikan, tetapi masih terganjal dengan persoalan lama di sektor kesehatan. Dia mengatakan sejak 2002 - 2020 perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) naik selama hampir dua dekade terakhir, dibandingkan provinsi lainnya yang setara dengan Papua dan dibanding rata-rata nasional. Di Papua, IPM pada 2020 mencapai 60,4 dari 60,1 pada 2002, sedangkan di Papua Barat tercatat mencapai 65,1. Demikian juga pada angka harapan hidup (AHH) yang menjadi indikator kesehatan bukan hanya secara nasional tetapi juga regional. Di Papua, AHH mencapai 65,8 pada 2020 dari 65,2 pada 2002. Sementara di Papua Barat sebesar 66,1 (<https://kabar24.bisnis.com/read/20210607/15/1402279/menkes-pembangunan-kesehatan-di-papua-dan-papua-barat-membaik>).
- Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin membeberkan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan kementeriannya terkait kesehatan di Papua dan Papua Barat. Salah satu data yang dipaparkan adalah tingkat penularan penyakit menular di kedua daerah tersebut.

Budi mengatakan bahwa persoalan penyakit menular ini sudah menjadi salah satu fokus Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bahkan, kata dia, persoalan tersebut masuk ke dalam salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal itu dia ungkapkan dalam rapat kerja Pansus RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tak hanya Menkes, rapat tersebut juga menghadirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. “Memang daerah Papua dan Papua Barat merupakan salah satu sentra yang harus kita tingkatkan secara lebih agresif bersama-sama bagaimana kita mengurangi laju penularan penyakit menular,” ujar Budi dalam paparannya, di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/6/2021). Dalam catatannya, setidaknya ada tiga perkembangan jenis penyakit menular dalam paparan Menkes. Pertama, HIV pada tahun 2001 di Papua sebanyak 525 kasus. Sementara pada tahun 2020 kemarin, jumlah kasus di Papua sebanyak 2.644 dan Papua Barat sebanyak 405 kasus(<https://nasional.sindonews.com/read/448752/15/menkes-ungkap-penyakit-menular-di-papua-dan-papua-barat-meningkat-1623071191>).

29 Juni

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang dirusak oleh sekelompok orang pada Jumat (26/6). Aksi pengrusakan ini terjadi akibat salah paham karena informasi tentang pasien dengan inisial PW yang saat pemeriksaan *rapid test* mendapatkan hasil reaktif dan langsung dibawa ke RSUD Oksibil untuk mendapatkan penanganan medis. Ketika berada di rumah sakit pasien merasa takut dan melarikan diri dan salah paham sehingga terjadi pengrusakan Rumah sakit. Tindakan pengrusakan ini telah dilakukan mediasi yang ditandai dengan penandatanganan perdamaian dan kesepakatan bersama yang dilakukan wakil Bupati, Kapolres, Pabung 1715 Yahukimo, Waket II DPRD Kab.

Pegunungan Bintang, Kepala Dinas Kesehatan selaku ketua Tim Satgas Covid-19, Direktur RSUD Oksibil dan tokoh masyarakat (Harian Cepos, 29 Juni).

06 Juli

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Merauke-Papua, Tuban Sriyono, mengungkapkan setiap bulan pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap para pekerja seks komersial (PSK) maupun para pekerja di tempat hiburan malam untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di pusat kesehatan reproduksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat. Hal itu disampaikan Sriyono saat dihubungi melalui telpon selulernya, Senin (5/7/2021) sore. *“Memang rutin dilakukan pemeriksaan agar diketahui apakah mereka dalam keadaan sehat atau tidak dan tak terinfeksi HIV,”* ujarnya. Data kasus HIV-AIDS di kabupaten di wilayah selatan Papua tersebut selama tahun 2021 sebanyak 17 orang HIV dan 3 lainnya AIDS. Total penderita HIV-AIDS di kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini (PNG) itu sebanyak 20 orang dan meninggal dunia 4 orang (<https://jubi.co.id/papua-kpa-merauke-dampingi-psk-periksa-kesehatan-rutin/amp/>).

17 Agustus

Sekretaris KPA Kabupaten Merauke, Damario Sriyono, mengungkapkan pihaknya telah menghidupkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS Sekolah atau Kompas melalui penyuluhan kepada siswa-siswi tingkat sekolah menengah atas (SMA) di kabupaten di selatan Papua tersebut. Program Kompas tersebut tidak lain adalah memberikan materi kepada siswa-siswi seputar informasi dasar tentang HIV/AIDS dan pendidikan reproduksi. *“Kenapa kita berikan, karena anak-anak ini sedang dalam masa peralihan dari remaja ke dewasa,”* ungkap Sriyono kepada Jubi melalui telpon selulernya, Selasa (17/8/2021) (<https://jubi.co.id/papua-kpa-merauke-hidupkan-kembali-kompas/>).

07 September

Meningkatnya angka kasus penderita Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome atau HIV / AIDS secara kumulatif terjadi hingga 2.540 kasus di Marauke. Sebelumnya, pada tahun 2020 tercatat ada 138 kasus dan pada bulan Januari-Juni 2021 terdapat 53 kasus baru yang muncul. Dilansir dari laman teras.id, menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Marauke, Papua, Damario Sriyono menyebutkan *“Angka kasus penderita HIV / AIDS dominan dialami ibu rumah tangga dengan jumlah 21,1 persen. Kemudian kalangan pelajar pun cukup banyak,”* katanya. Damario mengungkapkan bahwa selama ini informasi lajunya penyebaran HIV-AIDS tidak sesanter Covid-19. Dan yang paling disayangkan, jumlah kasusnya yang terus meningkat, sedangkan LSM yang bergerak untuk HIV-AIDS saat ini telah berkurang. Hal tersebut tentu sangat menghawatirkan apalagi HIV adalah jenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia, dan AIDS adalah sekumpulan yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Bukan hanya itu, penderita HIV tentu saja memerlukan pengobatan dengan Antiretroviral (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV yang terdapat didalam virus agar tidak masuk kedalam stadium AIDS, sementara itu AIDS membutuhkan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasi (Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1503217/kasus-hiv-aids-di-marauke-papua-terus-mengalami-peningkatan>).

09 September

Pandemi Covid-19 tidak mengalihkan sepenuhnya perhatian pemerintah dalam upaya penanganan penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Salah satunya dengan memperbaiki sanitasi dan lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan masih

banyak penyakit yang perlu diwaspadai di Papua, seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, HIV/AIDS, lepra, stunting, juga Covid-19. Berdasarkan laporan, di Puskesmas Arso Timur, Kabupaten Kerook, misalnya, kasus ISPA tahun 2020 mencapai 913. Disusul Malaria (845), Myalgia (450), Observasi Febris atau yang bisa menjadi gejala awal penyakit demam berdarah dan tifus (293), gastritis (226), dan berbagai penyakit lainnya hingga diare (66) dan hipertensi (61) (<https://www.kemendiknas.go.id/perbaikan-sanitasi-upaya-atasi-berbagai-penyakit-di-papua>).

12 November

Gubernur Lukas Enembe yang didampingi oleh Bupati Membaromo Tengah Ricky Ham Pagawak meresmikan Rumah Sakit dan 8 (delapan) Puskesmas di Kabupaten Membaromo Tengah, pada 12 November 2021 demi memenuhi layanan kesehatan yang baik (Harian Cepas, 12 November).

30 November

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Nabire, Papua secara kumulatif hingga akhir bulan September 2021 dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 30 September 2021 mencapai 8.640 kasus, atau terus mengalami kenaikan.

Data ini sekaligus menempatkan kabupaten Nabire masih berada di urutan pertama se-provinsi Papua dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi.

Sedangkan untuk Provinsi Papua sendiri hingga akhir September 2021, jumlah kasus HIV/AIDS dari 29 kabupaten/kota se-Papua mencapai 46.967 kasus. Sementara kasus kematian akibat HIV/AIDS di Nabire hingga akhir September 2021 sebanyak 466 kasus atau naik 62 kasus dibandingkan Maret tahun 2020. Di bawah kabupaten Nabire, kota Jayapura berada di urutan kedua kasus HIV/AIDS terbanyak

dengan jumlah 6.991 kasus, dan kabupaten Jayawijaya di urutan ketiga dengan jumlah 7.520 kasus. Tingginya kasus HIV/AIDS di Nabire selain karena kabupaten Nabire menjadi kabupaten rujukan dari beberapa kabupaten lain di wilayah Meepago dalam pemeriksaan kasus HIV/AIDS, juga dikarenakan perilaku hidup tidak sehat seperti melakukan seks bebas berganti-ganti pasangan. Disamping itu, petugas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang ada di Nabire, semakin giat untuk melakukan deteksi pemeriksaan HIV/AIDS sehingga semakin banyak kasus HIV/AIDS yang ditemukan (<http://www.nabire.net/hingga-akhir-september-2021-kasus-hiv-aids-di-nabire-masih-tertinggi-di-papua/>).

01 Desember

Ketua harian Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Papua, dr Anton Tony Mote mengatakan, jumlah data pengidap kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua hingga 1 Desember 2021 mencapai 46.967 kasus. Kasus tersebut tersebar di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua. *“Dari data jumlah terbaru untuk di Provinsi Papua yakni Jayapura 508 kasus dan Nabire 466 kasus menempati jumlah kasus tertinggi,”* ungkap Ketua harian KPA Papua Anton Mote di sela-sela peringatan hari AIDS Internasional 1 Desember di Jayapura, Rabu (1/12). Dia mengungkapkan, pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat, LSM, tokoh agama dan para ODHA melakukan kampanye tentang pencegahan untuk mencegah penyebaran dan penularan HIV/AIDS. Dia menyebut, jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Papua berdasarkan data terbaru sebanyak 46.967 kasus tersebar di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kpa-catat-46967-kasus-hiv-aids-di-papua.html>).

Pengiriman Pasukan Militer ke Tanah Papua

01 Mei

Pasukan gabungan TNI dan Polri mulai dikirim ke Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu (1/5/2021), untuk memburu Tentara Pembebasan

Nasional Papua Barat yang kekinian ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi Komisaris Besar Polisi Iqbal Alqudusy mengatakan, pengerahan pasukan bersenjata itu adalah wujud representasi RI di wilayah setempat. *“Pada Sabtu pagi tadi pasukan TNI dan Polri telah tiba di Distrik Ilaga dalam rangka melakukan pengamanan kegiatan masyarakat maupun pengejaran terhadap KKB yang sekarang ini telah disebut sebagai Kelompok Teroris,”* kata Iqbal seperti dikutip dari Antara. Ia mengatakan, pengiriman pasukan TNI dan polisi ke Ilaga itu tidak lepas dari tewasnya Kepala BIN Daerah Papua Mayor Jenderal TNI (Anumerta) I Gusti Putu Danny Nugraha Karya di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Minggu (25/4) (<https://www.suara.com/news/2021/05/01/203314/tni-dan-polri-mulai-kirim-pasukan-bersenjata-ke-papua-buru-tpnpb?page=all>, <https://www.liputan6.com/news/read/4547364/pasukan-tni-polri-mulai-dikirim-ke-ilaga-papua-buru-kelompok-teroris>).

05 Mei

TNI akan mengirim 400 prajurit TNI tambahan untuk menindak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Asisten Operasi Kodam II Sriwijaya Kolonel Inf Willy Brodus Yos Rohadi mengatakan 400 personel yang akan dikirim yakni Prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 315 Garuda atau yang dikenal dengan julukan ‘Pasukan Setan’. Pengiriman pasukan tersebut, kata dia, menunggu keputusan dari Markas Besar TNI. Sebelumnya, Pemerintah resmi mengategorikan kelompok bersenjata di Papua, yang bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), sebagai organisasi teroris. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pelabelan tersebut berdasarkan usulan dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah Papua, serta aparat keamanan. Mahfud menegaskan penanganannya dilakukan oleh polisi dan dibantu oleh TNI (<https://www.aa.com.tr/id/nasional/indonesia-akan-kirim-400-prajurit-tni-tambahan-ke-papua-/2229979>).

24 Mei

Kapal Perang KRI 592 Banjarmasin mengantarkan 400 pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) ke wilayah Papua. Ratusan personel yang dijuluki ‘Pasukan Setan’ ini dikirim untuk mendamaikan wilayah Papua. Upacara pelepasan 400 personel Batalyon Infanteri 315/Garuda Kodam III Siliwangi itu dilakukan di Lapangan Mulyono Silam, Dermaga Kolinlamil Jakarta Utara, Senin (24/5/2021). Pelepasan ratusan personel TNI tersebut dipimpin langsung Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan dihadiri Inspektur Kolinlamil Laksma TNI Frendy H Saragih (<https://news.detik.com/berita/d-5581229/diantar-kapal-perang-400-pasukan-setan-tni-berangkat-ke-papua>).

03 September

Kapendam XVIII Kasuari, Kolonel Hendra Pesireron mengatakan penambahan pasukan dilakukan di Pos Koramil di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Langkah ini dilakukan pasca serangan yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menewaskan 4 prajurit TNI. “*(Ditambahkan) 1 kompi pasukan,*” ujar Hendra saat dihubungi oleh Tempo. Hendra mengatakan saat ini situasi di sekitar lokasi sudah jauh lebih terkendali. Menurut Panglima Kodam XVIII Kasuari, Mayor Jenderal I Nyoman Cantiasa, kejadian penyerangan terjadi pada Kamis, 2 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIT. Ia menyebut para pelaku menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 4 anggota TNI tewas dan 2 lainnya luka berat. Ia tak dapat memastikan jumlah pelaku. Namun Pangdam menduga ada sekitar 30 pelaku yang menyerang. Hari ini, Cantiasa juga menyebut 2 pelaku telah ditangkap dan dalam tahap pemeriksaan oleh kepolisian (<https://nasional.tempo.co/read/1502045/tni-tambah-pasukan-usai-serangan-opm-ke-pos-koramil-papua-barat>).

22 November

Sejumlah anggota TNI berbaris saat upacara pelepasan penugasan prajurit TNI ke perbatasan Indonesia-Papua Nugini, di Dermaga Angkatan Laut, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (9/11/2021). Sebanyak 450 prajurit TNI diberangkatkan ke Papua untuk bertugas menjaga perbatasan RI-PNG (<https://www.tribunnews.com/images/editorial/view/1902463/pengiriman-pasukan-tni-ke-perbatasan-indonesia-papua-nugini>).

Biodata

Penulis

Bernadus Boki Koten

Bernard Koten merupakan staf SKPKC Fransiskan Papua. Sejak bergabung dengan SKPKC Fransiskan Papua, Bernard melanjutkan tradisi SKPKC Fransiskan Papua untuk menulis dan menerbitkan buku Seri Memoria Passionis.

Farini Alexandro Rangga OFM

Pater Sandro, OFM, begitulah dia disapa. Pater Alexandro, OFM menyelesaikan studi S2 komunikasi sosialnya di Roma, Italia. Pater Sandro juga aktif sebagai penulis baik itu opini, esay dan buku. Dua buku yang telah diterbitkan oleh SKPKC Fransiskan Papua adalah Fenomena Papua (kumpulan esai-esai Sosial) dan Tindakan Politik Bagi Papua: Relevansi Pemikiran Hannah Arendt. Saat ini Pater Sandro, OFM adalah staf di Kantor SKPKC Fransiskan Papua

Latifah Anum Siregar

Anum Siregar, begitulah biasa disapa di kalangan advokat/pengacara dan aktivis. Ibu Anum Siregar merupakan salah satu Pengacara Senior yang banyak menangani persoalan HAM di Tanah Papua. Selain aktif beracara dan pembela hak-hak kliennya, Ibu Anum juga aktif menulis tentang persoalan HAM di Tanah Papua. Saat ini Ibu Anum adalah Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP). Lembaga yang dipimpinnya ini sudah puluhan tahun membantu dan mendampingi warga sipil di Tanah Papua yang lemah dan di mata hukum.

Mochammad Wahyu Ghani

Pria kelahiran Temanggung, saat ini bekerja di Pusat Riset Kependudukan – Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ghani sendiri menyelesaikan studi S2 di Universitas Padjajaran pada Ilmu Komunikasi. Dia aktif melakukan riset dan menulis tentang persoalan sosial di Indonesia dan Papua. Pada tahun 2020, Yayasan Pustaka Obor Indonesia menerbitkan buku yang ditulis oleh Ghani, 'Kesehatan Ibu dan Anak Orang Asli Papua'.

Petrus Pit Supardi

Petrus Pit Supardi, Alumni STFT Fajar Timur, 2006. Sejak tahun 2012, bekerja untuk isu keterbukaan informasi publik, perbaikan tata kelola pemerintahan kampung, sekolah dasar, Puskesmas dan pencegahan HIV-AIDS di Tanah Papua. Dia juga seringkali menulis opini tentang persoalan sosial (Pendidikan dan Kesehatan) di Tanah Papua.

Papua dan persoalan hak asasi manusia (HAM) sepanjang tahun 2021, masih miris dan tidak menentu. Segala peristiwa yang berkaitan dengan HAM masih harus diperjuangkan. 'Utang', janji dan persoalan pada tahun-tahun sebelumnya masih terjadi di tahun 2021. Saat ini, 'para pihak' atau mereka yang mengikuti persoalan di Papua, terus berusaha mencari solusinya. Begitupula dengan para korban dan warga Papua.

'Ruang' keadilan dan perdamaian di Tanah Papua masih belum terisi padat. Masih banyak pihak, khususnya masyarakat adat Papua, belum bisa menempati 'ruang' tersebut. Mereka masih terus berjuang.

Kebijakan dari mereka yang berkuasa selalu mengabaikan suara-suara keadilan dari kaum termaginal di Papua. Suara lantang akan sebuah keadilan dan kedamaian terbentur tembok nan kokoh dan kuat.

Walaupun demikian, bagi kaum termaginal dan yang tersisihkan, tidak mau menyerah. Jalan yang panjang untuk sebuah keadilan dan perdamaian di tanah airnya, Tanah Papua, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilalui dan ditempuh. Banyak pihak tidak menutup mata dan hati akan asa perjuangan kaum kecil, termaginal di Tanah Papua.

Buku Seri Memoria Passionis No.40 berjudul "Jalan Keadilan dan Kedamaian di Papua: Analisis dan Kronik Hak Asasi Manusia 2021", merupakan bagian upaya SKPKC Fransiskan Papua untuk terus menjaga agar mata dan hati perjuangan hak asasi manusia tetap terbuka. Demikian, dokumentasi Memoria Passionis bisa menjadi jalan bagi penghormatan hak asasi manusia.